



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II TAHUN 2022

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BeLaGak

BALAI BESAR POM DI PALEMBANG



BeSoLek

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
HIGHLIGHT LAPKIN TRIWULAN II TAHUN 2022	xii
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Palembang	1
1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palembang	4
1.4 Isu Strategis: Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2022-2024	13
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022	62
2.3 Perjanjian TRIWULAN II TAHUN 2022	62
2.4 Rencana Aksi Perjanjian TRIWULAN II tAHUN 2022	65
2.5 Metode Pengukuran	65
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	67
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	67
3.2 REALISASI ANGGARAN	124
BAB IV. PENUTUP	128

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 RENSTRA BBPOM DI PALEMBANG TAHUN 2022-2024**
- LAMPIRAN 2 RENCANA KINERJA TAHUN 2022**
- LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**
- LAMPIRAN 4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**
- LAMPIRAN 5 CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 TW2**
- LAMPIRAN 6 CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI S.D TRIWULAN II TAHUN 2022**
- LAMPIRAN 7 REWARD/PUNISHMENT MONEV IKK TW II TAHUN 2022**

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Cathment Area Balai Besar POM di Palembang	4
Tabel 2	Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2022	15
Tabel 3	Perjanjian Kinerja BBPOM di Palembang 2022	63
Tabel 4	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	66
Tabel 5	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan TW 2 Tahun 2022	67
Tabel 6	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama TW2 Tahun 2022	69
Tabel 7	Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TRIWULAN II Tahun 2022	73
Tabel 8	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TRIWULAN II Tahun 2022	75
Tabel 9	Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TRIWULAN II Tahun 2022	77
Tabel 10	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TRIWULAN II Tahun 2022	79
Tabel 11	Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat TRIWULAN II Tahun 2022	81
Tabel 12	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu TRIWULAN II Tahun 2022	84
Tabel 13	Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TRIWULAN II Tahun 2022	85
Tabel 14	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan TRIWULAN II Tahun 2022	85
Tabel 15	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM TRIWULAN II Tahun 2022	86
Tabel 16	Capaian indikator Kinerja Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan TRIWULAN II Tahun 2022	87

Tabel 17	Capaian Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi TW 2 Tahun 2022 terhadap target Tahun terakhir Renstra	88
Tabel 18	Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan / rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder TRIWULAN II Tahun 2022	90
Tabel 19	Capaian Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder TW2 Tahun 2022 terhadap target Tahun terakhir Renstra	91
Tabel 20	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu TRIWULAN II Tahun 2022	93
Tabel 21	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan TRIWULAN II Tahun 2022	95
Tabel 22	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan TRIWULAN II Tahun 2022 terhadap tahun terakhir Renstra 2024	96
Tabel 23	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan TRIWULAN II Tahun 2022	98
Tabel 24	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan TRIWULAN II Tahun 2022 terhadap tahun terakhir Renstra 2024	99
Tabel 25	Capaian indikator Indeks Pelayanan Publik TW 2 Tahun 2022	101
Tabel 26	Capaian Indikator Kinerja UMKM yang di damping dalam pemenuhan standar oleh UPT TRIWULAN II Tahun 2022	101
Tabel 27	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TRIWULAN II Tahun 2022	103
Tabel 28	Capaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman TRIWULAN II Tahun 2022	105
Tabel 29	Capaian indikator kinerja Jumlah desa pangan aman TRIWULAN II Tahun 2022	107
Tabel 30	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya TRIWULAN II Tahun 2022	109

Tabel 31	Capaian Indikator Kinerja Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar TRIWULAN II Tahun 2022	110
Tabel 32	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar TRIWULAN II Tahun 2022	113
Tabel 33	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII TRIWULAN II Tahun 2022	115
Tabel 34	Capaian indikator Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TWII Tahun 2022	117
Tabel 35	Capaian Indikator Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW II Tahun 2022	118
Tabel 36	Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW II Tahun 2022	119
Tabel 37	Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal TW II Tahun 2022	119
Tabel 38	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TRIWULAN II Tahun 2022	122
Tabel 39	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja TRIWULAN II Tahun 2022	125
Tabel 40	Realisasi Anggaran Tiap Indikator Kegiatan TRIWULAN II Tahun 2022	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BBPOM di Palembang

4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.4.1	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap 2022 TW II Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	88
Grafik 3.1.4.2	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap TW II 2022 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	91
Grafik 3.1.4.3	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap 2022 TWII Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	96
Grafik 3.1.4.4	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap 2022 TW II Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	99
Grafik 3.1.7.1	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan TRIWULAN II Tahun 2022 terhadap Tahun 2022	115

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang (BBPOM di Palembang) Interim Triwulan II tahun 2022 disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Palembang kepada masyarakat dan *stakeholders* dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai **Unit Pelaksana Teknis** BPOM. Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2022 merupakan laporan kinerja Balai Besar POM di Palembang dari April 2022 sampai dengan Juni 2022 sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, pembuatan laporan ini juga sebagai upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kedepannya.

Balai Besar POM di Palembang sudah berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Kendala utama di Triwulan II Tahun 2022 ini adalah meningkatnya beban kerja serta bertambah luas dan kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai, khususnya penguatan laboratorium dan teknologi informasi.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja yang telah tersusun ini dapat menjadi pertanggungjawaban bagi BBPOM di Palembang dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Palembang, 15 Juli 2022
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
Dan Makanan di Palembang



Dr. Zulkifli, Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Palembang TW 2 Tahun 2022 merupakan informasi tentang Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Efektifitas Kegiatan sampai dengan TW 2 tahun 2022. Pengukuran ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada TW 2 tahun 2022 yang telah dituangkan target pertriwulan /bulanan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang sesuai dengan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024.

Selama 3(tiga) bulan kegiatan pada TW2 tahun 2022, Balai Besar POM di Palembang harus mencapai 11 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Palembang. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri dan hasil penilaian pusat, diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Pada TW2 Tahun 2022 dari 11 Sasaran Kegiatan hanya 7(tujuh) sasaran kegiatan yang dapat dihitung dengan 3(tiga) sasaran kegiatan dengan kriteria capaian baik, 1(satu) kegiatan dengan kriteria capaian CUKUP dan 3(tiga) sasaran kegiatan kriteria capaiannya Tidak Dapat Disimpulkan.
- 2) Dari 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan yang dicapai tersebut dari beberapa indikator sebagai berikut :
 - a. Sasaran Kegiatan target pertama mencapai kriteria **“BAIK” (101,28%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 5 (lima) indikator dengan 1 (satu) indikator kriteria CUKUP” dan 4(empat) indikator dengan kriteria “BAIK”.
 - b. Sasaran Kegiatan keempat dengan kriteria **“CUKUP” (89,95%)** dengan 1 indikator dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” , 2 indikator dengan kriteria **“BAIK”**, **2(dua) indikator dengan kriteria “KURANG” dan 1(satu) indicator dengan kriteria “SANGAT KURANG”..**
 - c. Sasaran Kegiatan Kelima dengan kriteria **”BAIK” (106,08%)** dengan 1(SATU) indikator dengan kriteria **“SANGAT BAIK”**, 1(SATU) indikator dengan kriteria **“BAIK”**, 1(SATU)

indikator dengan kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN dan 1(SATU) dengan kriteria SANGAT KURANG” .

- d. Sasaran Kegiatan keenam dengan kriteria “**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**”(125,90%) yang terdiri dari 2(dua) indikator dengan kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”.
 - e. Sasaran Kegiatan ketujuh dengan kriteria “**BAIK**”(107,72%) yang terdiri dari 1 Indikator kriteria “BAIK”.
 - f. Sasaran Kegiatan kesepuluh dengan **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**”(152,63%) yang terdiri dari 1(SATU) indikator dengan kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”.
 - g. Sasaran Kegiatan kesebelas dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**”(137,51%) yang terdiri dari 1(SATU) indikator dengan kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”.
- 3) Pencapaian realisasi anggaran kegiatan di TW 2 sebesar 48,77% (Rp. 14.906.860.333) dari Rp.30.567.108.000 Anggaran Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang diwujudkan melalui 11 kegiatan dengan realisasi anggaran per kegiatan berkisar antara 14,28% sampai dengan 81,40%.

Langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target di Triwulan berikutnya, adalah sebagai berikut:

- a. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Balai Besar POM di Palembang serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
- d. Melakukan review target berdasarkan capaian kinerja pada TW 2 tahun 2022.
- e. Melakukan update data sarana produksi dan distribusi sebagai data dukung pengawasan sarana berbasis risiko untuk memperluas cakupan pengawasan serta potensi kejahatan obat dan makanan.
- f. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja BBPOM di Palembang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan.

- g. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Palembang.
- h. Berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;
- i. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- j. Meningkatkan inovasi layanan publik dalam rangka percepatan perizinan Obat dan Makanan.
- k. Meningkatkan internalisasi dan komitmen seluruh pegawai dalam penerapan Zona Integritas Menuju WBK WBBM di lingkungan BBPOM di Palembang.
- l. Meningkatkan sosialisasi *website* BPOM, HALO BPOM dan media sosial lainnya (IG, Twitter, Facebook);
- m. Melakukan pengujian terhadap parameter uji yg belum pernah dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan Standar Ruang Lingkup Balai



HIGHLIGHT TW II APRIL sd JUNI TAHUN 2022

1. Sosialisasi Keamanan Pangan di Kantor Walikota Palembang

Untuk mengintervensi masyarakat agar memahami konsep keamanan pangan, memperhatikan cara pengolahan pangan yang baik, pencegahan kontaminasi pangan dan sebagai upaya perbaikan gizi masyarakat di bulan Ramadhan, Pemerintah Kota Palembang mengadakan Sosialisasi Keamanan Pangan yang bertempat di Aula Parameswara kantor Walikota Palembang pada tanggal 4 April 2022.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yaitu Kepala Balai Besar POM di Palembang Bapak Drs. Zulkifli, Apt. Untuk tindak lanjut dari sosialisasi ini adalah agar para lintas sector dapat mensinergikan kegiatan pengawasannya bersama agar keamanan pangan di bulan Ramadhan tetap terjamin.



2. Audiensi Dengan Kapolda Propinsi Sumatera Selatan Tentang Kejahatan Obat dan Makanan

Dalam Rangka Penguatan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Rabu (6 April 2022) Kepala BBPOM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt. didampingi oleh Koordinator Kelompok Substansi Penindakan serta PPNS BBPOM di Palembang melakukan kegiatan Audiensi langsung dengan Kapolda Sumatera



Selatan, Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto, M.H. Kegiatan bertempat di Gedung Presisi Polda Sumatera Selatan.

3. **Bimtek Provider Uji Profisiensi/ Uji Banding/ Uji Kolaborasi Laboratorium Mikrobiologi di BBPOM di Palembang**

Balai Besar POM di Palembang tengah mempersiapkan laboratoriumnya agar mampu menjadi Provider Uji Profisiensi/ uji Banding/ Uji Kolaborasi Laboratorium Mikrobiologi, maka dari itu dilaksanakan kegiatan Bimtek dari PPPOMN dengan narasumbernya Ibu Henny Setiawati, S.Si., Apt dengan tema Bimtek Provider Uji Profisiensi/ Uji Banding/ Uji Kolaborasi Laboratorium Mikrobiologi di BBPOM di Palembang. Acara secara resmi dibuka oleh Bapak Drs. Zulkifli, Apt sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Palembang.

Kegiatan Bimtek berlangsung 2 hari secara daring dari PPPOMN dan luring di Aula BBPOM di Palembang, dimulai dari tanggal 5 s/d 6 April 2022. Peserta yang mengikuti berjumlah 8 Orang, antara lain 5 penguji dari Laboratorium Mikrobiologi dan 3 orang lainnya merupakan Koordinator Pengujian, Subkoordinator Substansi Pengujian kimia serta Subkoordinator Substansi Pengujian Mikrobiologi. Bimtek Hari pertama dilaksanakan pemaparan teori Provider Uji Profisiensi/ Uji Banding/ Uji Kolaborasi dan teori Analisis Data, dilanjutkan hari kedua dengan praktikum yang dilaksanakan oleh peserta pada hari kedua. Dengan dilaksanakannya kegiatan Bimtek ini, kedepannya BBPOM di Palembang diharapkan dapat menjadi Provider Uji Profisiensi/ Uji Banding/ Uji Kolaborasi Laboratorium Mikrobiologi.



4. **Intensifikasi Pengawasan Pangan Jajanan Buka Puasa (Ta'jil) di Kota Palembang**

Dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi masyarakat Sumatera Selatan selama bulan Ramadhan, Balai Besar POM di Palembang kembali melakukan intensifikasi pengawasan keamanan pada pangan jajanan berbuka atau ta'jil. Intensifikasi pengawasan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 6 April 2022 ini bertempat di Pasar Lemabang, Pasar PHDM Pusri, Pasar Perumnas dan Pasar Sekip.

Tim melakukan sampling sebanyak 54 (lima puluh empat) ta'jil yang jenisnya beragam, yaitu pempek tahu, rujak mie, kolang kaling, rumput laut, dll. Seluruh sampel langsung diidentifikasi oleh petugas pengujian dari Balai Besar POM di Palembang di dalam mobil laboratorium keliling. Identifikasi sampel menggunakan metode pengujian rapid tes kit dengan parameter uji antara lain identifikasi boraks, Formalin, Rhodamin B dan Methanyl Yellow. Dan dari hasil pengujian, seluruh sampel dinyatakan aman dan bebas dari keempat bahan berbahaya tersebut.



5. **Audiensi dengan walikota Prabumulih dalam pengawasan keamanan pangan dalam rangka bulan ramadhan**

BBPOM Palembang menggelar rapat koordinasi dalam pengawasan keamanan pangan pada tanggal 08 Maret 2022 di Kantor Walikota Prabumulih. Rapat dipimpin langsung oleh Walikota Prabumulih, Bapak Ir. H. Ridho Yahya, MM dan dihadiri oleh Kepala Balai Besar POM Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt beserta timnya serta OPD Pemko Prabumulih (Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dll), dan pelaku usaha. Dalam rapat tersebut, Bapak Walikota menyampaikan bahwa temuan pangan mengandung bahan berbahaya harus ditangani secara terpadu, perlu dilakukan upaya memutus mata rantai suplai serta pemberian sanksi tegas bagi produsen nakal. BBPOM di Palembang akan lebih intensif lagi turun dalam mengawal mutu dan keamanan pangan. Kepala BBPOM di Palembang menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pemetaan termasuk wilayah yang rawan kasus penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Apalagi jelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri berpotensi meningkatnya kebutuhan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal untuk menjual pangan yang tidak memenuhi syarat yang beresiko terhadap kesehatan. Tentunya untuk mewujudkan pangan yang aman dan bermutu dibutuhkan sinergitas dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan.



6. **Pembukaan Bazar Sembako dalam rangka Ramadhan 1443 H oleh Walikota Palembang**

Menyambut bulan suci Ramadhan 1443 H, Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan menggelar bazar Ramadhan di halaman kantor Camat Ilir Barat II pada tanggal 4 April 2022. Bazar ini akan dilaksanakan di 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kota Palembang. Acara ini dibuka oleh Walikota Palembang Bapak H. Harnojojo.

Terdapat sekitar 45 stand yang mengisi bazar Ramadhan ini. Mereka menjual mayoritas kebutuhan sembako dengan harga terjangkau. Balai Besar POM di Palembang selaku lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan peredaran produk khususnya pangan ikut memantau Bazar Ramadhan ini. Turut hadir pada acara ini Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt didampingi beberapa lintas sector terkait seperti dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Perumda Pasar dan seluruh camat se-Kota Palembang.

Petugas Balai Besar POM juga melakukan pengujian sampel yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dan setelah dilakukan pengujian, semua sampel dinyatakan bebas dari bahan berbahaya. Petugas juga menghimbau para pedagang untuk selalu menjual produk yang baik dan memperjuangkan produknya sesuai dengan tata cara penyimpanan meski produknya dijual dengan harga murah. Hal ini terlihat dari banyaknya para pedagang *frozen food* yang meletakkan dagangan mereka pada suhu ruang yang cenderung panas. Masyarakat juga tak luput dihimbau agar selalu Cek KLIK, Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar dan Cek Kadaluarsa.



7. Gelar Perkara Bersama Korwas PPNS Polda Sumatera Selatan terkait Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka mempercepat penyusunan berkas perkara tindak pidana kejahatan di bidang obat dan makanan, pada hari Kamis (7 April 2022) Koordinator substansi penindakan BBPOM di Palembang beserta PPNS BBPOM di Palembang melakukan kegiatan gelar perkara bersama Kasie Korwas PPNS Polda Sumatera Selatan, Koptol Janari Soleh, SH., Kanit Wassidik, Asep Sumpena, SH., MH., M.Si dan peserta gelar lainnya. Kegiatan bertempat di Gedung Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan tersebut penyidik BBPOM di Palembang menyampaikan paparan terkait perkara yang sedang ditangani beserta kendala yang dihadapi saat dilakukan penyidikan serta berdiskusi terkait alat bukti yang telah dikumpulkan.

Kasie Korwas PPNS dan Kanit Wassidik Polda Sumatera Selatan menyambut baik kegiatan gelar perkara ini. Para peserta gelar menyampaikan masukan dan arahan kepada penyidik agar alat bukti yang dikumpulkan menjadi lengkap sebelum diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kasie Korwas PPNS dan Kanit Wassidik Polda Sumatera Selatan dalam kesempatan ini juga menyampaikan komitmen dan siap untuk selalu mendukung penyidik Balai Besar POM di Palembang dalam menyusun berkas perkara tindak pidana kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

Diharapkan dengan diadakannya kegiatan gelar perkara ini, dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara BBPOM di Palembang dan Polda Sumatera Selatan dalam menangani hambatan dan kendala dalam penyusunan berkas perkara.



8. Koordinasi Bersama Bea Cukai

Dalam rangka memperkuat pengawasan di kawasan pabean, BBPOM di Palembang melakukan koordinasi bersama Bea Cukai Palembang, pada hari Selasa 19 April 2022. Kepala Balai Besar POM di Palembang-Drs. Zulkifli, Apt. ditemani Koordinator substansi penindakan, Koordinator substansi pemeriksaan, Koordinator substansi informasi dan komunikasi beserta tim disambut baik oleh Kepala Kantor Bea Cukai Palembang-Abdul Harris dan tim. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar POM di Palembang menguraikan wewenang pengawasan dari masing-masing instansi serta mengharapkan koordinasi dari kedua belah pihak lebih terjalin untuk mengawasi masuknya obat dan makanan ke wilayah Sumatera Selatan terutama dari luar negeri.

Antusias dari Bea Cukai Palembang maupun dari BBPOM di Palembang pada pertemuan ini terlihat pada diskusi yang hangat dan saling berbagi pengalaman, baik hasil dari pengawasan Bea Cukai Palembang di kawasan pabean maupun pengawasan dari BBPOM di Palembang.

Kepala Kantor Bea Cukai Palembang dalam kesempatan ini juga menyampaikan komitmen dan siap untuk selalu membantu dalam mengawasi pemasukan produk obat dan makanan terutama dari luar negeri.

Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini, dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara BBPOM di Palembang dan Bea Cukai Palembang dalam mengawasi obat dan makanan



9. Sharing and Charity di Kambang Iwak Besak Palembang

Pada hari Jum'at (22/4) BBPOM di Palembang telah melaksanakan salah satu program dari Tim Agent of Change yaitu *Sharing and Charity* (SHAR'I). Kegiatan ini dilaksanakan di sekitar Taman Kambang Iwak Besak dengan melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada masyarakat yang sedang ngabuburit, sekaligus membagikan makanan pembuka untuk buka puasa.

Semoga dengan dilakukannya kegiatan ini, masyarakat semakin paham tentang informasi obat dan makanan aman, serta merasa lebih dekat dan akrab dengan BBPOM di Palembang.



10. Halal Bihalal Idul Fitri 1443 H

Dalam rangka upaya penguatan mental, spiritual dan ikatan silaturahmi pegawai di lingkungan Balai Besar POM di Palembang dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1443 H, Balai Besar POM di Palembang mengadakan acara halal bihalal. Acara dilaksanakan pada hari Senin, 9 Mei 2022 pukul 10:00 WIB dengan dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, diikuti oleh seluruh pegawai Balai Besar POM di Palembang baik secara luring di aula BBPOM di Palembang dan daring melalui zoom.

Halal bihalal berlangsung secara santai dimana diawali dengan pengumuman *Best Employee of the Month* untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2022. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt sekaligus memaparkan capaian kinerja dan prestasi BBPOM di Palembang pada TW I 2022. Acara ditutup dengan pembacaan do'a, kemudian para pegawai saling mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 H dan saling bermaaf-maafan secara langsung dan virtual serta tidak lupa para pegawai saling memberi semangat kepada sesama pegawai untuk dapat bekerja lebih giat.

Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt menyampaikan beberapa arahan seperti mengawal anggaran tahunan untuk dapat lebih baik digunakan dan memberikan dampak bagi masyarakat Sumatera Selatan. Selain itu, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya dengan akademisi teknologi pangan Universitas Sriwijaya terkait dengan permasalahan pangan di Sumatera Selatan. Pada akhir arahan, Kepala Balai Besar POM di Palembang tidak lupa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin, mengingat kembali pada tema apel nasional Badan POM yaitu "Jalin silaturahmi untuk memperkuat kolaborasi peningkatan kinerja BPOM".



11. KOLABORASI DOKKES POLDA DAN PENEGAK HUKUM BBPOM DI PALEMBANG

BBPOM di Palembang pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2022 telah menerima kunjungan dari dari Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian Daerah Prov. SUMSEL. Dokkes POLDA Sumatera Selatan adalah salah unit di Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas dalam melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum pada poliklinik serta pelayanan kesehatan kesamaptaan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, kepala Dokkes POLDA Sumsel Kombes. Pol. dr. Syamsul Bahar, M.Kes. memaparkan salah satu inovasi berupa program aplikasi terkait identifikasi individu dari setiap tahanan (tersangka) yang akan digunakan sebagai data base rekam medik di seluruh instansi penegak hukum sebelum dilakukan penahanan terhadap tersangka. Data tersebut dapat digunakan oleh seluruh penegak hukum dari awal proses penahanan sampai ditetapkan putusan terhadap tersangka oleh pengadilan.

Kepala BBPOM di Palembang Drs. Zulkifli, Apt. sangat mengapresiasi dan mendukung terhadap inovasi yang sedang dikembangkan oleh Dokkes POLDA Sumsel. Hal ini sangat membantu peran dan fungsi BPOM dalam melakukan penindakan dan pencegahan terhadap kejahatan di ranah obat dan makanan, serta dapat mempermudah tim penegak hukum dalam menangkap tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).



12. Inspeksi Mendadak bersama Wakil Walikota Palembang di Padar 10 Ulu Palembang

Dalam rangka melindungi masyarakat Kota Palembang dari peredaran produk makanan yang mengandung Bahan Berbahaya, maka pada 17 Mei 2022 Balai Besar POM di Palembang bersama Wakil Walikota Palembang Ibu Fitriani Agustinda, SH dan lintas sektor terkait kembali mendatangi salah satu pasar tradisional di Kota Palembang yaitu Pasar 10 Ulu. Kegiatan inspeksi diadakan pada Pasar 10 Ulu Palembang itu, Tim Balai Besar POM di Palembang melakukan Tes uji cepat pada 34 (tiga puluh empat) sampel yang berpotensi mengandung Bahan Berbahaya, seperti tahu, mie kuning, kerupuk dan terasi,

dan dari pengujian tersebut terdapat 6 (enam) sampel yang positif mengandung Rhodamin B pada sampel terasi. Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt. bersama Wakil Wali Kota Palembang menghimbau kepada para pedagang untuk tidak lagi menjual bahan makanan berbahaya tersebut, Wakil Wali Kota Palembang menyampaikan kepada para pedagang dan masyarakat untuk memanfaatkan Pojok Pasar yang berfungsi untuk memeriksa aman atau tidaknya bahan makanan yang akan dijual atau yang dibeli.



13. Pembinaan UMKM (Asistensi Pemenuhan Persyaratan Perijinan bagi UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik)

Dalam rangka dukungan penuh terhadap pelaku usaha UMKM, hari ini Rabu 18 Mei 2022 Balai Besar POM di Palembang menyelenggarakan kegiatan Asistensi Pemenuhan Persyaratan Perijinan bagi UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik. Acara dilaksanakan secara hybrid, sebanyak 8 orang hadir melalui zoom meeting dan 32 peserta mengikuti kegiatan secara luring di Aula BBPOM di Palembang. Arahan Kepala Balai Besar POM di Palembang saat membuka acara agar ada komitmen dari pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan pemenuhan perijinan di Badan POM dan pelayanan publik BBPOM di Palembang siap mendampingi pelaku usaha serta tidak pernah menyulitkan proses perijinan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk berdiskusi dan memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses pendaftaran produk ke Badan POM. Setelah dilakukan asistensi diharapkan pelaku usaha dapat lebih mengerti tahapan-tahapan proses perijinan. Pada akhir arahan Kabalai juga menyampaikan bahwa legalitas produk yang ditandai dengan adanya izin edar pada produk merupakan pendeskripsian bahwa produk tersebut telah aman dan terjamin mutunya untuk digunakan ataupun dikonsumsi oleh masyarakat.



14. Gelar Perkara Bersama Polda Sumatera Selatan Terkait Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka mempercepat penyusunan berkas perkara tindak pidana kejahatan di bidang obat dan makanan, pada hari Jumat (20 Mei 2022) Kepala Balai Besar POM di Palembang, Koordinator substansi penindakan BBPOM di Palembang beserta PPNS BBPOM di Palembang melakukan kegiatan gelar perkara bersama Kabag Wassidik Ditresnarkoba-AKBP Imran Gunawan, SH., Kanit Wassidik-Asep Sumpena, SH., MH., M.Si dan peserta gelar lainnya. Kegiatan ini bertempat di kantor BBPOM di Palembang. Dalam kesempatan tersebut, penyidik BBPOM di Palembang menyampaikan paparan terkait perkara yang sedang ditangani beserta kendala yang dihadapi saat dilakukan penyidikan serta berdiskusi terkait alat bukti yang telah dikumpulkan sehingga dapat disimpulkan siapa yang menjadi tersangka. Kabag Wassidik Ditresnarkoba dan Kanit Wassidik Polda Sumatera Selatan menyambut baik kegiatan gelar perkara ini. Para peserta gelar menyampaikan masukan dan arahan kepada penyidik agar alat bukti yang dikumpulkan menjadi lengkap sebelum diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Akhir dari kegiatan, didapatkan keputusan gelar dari seluruh peserta bahwa pemilik pabrik yang menjadi tersangka dalam perkara pangan mengandung bahan berbahaya (formalin) ini. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan gelar perkara ini, dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara BBPOM di Palembang dan Polda Sumatera Selatan dalam menangani hambatan dan kendala dalam penyusunan berkas perkara.



15. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka Manajemen Risiko, verifikasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) terkait Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada unit kerja serta Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/ IEC 17025:2015, ISO 17034:2016 khusus untuk laboratorium baku pembanding PPPOMN sebagai Produsen Bahan Acuan, dan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018 di Lingkungan Badan POM, maka perlu dilaksanakan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu Tahun 2022.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang melaksanakan Audit Internal pada tanggal 24-25 Mei 2022. Audit ini bertujuan untuk meninjau konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu yang telah dilaksanakan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Tim Auditor merupakan gabungan dari Auditor Internal Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Auditor Internal Balai Besar POM di Palembang dengan *Lead Auditor* Ummi Rokuyah, S.Farm., M.Si., Apt.

Hari Pertama dilaksanakan *entry meeting* yang dibuka secara resmi oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Dalam sambutannya, Arofah Nurfahmi menyampaikan dukungan untuk pelaksanaan Audit Internal sistem manajemen mutu BBPOM di Palembang. Selanjutnya dilakukan audit terhadap Tim Penjamin Mutu dan masing-masing Substansi oleh tim auditor. Agenda hari kedua diakhiri dengan *exit meeting*, *Lead Auditor* menyampaikan hasil audit, temuan beserta kategorinya. Hasil audit internal ditemukan terdapat 5 Aspek Positif/ AP, 19 Ketidaksesuaian/NC (Non-Conformity) dan 4 saran peningkatan (AFI). Selanjutnya, akan dilakukan perbaikan terhadap temuan-temuan dalam rangka meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Balai Besar POM di Palembang.



16. Bersama Pelaku Usaha Ritel Menggapai Keamanan Pangan

BBPOM di Palembang telah mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha sarana peredaran pangan olahan di kota Palembang. Pertemuan ini dilandaskan dengan telah diterbitkannya Peraturan Badan POM RI No. 21 tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan di Sarana Peredaran. Acara tersebut dilaksanakan secara *daring* dan dihadiri oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) kota Palembang, perwakilan dari Dinas Perdagangan kota Palembang, Dinas Koperasi dan UMKM kota Palembang, serta pelaku usaha yang bergerak di bidang peredaran pangan kota Palembang. Dalam sambutannya, Kepala BBPOM di Palembang Bapak Drs. Zulkifli, Apt. menyampaikan bahwa tugas Badan POM RI dalam penyelenggaraan

tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan POM sebagai lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan keamanan pangan di Indonesia berkomitmen meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan keamanan pangan bekerja sama dengan semua *stakeholder*, utamanya pelaku usaha pangan untuk mengawal keamanan pangan yaitu meliputi keamanan pangan sejak budidaya, pengolahan dan pemrosesan, distribusi, hingga pangan siap dikonsumsi (*from farm to table*). Hal tersebut merupakan langkah nyata untuk mewujudkan keamanan pangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya mendukung tidak hanya aspek kesehatan masyarakat secara khusus tetapi juga kualitas dan ketahanan suatu bangsa. Beliau juga menyampaikan bahwa pengawasan produk obat dan makanan dilakukan dalam tahap *pre market* dan *post market*. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan yang dapat berisiko terhadap kesehatan, sehingga produk tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Dalam lingkup tersebut, pihak sarana ritel berperan aktif dalam melakukan pengawasan *post market*, yaitu harus dapat memastikan bahwa produk obat dan makanan yang diedarkan oleh sarana ritel harus terdaftar di Badan POM, sedangkan pangan industri rumah tangga harus terdaftar di Dinas Kesehatan.

Diharapkan dengan diadakannya pertemuan dan *sharing knowledge* ini, dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara BBPOM di Palembang dan pelaku usaha ritel dalam menjamin keamanan pangan.



17. Pemilihan Duta Kosmetik Aman Balai Besar POM di Palembang Tahun 2022

Kegiatan pemilihan duta kosmetik aman Balai Besar POM di Palembang Tahun 2022 pada tanggal 30 Mei 2022 dihadiri oleh 30 orang peserta dari berbagai Universitas di Palembang. Kegiatan ini diawali dengan Kata Sambutan sekaligus Pembukaan dari Kepala

Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt. Kemudian dilanjutkan dengan paparan materi I dari Koordinator Substansi Infokom yaitu Gustini, SKM tentang Cara Cerdas Memilih Kosmetik Aman. Para peserta sangat antusias mengikuti paparan tersebut, diskusi pun berjalan lancar. Para peserta juga mengikuti Touring Lab didampingi oleh Koordinator Pengujian yaitu Sri Arini S.Farm.,Apt.M.Si sebelum paparan materi kedua dimulai yaitu tentang Profil Badan POM yang disampaikan oleh Drs. Zulkifli,Apt. Kemudian materi terakhir dengan Narasumber tamu yaitu tentang Public Speaking yang disampaikan oleh Awan Kurniawan SP.,MM. Peserta kembali melakukan sesi tanya jawab dengan semangat. Peserta mengikuti post test dan diakhiri dengan Public Speaking Test dengan 3 juri yang menilai yaitu Drs. Zulkifli, Apt, Gustini dan Awan Kurniawan. Setelah dilakukan penilaian dari keseluruhan test yang dilewati para peserta, maka diputuskan tiga Duta Terbaik Kosmetik Aman BBPOM di Palembang tahun 2022 yaitu Fitri Maharani dari Universitas Sriwijaya, Lekat Okta Tri Puspita dari Poltekkes Kemenkes dan Shadrina Hazira dari Universitas Kader Bangsa.



18. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan STIK Bina Husada

Pada hari Selasa 31 Mei 2022 Balai Besar POM di Palembang melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada, Palembang. Acara penandatanganan ini dilaksanakan di Kantor Balai Besar POM di Palembang. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan pedoman bagi Badan POM dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada untuk melakukan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, khasiat/manfaat, dan gizi obat dan makanan. Setelah acara penandatanganan nota kesepahaman dilakukan, rombongan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada juga melakukan *tour lab* ke laboratorium kimia dan mikrobiologi yang ada di BBPOM di Palembang. Dimana mereka tampak antusias dengan cukup lengkapnya alat – alat laboratorium yang ada di Balai Besar POM di Palembang. Pada kesempatan ini Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada juga meminta agar Balai Besar POM di Palembang bisa mengikutsertakan mereka dalam kegiatan – kegiatan KIE yang dilakukan. Semoga dengan adanya

penandatanganan Nota Kesepahaman bisa meningkatkan efektifitas pengawasan obat



dan makanan.

19. ADVOKASI KEGIATAN TERPADU (GKPD, PASAR AMAN, PJAS) BERSAMA WAKIL WALIKOTA PALEMBANG

Tim Balai Besar POM di Palembang melakukan Advokasi Kegiatan Terpadu (GKPD, Pasar Aman dan PJAS) bertempat di Kantor Walikota Kota Palembang. Advokasi tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Palembang, Fitriandi Agustinda, S.H serta dihadiri oleh berbagai lintas sektor terkait.

Fitriandi Agustinda, S.H membuka langsung kegiatan Advokasi tersebut, beliau sangat berantusias dengan adanya kegiatan ini dan berharap pada kegiatan Advokasi ini dapat diikuti dengan baik oleh semua lintas sektor terkait. Lalu acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt. Beliau juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Pemerintah daerah dalam mendukung program kerja dari BPOM.

Setelah pemaparan dan diskusi, diserahkan paket test kit kepada Kelurahan Talang Semut dan Kelurahan 9 Ilir yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam melakukan pengawasan makanan kemudian diakhir acara dilakukan foto bersama dengan Wakil Walikota Palembang dan lintas sektor lainnya.



20. BBPOM di Palembang bersama Kedeputian IV dan Komisi IX DPR RI Kembali Edukasi Masyarakat di Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Ilir

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan Obat dan Makanan yang dikonsumsi. Kedeputian IV dan BBPOM di Palembang menggandeng Anggota DPR RI Komisi IX, Irma Suryani, S.E untuk menyelenggarakan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Kota Prabumulih (4/6) dan Kabupaten Ogan Ilir (5/6) Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali pengetahuan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan sendiri untuk mengambil keputusan membeli dan menggunakan suatu produk sehingga masyarakat dapat melindungi diri sendiri dari penggunaan Obat dan Makanan yang dapat beresiko terhadap kesehatannya. Kegiatan ini dihadiri oleh 500 peserta dari masyarakat sekitar. Kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Acara KIE Obat dan Makanan ini dibuka dengan sambutan dari Lurah Sungai Medang Kota Prabumulih, Bapak Dedi Arman, S. Kep., M.Si dan Sambutan oleh Bapak Firmansyah Taswin, S.E., M.Si selaku Kepala Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt tentang Bagaimana menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih Obat dan Makanan yang Aman dan Materi dari Koordinator Kedeputian IV, Sahat Sagala, S.H yang menyampaikan Tusi Badan POM serta memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan obat dikalangan anak muda. Selanjutnya ibu Irma Suryani, S.E menegaskan atas paparan dari pemateri sebelumnya. Kegiatan ini diikuti dengan sangat antusias oleh masyarakat terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan. Materi diberikan secara menarik dengan menggunakan contoh produk obat tradisional dan kosmetik yang ilegal/tanpa izin edar serta mengandung Bahan Berbahaya, dimana dari hasil Pengawasan Balai Besar POM di Palembang masih ditemukan Obat Tradisional/Jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) seperti Jamu Pegal Linu yang berupa cairan dan jamu kuat begitu juga pada Kosmetik Pemutih yang mengandung Merkuri, serta Makanan yang mengandung Bahan Berbahaya. Pada akhir acara Ibu Irma Suryani, SE selaku anggota Komisi IX DPR RI menyampaikan kepada konstituennya bahwa Badan POM merupakan mitra kerja Komisi IX DPR RI dalam pembangunan kesehatan masyarakat khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Anggota DPR RI menghimbau masyarakat Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Ilir untuk memperhatikan produk yang dibeli dengan Cek KLIK (cek Kemasan; cek Label; cek Izin edar dan cek Kadaluarsa).



21. Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan Fungsional di Lingkungan BBPOM Palembang

Pada tanggal 6 Juni 2022, Kepala Badan POM melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah PNS secara *hybrid* terhadap 313 orang PNS dari seluruh UPT di Indonesia. Sebanyak 2 orang PNS yang terdiri dari 1 orang PFM Ahli Pertama dan 1 orang Pranata Keuangan APBN Terampil di lingkungan BBPOM di Palembang turut serta dalam acara tersebut secara daring. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh kedua PNS yang disumpah oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, disaksikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Dalam sambutannya Kepala Badan POM, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP menyampaikan bahwa sumpah yang diikrarkan bukan hanya merupakan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan terhadap organisasi, tetapi juga kesanggupan untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dihayati dalam diri dan jiwa masing - masing. Selain itu, Beliau juga menyampaikan kepada para PNS yang dilantik untuk selalu mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan individu. Pengambilan sumpah merupakan pengakuan / legalitas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana dengan legalitas ini, diharapkan dapat menjadi pegawai yang unggul, handal dan teladan bagi masyarakat. Sebagai Aparatur Sipil Negara dan abdi masyarakat, harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, berkemampuan melaksanakan tugas kedinasan secara profesional dan bertanggungjawab, seperti memiliki jiwa yang tulus bekerja, berjiwa altruistik untuk memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepala Balai Besar POM di Palembang mengucapkan selamat kepada PNS yang telah dilantik dan diambil sumpahnya, jadikanlah sumpah ini sebagai motivasi untuk mengabdikan kepada bangsa, negara dan masyarakat agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih menuju birokrasi kelas dunia.



22. Focus Group Discussion (FGD) tentang “Sistem Rekam Medik Kesehatan Tahanan Terpadu” bersama Polda Sumatera Selatan

Dalam rangka meningkatkan kerja sama dalam penanganan kejahatan di bidang obat dan makanan antar instansi penegak hukum, Kepala BBPOM di Palembang bersama Koordinator Substansi Penindakan menghadiri undangan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Sistem Rekam Medik Kesehatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia” di Polda Sumsel pada hari Rabu, 08 Juni 2022.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh instansi pemangku kepentingan lainnya, antara lain Kanwil Kemenkumham Sumsel, Kejati Sumsel, BNNP Sumsel serta Dinas Perikanan dan Dinas Kehutanan Sumsel. Demi mencapai tujuan bersama terwujudnya pusat data informasi kesehatan tahanan yang terintegrasi antar instansi penegak hukum, para stake holder yang hadir sepakat akan menandatangani kesepakatan bersama antara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan para pemangku kepentingan.

Diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat mewujudkan sistem pendataan informasi terpadu terkait penanganan, penyediaan data kesehatan, dan jaminan kesehatan tahanan serta peningkatan kemampuan digital bagi tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan percepatan proses penyidikan antar instansi penegak hukum.



23. **Kegiatan Pembinaan UMKM 09 Juni 2022** BPOM Kedepankan Pembinaan UMKM Sesuai dengan nawacita Jokowi yang diterjemahkan dalam UU Cipta Kerja terbaru, terdapat kemudahan-kemudahan bagi pelaku usaha UMKM. Dengan dibukanya keran berusaha seluas luasnya oleh Presiden Jokowi menjadi satu bukti kuat bahwa pemerintah hadir sebagai bentuk keberpihakan terhadap UMKM tidak terkecuali UMKM Pangan Olahan. Balai Besar POM di Palembang baru saja memulai Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik pada Selasa, 07 Juni 2022 bertempat di kantor BBPOM di Palembang sebagai salah satu rangkaian dalam tahapan Pendampingan UMKM. Kegiatan yang akan berlangsung selama 3 hari kedepan dibuka langsung oleh Drs. Zulkifli, Apt., selaku Kepala BBPOM di Palembang. Dalam sambutan yang diberikan tergambar nyata akan komitmen pendampingan yang beliau serukan kepada pelaku usaha UMKM Pangan Olahan yang hadir pada acara tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan secara *hybrid* kombinasi pertemuan luring dan daring ini dihadiri oleh 25 Pelaku Usaha secara luring dan 45 Pelaku Usaha yang mengikuti acara secara daring. Menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang serta beberapa orang narasumber internal BBPOM Palembang. Acara ini diharapkan mampu memberikan muatan pengetahuan kepada pelaku usaha UMKM Pangan Olahan terkait bagaimana seharusnya pangan diproduksi sehingga dihasilkan produk yang terjamin mutu dan keamanannya.



24. Bimbingan Teknis Patroli Siber Bersama Direktorat Siber Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dalam rangka optimalisasi kegiatan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber (Patroli Siber) di UPT Badan POM, pada hari Jumat (10 Juni 2022) Direktorat Siber Obat dan Makanan yang diwakilkan oleh Koordinator Pemantauan Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber, Dra. Nurjaya Bangsawan, Apt, M.Kes bersama tim melakukan kegiatan bimbingan teknis di kantor BBPOM di Palembang yang dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt dan diikuti oleh Substansi penindakan dan Substansi pemeriksaan BBPOM di Palembang.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar POM di Palembang memberikan arahan agar kegiatan ini bukan hanya sekedar transfer ilmu saja melainkan juga dapat memperkuat pengawasan dalam dunia maya/siber. Ibu Dra. Nurjaya Bangsawan, Apt, M.Kes dan tim menyampaikan paparan terkait aplikasi yang digunakan untuk melakukan patroli siber di dunia maya serta memberikan bimbingan kepada peserta bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut dan menyampaikan trik yang dapat digunakan untuk mencari pelanggaran tindak pidana di bidang obat dan makanan.



25. Audiensi Kepala Balai Besar POM di Palembang ke Kab. Pali

Rabu (15/6/2022) Kepala BBPOM di Palembang melakukan kunjungan dalam rangka audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali yang diterima oleh Sekretaris Daerah Kab. Pali Kartika Yanti,SH.,MH dan pimpinan OPD terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Drs.Zulkifli,Apt selaku Kepala BBPOM di Palembang memaparkan program-program BBPOM Palembang yang sudah dan telah dilaksanakan di Kabupaten Pali antara lain Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Sekolah dengan PJAS Aman,serta menyampaikan hasil Pengawasan BBPOM Palembang selama ini di Kabupaten Pali yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat batuk Komix. Pada hari ini dan besok BBPOM Palembang juga memberikan Bimtek Keamanan Pangan kepada IRTP,Pangan Siap Saji dalam rangka mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan,sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin edar P-IRT serta Sertifikat Higienis Sanitasi dari Dinas Kesehatan.



26. Pameran Kosmetik 17 Juni 2022

Balai Besar POM di Palembang hadir pada Pameran CosmicPalembang 2022 pada tanggal 16-17 Juni 2022. Pameran yang diadakan oleh PERDOSKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin) ini, bertemakan “The Future of Cosmetic Dermatology in Indonesia : Update, Innovation and Challenge. Pameran ini diadakan di Graha Spesialis Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang.

Tidak hanya Balai Besar POM di Palembang, beberapa perusahaan farmasi pun hadir pada Pameran Cosmic Palembang 2022. Pada kegiatan ini Balai Besar POM di Palembang juga mengajak 3 (tiga) orang Duta Kosmetik BBPOM di Palembang untuk ikut bersama-sama memberikan edukasi terkait cara memilih kosmetik yang aman. Pada kegiatan ini, Booth Balai Besar POM di Palembang juga mengenalkan tentang Aplikasi BPOM mobile dan Cek KLIK dalam memilih kosmetik yang aman. Antusias pengunjung sangat tinggi terlihat dengan selalu ramainya booth BBPOM di Palembang.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas para klinisi khususnya yang berkiprah dalam bidang dermatologi kosmetik untuk dapat terus mengembangkan keahlian ilmunya.



27. Pemasar Tulung Selapan 30 Juni 2022 BPOM HADIR UNTUK MEMBERIKAN SOLUSI

Dusun IV Sungai Kong Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI adalah salah satu dusun sentra terasi di Sumatera Selatan,dusun ini berada di pesisir Timur pulau Sumatera

yang berhadapan langsung dengan Pulau Bangka, bahkan terasi Bangka yang terkenal itu bersumber dari Dusun IV Sungai Kong. Dari hasil pengawasan Terasi di Sumatera Selatan terutama di Kota Palembang bersumber dari Kecamatan Tulung Selapan dari hasil pengujian terindikasi mengandung Rhodamin B. Dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat serta meningkatkan daya saing UMKM, tanggal 29 Juni-1 Juli Tim BBPOM di Palembang (Inspeksi dan Infokom) yang didampingi oleh Dinas Perdagangan OKI dan Petugas Puskesmas melakukan pengujian terasi didepan para pedagang yang ikut dalam sosialisasi yang didampingi pengurus Pasar Tulung Selapan, dari keterangan pedagang terasinya bersumber dari Dusun IV Sungai Kong. Pada tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya tim Balai Besar POM Palembang bersama tim Dinas Perdagangan Kab.OKI dan Puskesmas Tulung Selapan mengunjungi sentra produksi terasi udang di dusun IV Sungai Kong Tulung Selapan, dimana perjalanan dengan speedboat lebih kurang 6 jam menyisiri sungai dan pantai timur Sumatera yang ada buayanya untuk memberikan edukasi dan pembinaan tentang Bahan Tambahan Pangan yang aman. Pada kesempatan itu, dilakukan pengujian terhadap terasi dan zat pewarna yang digunakan oleh produsen dengan hasil positif mengandung Rhodamin B. Pengujian juga dilakukan terhadap sampel kerupuk, tahu dan kemplang yang semuanya negatif bahan berbahaya. Tim BBPOM juga membawa contoh pewarna yang diperbolehkan dalam pangan terutama pewarna merah, pewarna dibagikan ke para produsen terasi yang juga didampingi oleh Kepala Dusunnya dan masyarakat Dusun IV Sungai Kong berkomitmen tidak menggunakan pewarna merah yang digunakan selama ini, semoga kehadiran BBPOM dan Dinas Perdagangan OKI serta petugas Puskesmas dapat memberikan Solusi terhadap penggunaan Bahan Berbahaya pada Terasi Selama ini dan ini akan dipantau terus oleh Pemda dan BBPOM.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Balai Besar POM di Palembang berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan masuk dalam Klasifikasi UPT Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM dengan wilayah kerja; Kota Palembang, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam.

1.2. Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Palembang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Palembang disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Menurut Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subkelompok substansi program dan evaluasi; dan
- b. Subkelompok substansi umum.

Kelompok Jabatan Fungsional

Dilingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pengelompokan uraian fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas:

- a. Kelompok Substansi Pengujian, terdiri atas:

1. Subkelompok substansi pengujian kimia; dan
 2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi
- b. Kelompok Substansi Pemeriksaan, terdiri atas:
1. Subkelompok substansi inspeksi; dan
 2. Subkelompok substansi sertifikasi
- c. Kelompok substansi penindakan; dan
- d. Kelompok substansi informasi dan komunikasi.

1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palembang



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang

BBPOM di Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2020 dengan wilayah kerja adalah sebanyak 12 Kabupaten/ Kota terdiri dari 3 (tiga) kota dan 9 (sembilan) kabupaten yang meliputi 168 kecamatan dengan penyebaran sebagai berikut:

I. KOTA		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Palembang	Palembang	16

2.	Prabumulih	Prabumulih	6
3.	Pagaralam	Pagaralam	5
II. KABUPATEN		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Ogan Ilir	Indralaya	16
2.	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	18
3.	Ogan Komering Ulu	Baturaja	12
4.	OKU Selatan	Muara Dua	19
5.	OKU Timur	Martapura	20
6.	Muara Enim	Muara Enim	20
7.	Musi Banyu Asin	Sekayu	14
8.	Banyuasin	Pangkalan Balai	17
9.	Penukal Abab Pematang Ilir	Talang Ubi	5

Tabel 1. Catchment Area BBPOM di Palembang

Dalam mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Palembang sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2021, jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak 181 orang. Saat ini, SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang adalah 84 orang sehingga masih kekurangan 97 orang.

1.4 Isu Strategis : Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

BBPOM di Palembang mempunyai posisi yang strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Palembang sebagai UPT BPOM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat /konsumen,

perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Palembang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Palembang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, kerawanan lintas-batas antar provinsi, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Palembang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Palembang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

2. Pandemic COVID-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 213 negara dan wilayah lain di seluruh dunia. Data tanggal 18 April 2020, kasus pasien positif virus corona (Covid-19) di dunia mencapai 2.324.731 kasus, dengan 160.434 kasus kematian, dan 595.467 kasus berhasil sembuh. Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Di Indonesia, hingga tanggal 18 April 2020, jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona (Covid-19) sebanyak 6.248 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 535 meninggal dunia dan 631 orang dinyatakan telah sembuh dari Covid-19. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih

terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19. Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

Balai Besar POM di Palembang melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode work from home (WFH). Pelaksanaan pelayanan publik dilakukan melalui online dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan menggunakan sistem piket. Selain itu Balai POM di Palembang mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung dengan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling maupun secara online; melakukan pembuatan hand sanitizer dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai, tenaga kesehatan, instansi yang membutuhkan dan masyarakat secara umum; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari); dan berkoordinasi dengan Pemda (Gubernur, Dinas Kesehatan dan Labkesda Provinsi Sumatera Selatan) dalam pengembangan laboratorium pengujian Covid-19 ataupun sebagai Anggota Satuan Tugas Pokja Komunikasi, Edukasi dan Informasi.

3. Adanya perjanjian-perjanjian internasional

Khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, ASEAN-China *FTA*, ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, ASEAN-Korea *Free Trade Agreement (AKFTA)*, ASEAN-India *Free Trade Agreement (AIFTA)* dan ASEAN-Australia-

New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

4. Adanya jejaring kerja yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang

Diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah dan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Daerah. Selain itu, BPOM juga berperan aktif dalam dalam jejaring kerja di daerah Sumatera Selatan guna mengawal pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta peningkatan daya saing produk. Tantangan yang dihadapi BPOM terkait jejaring kerjasama ini diantaranya (i) *Kerjasama yang terjalin dengan stakeholder dan pemangku kepentingan* masih belum optimal, (ii) Koordinasi terkait pengawasan keamanan obat dan makanan masih belum optimal, (iii) Tindak lanjut dan Rekomendasi Tindak lanjut pemeriksaan di *Competent Contact Point (CCP)* belum cepat dan belum optimal, dan (iv) Sistem *traceability* di rantai suplai pangan masih lemah.

Pada tahun 2019 Balai Besar POM di Palembang telah melakukan rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Satuan Karya Badan POM dengan Kwarcab Pramuka se-Sumatera Selatan. Kegiatan ini diharapkan mampu membuka jalan untuk pembentukan SAKA BPOM sehingga bisa memberdayakan potensi gerakan pramuka dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Selain itu telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan Bersama Tokoh Masyarakat, Kunjungan Spesifik Anggota DPR RI Komisi IX di BBPOM Palembang, kegiatan advokasi ke Kabupaten Kota di wilayah kerja BBPOM di Palembang.

5. Berlakunya program *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan :

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

Tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

6. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Merupakan tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

7. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Balai Besar POM di Palembang sebagai unit pelaksana teknis BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,

Dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

11. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM.

Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan adanya penguatan kelembagaan BPOM ini Balai Besar POM di Palembang sebagai UPT BPOM akan merasakan dampak terutama dalam hal menjalin kerjasama yang bersinergi dengan pemangku kepentingan serta dalam hal kewibawaan di lingkungan pemerintah daerah.

12. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

13. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans

14. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM

Khusus untuk BBPOM di Palembang untuk industri makanan merupakan industri yang cukup berkembang dengan pesat, dimana dahulunya sarana produksi MD masih dibawah 50 sarana saat ini sudah mencapai lebih dari 50 sarana yaitu sebanyak 59 sarana. Untuk sarana PIRT berjumlah sekitar 2.807 sarana.

15. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2010 -2018 adalah 1,41 persen, tahun 2010-2019 adalah 1,42% dan tahun 2010-2020 adalah 1,25%.

16. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online, menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

17. Adanya perkembangan teknologi informasi, dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Palembang untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Palembang digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu

pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai Besar POM di Palembang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Palembang telah mengacu pada Renstra BPOM tahun 2020 – 2024 yaitu terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai/Balai Besar POM. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Palembang, sebagai berikut :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR POM DI PALEMBANG:

Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang berdasarkan Revisi Renstra BPOM tahun 2021-2024, terdiri dari 29 indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	<p>Persentase obat yang memenuhi syarat</p> <p>Persentase makanan yang memenuhi syarat</p> <p>Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat</p>
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	<p>Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang</p>
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	<p>Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <p>Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p>

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup BBPOM di Palembang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang
		Nilai AKIP BBPOM di Palembang
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palembang
10	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan	Persentase pemenuhan laboratorium

	data dan informasi pengawasan obat dan makanan	pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal.
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2021-2024

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Palembang tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Palembang merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **Pertama**, penilaian (*pre-market evaluation*) dengan cara melakukan sertifikasi sarana sebelum produk diajukan izin edarnya untuk mendapatkan rekomendasi. **Ke-dua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. **Ke-tiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-empat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir

dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator sasaran kegiatan ini pada Balai Besar POM di Palembang adalah sebagai berikut:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 92,5% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 91% di tahun 2024
- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang, dengan target sebesar 97% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang, dengan target sebesar 85% di tahun 2024
- Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 94% di tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BBPOM di Palembang yaitu “Meningkatnya kualitas Obat dan Makanan”.

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman

sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
Contoh : $\% B_3 = \frac{\text{Total pembilang } (B_1+B_2+B_3)}{\text{Total penyebut } (B_1+B_2+B_3)} \times 100\%$
- d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji

- f. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label

- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
 - f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.
 - g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
 - h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS} \times 100\%}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}}$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
Contoh : $\% B_3 = \frac{\text{Total pembilang (B}_1+\text{B}_2+\text{B}_3)}{\text{Total penyebut (B}_1+\text{B}_2+\text{B}_3)} \times 100\%$
- d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.

- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.
- g. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyamplling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyamplling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.

- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

$$\text{Contoh : } \% B_3 = \frac{\text{Total pembilang (B}_1\text{+B}_2\text{+B}_3\text{)} \times 100\%}{\text{Total penyebut (B}_1\text{+B}_2\text{+B}_3\text{)}}$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Pengujian
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Pengujian.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.

- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi..
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :
- $$\% B_3 = \frac{\text{Total pembilang } (B_1+B_2+B_3)}{\text{Total penyebut } (B_1+B_2+B_3)} \times 100\%$$
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

- a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan
- c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian

- d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- e. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.
- f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan

% Pangan Fortifikasi yang MS =

$$\frac{\text{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
Contoh : % B3 = Total pembilang (B1+B2+B3) Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : “Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang, dengan target sebesar 83 di tahun 2024.

Defenisi Operasional:

1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
2. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.
3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:
 - a. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga

sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

- b. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- c. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Cara Perhitungan Dan Formula :

- a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.
- b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum[\sum(\bar{R}a \times b) \times c]$$

Keterangan:

$\bar{R}a$ adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan

(a) dalam satu komoditi.

(b) adalah bobot penduduk (BPS)

(c) adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha.

Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Palembang berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 92,1 di tahun 2024.
- Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 80,01 di tahun 2024
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 93 di tahun 2024

Defenisi Operasional:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang
 - a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.
 - b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap

peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

- c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya.
- d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri

Cara Perhitungan:

- a. Survei dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

- b. Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

Keterangan: $\hat{E}Jk$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

- c. Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:
 - Aspek kepuasan: Tangible (0,16), Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17)
 - Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
 - Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.

- b. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun.
- c. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:
 - 1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
 - 2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
 - 3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
 - 4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Cara Perhitungan: dan Formula:

- a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.
- b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Nasional} = \sum[\sum(\bar{R}a \times b) \times c]$$

Keterangan: $\bar{R}a$ adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi. b adalah bobot penduduk (BPS) c adalah

bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palembang:
 1. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
 2. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
 4. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
 5. Target dinyatakan dalam angka.

Cara Perhitungan:

Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Palembang, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 100% di tahun 2024
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024
 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100% di tahun 2024
 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 65% di tahun 2024
 - Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 71% di tahun 2024
 - Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 4,55 di tahun 2024.
 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, dengan target sebesar 81 di tahun 2024.
- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan:
1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
 2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil

pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain
 - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
4. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - 1) Pelaku usaha;
 - 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan
oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT $\times 100\%$
Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan
oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT $\times 100\%$
Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat
dan diterima oleh UPT.

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan
oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain $\times 100\%$
Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT $\times 100\%$
Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember

b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan:

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

6. PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$ A

A = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$

B = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sekte}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu:

1. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 - a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
 - b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
 - c) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
 - d) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
 - e) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
 - f) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang

tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)

IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)

Skala Usaha	Risiko Produk		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Besar	Program Manajemen Risiko (PMR)	Full Audit	
Penanda tangan		Kepala Badan	
Menengah	Kepala Badan	Full Audit	
Penanda tangan		Deputi	
Mikro dan Kecil	PMR bertahap	Penilaian Mandiri	Komitmen
Penanda tangan	Deputi	Kepala UPT	

Skala Usaha

- Mikro : < 1 milyar
- Kecil : 1 – 5 milyar
- Menengah : 5 – 10 milyar
- Besar : >10 Milyar

Contoh produk berdasarkan risiko

- Rendah : Gula
- Menengah : Krim nabati
- Tinggi : Formula bayi

Note:

- Audit dilakukan maksimal setelah 1 tahun (hanya bagi skala usaha mikro dan kecil)
- Jika terjadi kasus, dapat diperiksa sewaktu-waktu

- g) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.
 - h) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
 - i) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
 - j) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
 - k) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
 - l) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).
2. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
 3. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.
 4. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan

ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu =

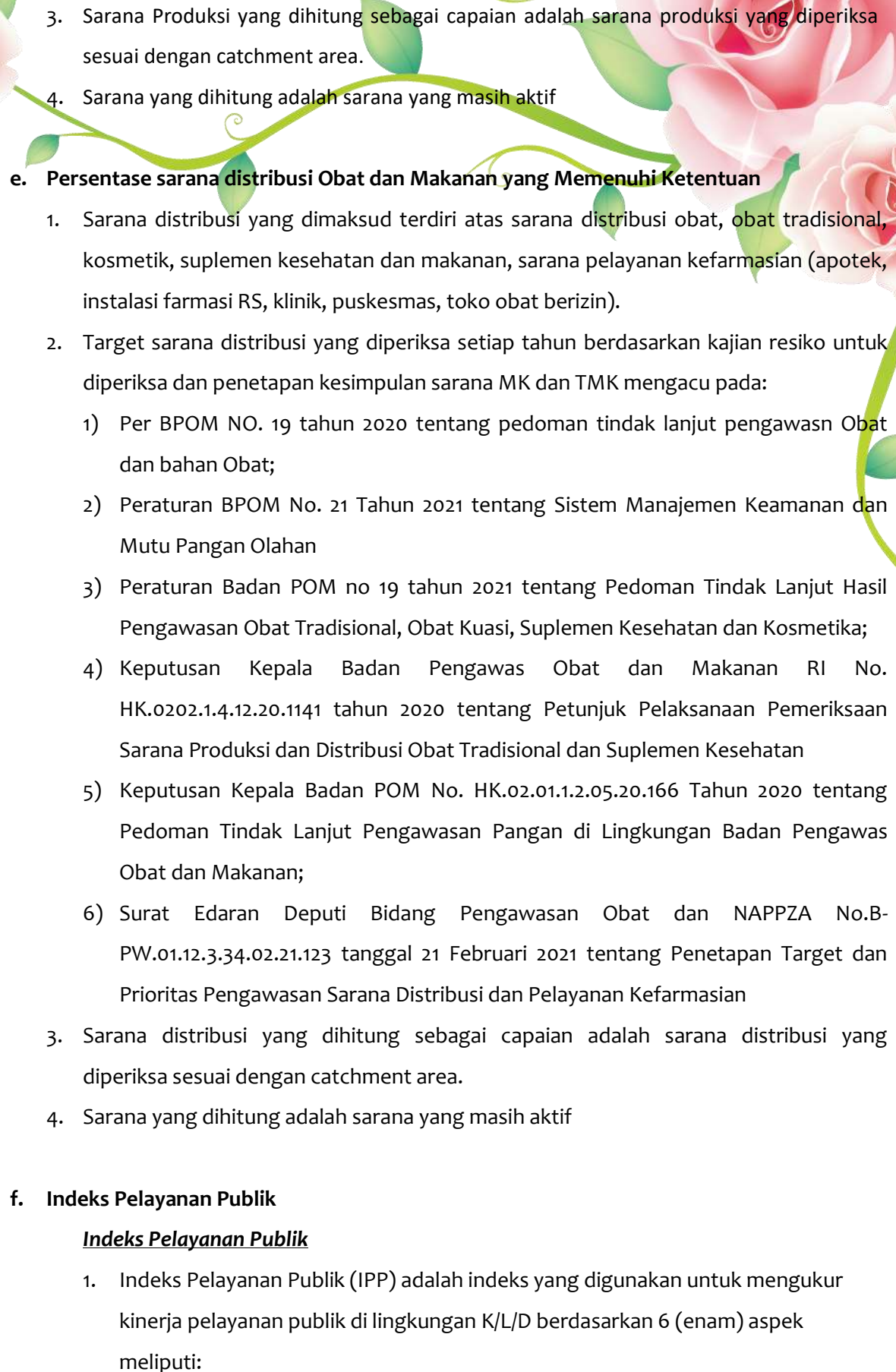
$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

d. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.
2. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada:
 - 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat
 - 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
 - 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
 - 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - 5) SOP Makro

- 
3. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.
 4. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif
- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**
1. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
 2. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat;
 - 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
 - 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
 - 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
 - 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian
 3. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.
 4. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif
- f. Indeks Pelayanan Publik**
- Indeks Pelayanan Publik**
1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
 - b. Profesionalitas SDM (18%);
 - c. Sarana Prasarana (15%);
 - d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
 - e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
 - f. Inovasi (7%).
2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Cara Perhitungan:

- a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM M (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)
- b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

g. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

1. Ruang Lingkup UMKM:

- ✓ UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

- ✓ UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - ✓ UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B
2. UMKM yang memenuhi standar adalah:
- ✓ UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1)
 - ✓ UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2)
 - ✓ UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: (3)
 - 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.
3. Kriteria UMKM yang didampingi:
- ✓ Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
 - ✓ Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN II TAHUN 2022**

- 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- ✓ Untuk UMKM Kosmetik:
1. Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 2. Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

4. Tahapan Pendampingan UMKM

a) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan – Feb	10
2	Bimtek CPPOB	Maret – April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	40
4	PSB	Agt – Nov	20
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	10

b) Obat Tradisional

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40	
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

c) Kosmetika

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 - 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb - 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb - 15 November	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

5. Cara Perhitungan:

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B + C)/3$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan peningkatan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 98,3% di tahun 2024
- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 97 di tahun 2024
- Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 32 di tahun 2024
- Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 17 di tahun 2024

Defenisi Operasional:

a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

1. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
 - a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
 - b) KIE langsung ke masyarakat; dan
 - c) KIE melalui media sosial
3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
 - a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
 - c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
 - d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
4. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey

Cara Perhitungan:

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

1. PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah.
2. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau ecommerce.
3. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.
4. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
5. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.
6. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:
 - 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
 - 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 - 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan
7. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Cara Perhitungan Dan Formula:

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman seperti yang tercantum pada Definisi poin f Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-April (TW 1 - TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-April (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 2-TW 3)
4	Pemberian Paket Edukasi / Produk Informasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli-September (TW 3-TW 4)
	Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah		
	Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah		
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-November (TW 4)
7	Pengawasan	10%	Oktober-Desember (TW 4)
	Total Skor	100%	

c. Jumlah desa pangan aman

1. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawasan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
2. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
3. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi
4. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :
 - 1) kader keamanan pangan desa yang aktif
 - 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa

- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Cara Perhitungan Dan Formula : Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April
2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5%	TW1-TW2
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April-Juli
4	Bimtek Komunitas	15%	Mei-Oktober
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10%	Juni-November
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	Pre: Mei-Oktober
			Post: November
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10%	November-Desember
8	Lomba Desa Pangan Aman	5%	Desember
9	Pengawasan	10%	Juni-Desember
Total Skor		100%	

d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

1. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
2. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
3. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

4. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
5. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.
6. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar.
7. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
8. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April
2	Survei Pasar	5%	Januari-April
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15%	April-Mei
5	Penyuluhan	10%	Juni-Juli
6	Kampanye	10%	Juni-Juli
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15%	September- Oktober
8	Pengawalan	10%	Februari-Oktober
Total Skor		100%	

Catatan:

- Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran
- Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada perhitungan kinerja, agar dikoordinasikan dengan unit Teknis (Direktorat PMPU Pangan Olahan

Sasaran Kegiatan 6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Palembang.

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional. Jenis produk berkembang sangat pesat, sehingga tidak semua metode analisis yang dibutuhkan telah tersedia pada buku standar tersebut atau tidak semua metode analisis pada buku standar dapat digunakan dalam pengujian produk. Dalam mengawal mutu dan keamanan produk perlu dikembangkan metode analisis yang disesuaikan dengan profil dan matriks sampel. Dalam validasi metode analisis dan pengujian diperlukan baku pembanding sebagai penentu validitas metode dan hasil pengujian, sedangkan di pasaran tidak selalu tersedia baku pembanding yang dibutuhkan. Semua sampel yang berasal dari sampel prioritas sampling dan sampel dari pihak ke-3 juga dituntut untuk diselesaikan tepat waktu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024

Defenisi Operasional:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi.
- b. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area.
- c. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

- d. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
= (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) :
 - a. B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b. B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
 - a. B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b. B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
 - c. Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area.
- b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A):
 - a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B):
 - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
 - c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

Sasaran Kegiatan 7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini,

maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 75 di tahun 2024.

Defenisi Operasional:

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHPA untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.
3. Tahapan Penindakan antara lain:
 - a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 - b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
 - c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 - d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
3. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Cara Perhitungan dan Formula:

Penilaian Persentase Keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% --nilai A [(a+b+c+d) / Jumlah perkara]
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30% dan – nilai C [(c+d) / Jumlah perkara)
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d/ jumlah perkara)

Nilai Tingkat keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

*Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi. Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Sasaran Kegiatan 8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Indeks RB Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 85,9;
- b. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 82,9.

Defenisi Operasional:

a) Indeks RB Balai Besar POM di Palembang

1. Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM.
2. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
3. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
4. 3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
5. Tabel rincian bobot komponen pengungkit:
 - 1) Manajemen Perubahan : bobot 8%
 - 2) Penataan Tatalaksana : bobot 7%
 - 3) Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
 - 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
 - 5) Penguatan Pengawasan : bobot 15%
 - 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%
6. Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil
 - 1) Nilai Survey Persepsi Korupsi : 15%
 - 2) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5%
 - 3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal) : 15%

Cara Perhitungan dan Formula:

Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT.

b) Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang

1. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.
3. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.
4. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Cara Perhitungan dan Formula:

Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP.

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

1. AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100

2. A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
3. BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
4. B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
5. CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
6. C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
7. D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Sasaran Kegiatan 9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palembang yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 85,25.

Defenisi Operasional:

- a) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b) Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c) Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM.

Cara Perhitungan dan Formula:

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Sasaran Kegiatan 10. Menguatnya laboratorium , data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pemenuhan standar GLP adalah sebagai upaya Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palembang untuk memenuhi Standar Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium dan standar kompetensi personal laboratorium, alat laboratorium yang digunakan harus terkalibrasi dan dipelihara dengan baik.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah :

- Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 92% di tahun 2024
- Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, dengan target sebesar 3,00 di tahun 2024

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

- a. Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.
- b. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
- c. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Standar Ruang Lingkup > 65,

- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Cara Perhitungan:

- Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 1. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat : email dan dashboard BOC
 - Loka : email, dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75: Sangat Kurang

Sasaran Kegiatan 11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palembang secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Palembang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-12, dengan ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 98,9;
- b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 92,00% (Efisien).

Defenisi Operasional:

- a. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang:
 1. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
 3. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA; 2) Deviasi Halaman III DIPA; 3) Pengelolaan UP; 4) Rekon LPJ Bendahara; 5) Data Kontrak; 6) Penyelesaian Tagihan; 7) Penyerapan Anggaran; 8)

Retur SP2D; 9) Perencanaan Kas (Renkas); 10) Pengembalian/Kesalahan SPM; 11) Dispensasi Penyampaian SPM; 12) Pagu Minus; 13) Konfirmasi Capaian Output.

Cara Perhitungan dan Formula:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

- b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Palembang**
1. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
 2. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input: $IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input}) \times 100\%$
Standar efisiensi (SE) adalah 1
 3. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). $TE = (IE - SE) / SE$
Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.
 4. Kriteria:
 - Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
 - Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$
 5. Kriteria: Indikator hanya berlaku untuk pengukuran kinerja Balai Besar/ Balai di tahun 2020-2021.

Cara Perhitungan dan Formula:

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien
2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

4.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

Balai Besar POM di Palembang telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2022 mengacu pada Revisi Renstra Balai Besar POM di Palembang 2021-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai Besar POM di Palembang T.A 2022. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Palembang Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh dapat dilihat pada Lampiran 2 pada Laporan Kinerja ini.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Palembang. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Pada akhir tahun 2021 telah disusun Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2022. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2022 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang tahun 2022 yang sudah ditandatangani dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini. Adapun Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	92,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,90
		Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77,12
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	92,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,50
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,20
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,40
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	59
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	9
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard	100,00
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	64,00

8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang	83,90
		Nilai AKIP BBPOM di Palembang	80,90
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palembang	84,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	98,70

Tabel.3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2022

Kegiatan

Anggaran

- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp. 30.567.108.000,00

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah diperjanjikan, Balai Besar POM di Palembang menerima anggaran sebesar Rp. 30.567.108.000,00.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang disajikan dalam bentuk tabel dengan target per bulan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Palembang Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh dapat dilihat pada Lampiran 4 pada Laporan Kinerja ini.

2.5 METODE PENGUKURAN & KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran Kinerja Balai Besar POM di Palembang dilakukan dengan berpedoman pada Defenisi Operasional Indikator Kinerja Utama yang telah dijelaskan pada Indikator Kinerja

Utama Balai Besar POM di Palembang yang dikumpulkan oleh Penanggungjawab data Money yang ada di Sub Koordinator Substansi Program & Evaluasi dengan berkoordinasi dengan personel yang telah ditugaskan oleh Koordinator/Sub Koordinator masing-masing.

Kriteria pengukuran dari hasil capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Capaian (Existing)	Rentang Capaian Lapkin 2021 TW2
Sangat Kurang		<50%
Kurang	< 75	$50\% \leq x < 70\%$
Cukup	75 - 100	$70\% \leq x < 90\%$
Baik	100	$90\% \leq x < 110\%$
Sangat Baik	100-125	$110\% < x \leq 120\%$
Tidak dapat disimpulkan	> 125	> 120%

Tabel 4.

Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Palembang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan baik triwulan maupun akhir tahun 2022, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan II Tahun 2022 dengan tahun lalu dan membandingkan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra 2024, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2022 penetapan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2022 memuat 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan. Pencapaian semua Sasaran Kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2022 yang merupakan periode tahun kedua dari periode Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria	Rata-rata Persfektif (%)
Sasaran Kegiatan Kategori Stake Holder Perspektif (Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1, 2 dan 3)				101,28
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	101,28	Baik	101,28
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di	0	Capaian di Akhir Tahun	0

	Palembang			
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	0	Capaian di Akhir Tahun	0
Sasaran Kegiatan Kategori Internal Perspektif (Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4, 5, 6 dan 7)				107,41%
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	89,95%	Cukup	89,95%
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	106,08%	Baik	106,08%
6.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	125,90%	Tidak Dapat Disimpulkan	125,90%
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	107,72%	Baik	107,72%
Sasaran Kegiatan Kategori Learning and Growth Perspektif (Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan 8, 9, 10 dan 11)				145,07%
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	0	Capaian di Akhir Tahun	0
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal	0	Capaian di Akhir Tahun	0
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	152,63%	Tidak Dapat Disimpulkan	152,63%
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel	137,51%	Tidak Dapat Disimpulkan	137,51%

RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN

Sangat Baik

117,92%

Tabel 5.
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2022
Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 29 Indikator Kinerja Utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap Indikator Kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	91.50	93,40	102,07
		2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	88.00	94,86	107,79
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.00	99,59	103,73
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.00	88,89	108,40
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92.00	77,65	84,40
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	84,00	Capaian di Akhir Tahun	0
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan	89,90	Capaian di Akhir Tahun	0

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Makanan			
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77,12	Capaian di Akhir Tahun	0
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	Capaian di Akhir Tahun	0
4.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	10. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	60,00	31,51	52,52
		11. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	65,00	31,72	48,80
		12. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	95,88	95,88
		13. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60,00	35,14	58,56
		14. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	66,00	69,16	104,79
		15. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	4,20	-	-
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	40,00	71,67	179,17

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
		pembuatan OT dan Kosmetik yang baik				
5.	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	17.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	50,00	87,16	174,32
		18.	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50,00	20,00	40,00
		19.	Jumlah Desa Pangan Aman	50,00	49,99	99,98
		20.	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	50,00	55,00	110,00
6.	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	21.	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	40,00	51,43	128,58
		22.	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	40,00	49,29	123,22
7.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	23.	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	44,56	48,00	107,72
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	24.	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	83,90	Capaian di Akhir Tahun	0
		25.	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	80,90	Capaian di Akhir Tahun	0

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Berkinerja Optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	84,75	Capaian di Akhir Tahun	0
10.	Memperkuatnya Laboratorium, pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	82,00	Capaian di Akhir Tahun	0
		28. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	1,9	2,9	152,63
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	55	75,63	137,51

Tabel 6.

Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2022

Sebagai salah satu upaya pengawalan pencapaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2022 BBPOM di Palembang telah melakukan cascading Indikator Kinerja dari level Eselon II hingga ke level staf. Cascading ini selain dalam bentuk Perjanjian Kinerja individu juga cascading dalam bentuk SKP yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja. Data dapat dilihat pada Lampiran 6 (contoh Perjanjian Kinerja Koordinator, Kabag TU dan subkoordinator serta Staf). Evaluasi SKP BBPOM di Palembang telah dilakukan setiap Triwulan secara online. Nilai SKP Triwulan II Tahun 2022 begitu juga dengan nilai capaian Perjanjian Kinerja individu telah dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja dan *reward&punishment*.

Analisis Akuntabilitas Kinerja (Penjelasan Capaian Sasaran Strategis) :

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 1 (satu) indikator yang dengan kriteria Sangat Baik, sebanyak 8 (delapan) indikator dengan kriteria Baik, 1 (satu) indikator dengan kriteria CUKUP, 2 (dua) indikator dengan kriteria KURANG, 2 (dua) Indikator dengan kriteria Sangat Kurang dan 6 (enam) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan serta 9 (sembilan) indikator yang tidak dapat dihitung di Triwulan II. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan

terhadap masing-masing Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Palembang, adalah sebagai berikut :

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 5 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW1 2022	Realisasi TW2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	91,50	93,40	102,07%	Baik

Tabel 7.

Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan 2 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 Tahun 2022

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 93,40%. Bila dibandingkan dengan target sebesar 91,50%, maka capaian yang diperoleh adalah 102,07% dan mendapatkan kriteria Baik. Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022 ditemukan 27 sampel Tidak Memenuhi Syarat dari 409 sampel yang telah selesai dilakukan pengujian.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi dan capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat sampai dengan triwulan 2 adalah 93,40% bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 91,50%, maka capaian yang diperoleh adalah 102,07% dan mendapatkan kriteria Baik.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun lalu

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan 2 adalah 93,40%, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 94,50%, mengalami penurunan

sebesar 1,10%. Sedangkan capaian Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan 2 adalah 102,07%, lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 103,85%.

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

Realisasi dan capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan 2 adalah 93,40% bila dibandingkan dengan target tahun akhir renstra 2024 sebesar 92,50%, maka capaian yang diperoleh adalah 100,97%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan :

1. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha baik ditingkat produksi maupun distribusi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tingginya persentase Obat MS Triwulan 2 Tahun 2022 menunjukkan bahwa mutu obat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Palembang sudah baik. Hal ini dimungkinkan karena adanya pengawasan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan serta sinergisme dengan pemerintah daerah.

f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Obat yang Memenuhi Syarat, antara lain :

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian pada Triwulan 2 Tahun 2022.
2. Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan Parameter Uji Kritis pada tahun berjalan.
3. Pengadaan alat laboratorium setiap tahun sesuai kebutuhan dan persetujuan dari P3OMN untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium.
4. Pemenuhan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
5. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat serta Pemda

6. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin untuk memberikan pembinaan dan pengawalan dalam penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan

g. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

1. Peningkatan kemampuan uji laboratorium pada Triwulan 2 Tahun 2022 dilakukan dengan melakukan peningkatan SRL pengujian sesuai dengan roadmap peningkatan SKL
2. Peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian. Sampai dengan Triwulan 2 tahun 2022 telah dilakukan pelatihan yang disertai dengan praktikum pada laboratorium Kosmetik dan laboratorium mikrobiologi, serta pelatihan ke PPPOMN bagi beberapa personel pengujian.
3. Peningkatan layan informasi dan pengaduan konsumen baik secara langsung, telp, WA, email dan pemanfaatan media sosial sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas dan bijak dalam memilih Obat yang aman dan bermutu

2. Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW2 2022	Realisasi TW2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	88,00	94,86	107,79%	Baik

Tabel 8.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan 2 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 Tahun 2022

Realisasi Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 94,86% dari target 88,00%, dengan demikian capaian BBPOM Palembang untuk indikator ini sebesar 107,79% dan masuk dalam kriteria Baik. Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022 terdapat Makanan yang Tidak memenuhi Syarat sebanyak 9 sampel dari 175 sampel yang telah selesai diuji.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 94,86% dari target tahun 2022 sebesar 88,00%, dengan demikian capaian BBPOM Palembang untuk indikator ini adalah 107,79% dan masuk dalam kriteria Baik.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun lalu

Realisasi persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan 2 adalah 94,86%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 90,22%, mengalami peningkatan sebesar 4,64%. Sedangkan capaian Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan 2 adalah 107,79%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 104,30%.

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

Realisasi dan capaian persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan 2 adalah 94,86%, bila dibandingkan dengan target tahun akhir renstra 2024 sebesar 91,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 104,24%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha baik ditingkat produksi maupun distribusi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tingginya persentase Makanan yang MS Triwulan 2 Tahun 2022 menunjukkan bahwa mutu Makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Palembang sudah baik. Hal ini dimungkinkan karena adanya pengawasan yang dilakukan secara insentif dan berkelanjutan dan sinergisme dengan pemerintah daerah.

f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022.
2. Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.

3. Pemenuhan kebutuhan alat dan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
4. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasikepada pelaku usaha, masyarakat serta Pemda
5. Pengawasan yang dilakukan secara rutin di sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dilakukan, termasuk pengawalan oleh Pemda Kab / Kota

g. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

1. Peningkatan kemampuan uji laboratorium pada Triwulan 2 Tahun 2022 dilakukan dengan peningkatan SRL pengujian sesuai dengan roadmap peningkatan SKL
2. Peningkatan kompetensi SDM dilakukan dengan mengikuti pelatihan pengujian di PPOMN
3. Peningkatan awareness / kesadaran pelaku usaha melalui pelatihan, bimtek dan pemberian informasi serta Intensifikasi Pengawasan di bidang Obat dan Makanan.
4. Peningkatan layan informasi dan pengaduan konsumen baik secara langsung, telp, WA, email dan pemanfaatan media sosial sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas dan bijak dalam memilih Makanan yang aman dan bermutu.

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW2 2022	Realisasi TW 2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	96,00	99,59	103,73%	Baik

Tabel 9.

Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan 2 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 Tahun 2022

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 99,59%, bila dibandingkan dengan target 96,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 103,73%

dan masuk dalam kriteria Baik. Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022 terdapat sebanyak 241 sampel Obat targeted yang telah selesai diuji.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 99,59%, bila dibandingkan dengan target tahun 2022 96,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 103,73% dan masuk dalam kriteria Baik.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun lalu

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu Triwulan 2 adalah 99,59%, lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 95,10%. Demikian juga capaian Obat yang aman dan bermutu Triwulan 2 adalah 103,73%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 100,10%.

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

Realisasi dan capaian persentase Obat yang aman dan bermutu Triwulan 2 adalah 99,59%, bila dibandingkan dengan target tahun akhir renstra 2024 sebesar 97,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 102,67%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022, terutama untuk sampling Obat targeted
2. Tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat meningkat, sehingga produk yang beredar di pasaran dan yang dikonsumsi masyarakat merupakan Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat.
3. Pengawasan terhadap produk Obat di sarana produksi dan sarana distribusi yang selalu dilaksanakan secara rutin, menerapkan *risk base inspection* dan *track record* sarana untuk dapat mendeteksi adanya produk Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat beredar di masyarakat dan di tingkat produsen.

f. **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program / kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Obat yang Memenuhi Syarat, antara lain :

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berpedoman pada Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2022.
2. Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
3. Pengadaan alat laboratorium untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium.
4. Pemenuhan sarana penunjang pengujian (reagensia dan media mikrobiologi, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
5. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait Obat dan Makanan
6. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan

g. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.**

1. Peningkatan kemampuan uji laboratorium pada Triwulan 2 Tahun 2022 dilakukan dengan peningkatan SRL pengujian sesuai dengan roadmap peningkatan SKL
2. Peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan / bimtek / seminar online terkait teknik pengujian

4. **Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW2 2022	Realisasi TW2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	82,00	88,89	108,40%	Baik

Tabel 10.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan 2 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 Tahun 2022

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 88,89%, bila dibandingkan dengan target 82,00% maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 108,40% dengan kriteria Baik. Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022 terdapat sejumlah 18 sampel makanan targeted yang telah selesai dilakukan pengujian, dimana 2 diantaranya tidak memenuhi syarat.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 88,89%, bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 82,00%, maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 108,40% dengan kriteria Baik.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun lalu

Realisasi dan capaian kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2021 karena terdapat perbedaan definisi operasional.

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

Realisasi dan capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu Triwulan 2 adalah 88,89% bila dibandingkan dengan target tahun akhir renstra 2024 sebesar 85,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 104,58%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022, terutama sampling makanan targeted
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha baik ditingkat produksi maupun distribusi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022
2. Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
3. Pemenuhan kebutuhan alat dan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
4. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang
5. Pengawasan yang dilakukan secara rutin di sarana produksi dan distribusi makanan yang dilakukan, termasuk pengawalan CAPA sarana oleh BBPOM di Palembang

g. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.**

1. Peningkatan kemampuan uji laboratorium pada Triwulan 2 Tahun 2022 dilakukan dengan peningkatan SRL pengujian sesuai dengan roadmap peningkatan SKL
2. Peningkatan kualitas SDM telah dilakukan melalui pelatihan
3. Peningkatan awareness / kesadaran pelaku usaha melalui pelatihan, bimtek dan pemberian informasi serta Intensifikasi Pengawasan di bidang Obat dan Makanan.
4. Peningkatan layan informasi dan pengaduan konsumen baik secara langsung, telp, WA, email dan pemanfaatan media sosial sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas dan bijak dalam memilih Makanan yang aman dan bermutu.

5. **Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat**

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW2 2022	Realisasi TW2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92,00	77,65	84,40%	Cukup

Tabel 11.
Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan 2 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 Tahun 2022

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 77,65%, bila dibandingkan dengan target 92,00% maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 84,40% dengan kriteria Cukup. Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022, 85 sampel fortifikasi telah selesai dilakukan pengujian. Dari jumlah tersebut sejumlah 19 sampel berupa produk garam dinyatakan tidak memenuhi syarat.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi Memenuhi Syarat pada Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 77,65%, bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 92,00%, maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 84,40% dengan kriteria Cukup.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun lalu

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi Memenuhi Syarat pada Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 77,65%, bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 92,00%, maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 84,40% dengan kriteria Cukup.

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

Realisasi dan capaian persentase Pangan Fortifikasi Memenuhi Syarat Triwulan 2 adalah 77,65% bila dibandingkan dengan target tahun akhir renstra 2024 sebesar 94,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 82,61%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman sampling dan pengujian tahun 2022
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha baik ditingkat produksi maupun distribusi, terutama produk garam masih perlu ditingkatkan.

f. **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022
2. Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
3. Pemenuhan kebutuhan alat dan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
4. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang
5. Pengawasan yang dilakukan secara rutin di sarana produksi dan distribusi makanan yang dilakukan, termasuk pengawalan CAPA sarana oleh BBPOM di Palembang

g. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.**

1. Peningkatan kemampuan uji laboratorium pada Triwulan 2 Tahun 2022 dilakukan dengan peningkatan SRL pengujian sesuai dengan roadmap peningkatan SKL
2. Peningkatan kompetensi SDM telah dan akan dilakukan melalui pelatihan
3. Peningkatan awareness / kesadaran pelaku usaha melalui pelatihan, bimtek dan pemberian informasi serta Intensifikasi Pengawasan di bidang Obat dan Makanan.
4. Peningkatan layan informasi dan pengaduan konsumen baik secara langsung, telp, WA, email dan pemanfaatan media sosial sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas dan bijak dalam memilih Makanan yang aman dan bermutu.

3.1.2 **CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II**

2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu :

Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi TW2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84	0	0	-

Tabel 12.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Triwulan II Tahun 2022

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu BBPOM di Palembang diperoleh berdasarkan hasil survei Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). Pada Triwulan II Tahun 2022, belum diperoleh hasil survei. Apabila dibandingkan dengan target Triwulan II Tahun 2022 sebesar 0%, maka capaian BBPOM Palembang adalah 0%.

Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2021 sebesar 94,41%. Pada Triwulan II Tahun 2022 capaian Indeks Kesadaran Masyarakat belum dapat dihitung karena belum dilaksanakan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

3.1.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 3 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan**

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi Tw 2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	89,90	0	0%	-

Tabel 13.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2022

Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2022 adalah 0%. Target BBPOM Palembang untuk indikator ini adalah 77,12%, dengan demikian capaian BBPOM Palembang adalah 0%.

Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 sebesar 94,03%. Pada Triwulan II Tahun 2022 capaian Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat dihitung karena belum dilaksanakan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi Tw 2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77,12	0	0	-

Tabel 14

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2022

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2022 adalah 0% dari target sebesar 77,12%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian BBPOM Palembang adalah sebesar 0%.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 sebesar 94,91%. Pada Triwulan II Tahun 2022 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat dihitung karena belum dilaksanakan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi Tw 2 2022	Capaian (%)	Kriteria
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	0	0%	

Tabel 15
Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II Tahun 2022

Realisasi Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II Tahun 2022 adalah 0% dari target sebesar 90%. Berdasarkan realisasi dibandingkan target maka capaian BBPOM Palembang adalah sebesar 0%. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2021 sebesar 100,5%. Pada Triwulan II Tahun 2022 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM belum dapat dihitung karena belum dilaksanakan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

3.1.4 CAPAIANSASARAN KEGIATAN IV

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik Di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palembang

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 6 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target TW II 2022	Realisasi TW II 2022	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	60	31,51	52,52%	kurang

Tabel 16.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan II Tahun 2022

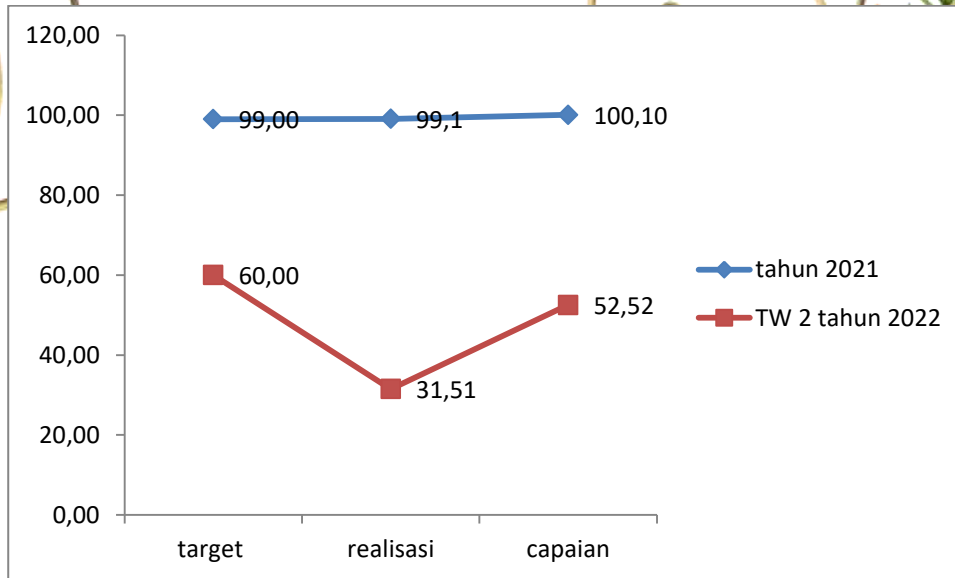
a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2022

Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target TW II sebesar 60 %, dengan realisasi sebesar 31,51 % dan pencapaian sebesar 52,52 % dengan kriteria kurang. Dari data tersebut, belum semua hasil pemeriksaan sarana ditindaklanjuti, hal ini harus ditingkatkan untuk triwulan berikutnya.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target tahun 2022 sebesar 99,50 %, dengan realisasi TW II sebesar 31,51 % dan pencapaian sebesar 52,52% dengan kriteria kurang. Capaian ini harus ditingkatnya di triwulan berikutnya di tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Tahun TA 2021



Grafik 3.1.4.1 . Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap 2022 TW II Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan TA 2022 TW II dibandingkan dengan capaian tahun 2021 mengalami penurunan, dimana realisasi 2021 sebesar 99,10% dari target sebesar 99,00% dengan capaian sebesar 100,10% sedangkan realisasi 2022 TW II sebesar 31,51% dari target sebesar 60,00% dengan pencapaian sebesar 52,52%.

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi TW II 2022	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100,00	31,51	52,52%	kurang

Tabel 17. Capaian Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi TW II Tahun 2022 terhadap target Tahun terakhir Renstra

Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang Tahun 2022 TW II dibandingkan dengan target renstra 2024 sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar

31,51% dan pencapaian sebesar 52,52% dengan kriteria kurang. Dari hasil tersebut, target renstra 2024 belum tercapai, oleh karena itu, kedepan harus ditingkatkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. Komitmen petugas dalam membuat surat keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi telah dilaksanakan.
3. Tersedianya sarana dan prasarana serta alat pengolah data yang memadai seperti komputer, laptop, printer dalam menunjang kelancaran pekerjaan.

f. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop guna mendukung percepatan pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Adanya tool SiLisaMesra yang dibuat untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang terupdate dan dapat dijadikan tool untuk memonitor hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti.

g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

1. Adanya peningkatan kompetensi personil, mendorong peningkatan kinerja personil untuk segera menyelesaikan setiap tugas yang diberikan
2. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan perbulan, sehingga apabila terdapat target indikator yang tidak tercapai dapat segera dilakukan rencana tindak lanjut untuk mencapainya.

2. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target TW II 2022	Realisasi TW II 2022	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	65	31,72	48,8%	Sangat kurang

Tabel 18

Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder Triwulan II Tahun 2022

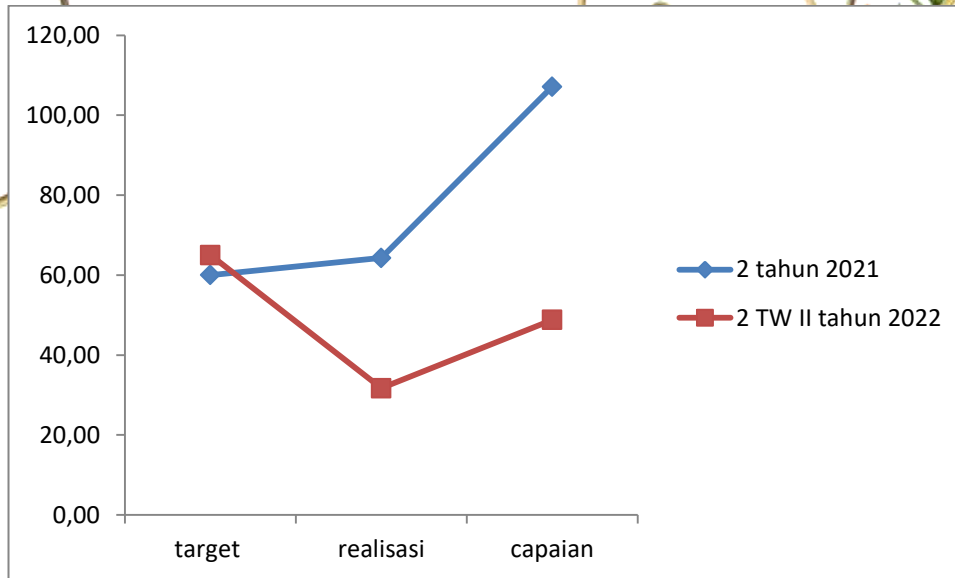
a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder di wilayah kerja BBPOM di Palembang pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 31,72% bila dibandingkan dengan target 65,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 48,8% dan masuk dalam kriteria sangat kurang. Hasil tersebut telah mencapai target yang ditetapkan, namun hal ini harus terus ditingkatkan dan dipertahankan sehingga sampai tahun 2022 realisasi tetap memenuhi target.

b. Perbandingan Realisasi TW II dan Target di Rencana Kerja 2022

Realisasi Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder di wilayah kerja BBPOM di Palembang pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 31,72% bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebesar 65,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 48,8% dan masuk dalam kriteria sangat kurang. Hal ini menunjukkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan telah cukup banyak direspon oleh pelaku usaha dan lintas sektor terkait.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Tahun TA 2021



Grafik 3.1.4.2 . Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap TW II 2022 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder TA 2022 TW II dibandingkan dengan realisasi dan capaian 2021 mengalami penurunan, dimana realisasi 2021 sebesar 64,29% dari target sebesar 60,00% dengan capaian sebesar 107,15% sedangkan realisasi 2022 TW II sebesar 31,72% dari target sebesar 65,00% dengan pencapaian sebesar 48,80%. Capaian yang diperoleh pada TW II 2022 telah mendekati target, namun kedepan akan terus ditingkatkan respon pelaku usaha dan lintas sektor terkait.

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi TW II 2022	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	75,00	31,72	42,29%	Sangat kurang

Tabel 19. Capaian Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder TW II Tahun 2022 terhadap target Tahun terakhir Renstra

Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder di wilayah kerja BBPOM di Palembang Tahun 2022 TW II dibandingkan dengan target renstra 2024 sebesar 75 %, dengan realisasi sebesar 31,72% dan pencapaian sebesar 42,29% dengan kriteria sangat kurang. Hasil ini tentunya akan menjadi motivasi kedepan dalam mencapai target yang ditetapkan dalam renstra.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Terlambatnya penyampaian rekomendasi/ surat tindak lanjut hasil pemeriksaan ke sarana/ pelaku usaha dan lintas sektor terkait
2. Kepatuhan dari pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan petugas Balai Besar POM di Palembang masih kurang, sehingga masih banyak yang belum ditindaklanjuti.
3. Lambatnya tindak lanjut yang dilakukan oleh lintas sektor terkait atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah disampaikan

f. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Advokasi dan audiensi yang dilakukan oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sehingga memberikan efek percepatan dalam menyampaikan feedback atas hasil pemeriksaan yang telah disampaikan.
2. Adanya Dana alokasi khusus (DAK) Triwulan II Tahun 2022 yang mensupport pemda untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Balai Besar POM di Palembang.
3. Adanya sarana komunikasi melalui WA Group BBPOM di Palembang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mempercepat koordinasi dan komunikasi.
4. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang dilakukan, selain untuk melihat kesesuaian penerapan peraturan yang berlaku, juga sekaligus melakukan pembinaan guna mengingatkan stakeholder untuk melakukan perbaikan/ merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan.
5. Pengawasan bersama dengan pemerintah daerah di sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di Kabupaten / Kota terkait.

g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

1. Telah dilakukannya monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan secara berkala.
2. Telah dilakukan pendampingan/ bimbingan kepada pelaku usaha/ penanggung jawab sarana dalam membuat tindakan perbaikan dan pencegahan, sehingga diharapkan mendorong peningkatan *feedback* tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW2 2022	Realisasi TW2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	95,88	95,88%	Baik

Tabel 20.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2022

a. Perbandingan Target Triwulan II Tahun 2022 dengan Realisasi Triwulan II Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 95,88% bila dibandingkan dengan target 100,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 95,88% dan masuk dalam kriteria Baik. Tentunya hal ini menjadi poin penting sebagai salah satu bentuk mewujudkan layanan publik yang paripurna terutama terkait layanan perizinan (PSB, SKI, dan SKE).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2019 dan 2020

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021 namun tidak dapat dibandingkan capaian dan realisasi tahun 2019.

Pada tahun 2020, realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 117,65%. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi sebesar 99,84% dengan capaian sebesar 99,84%. Dari perbandingan tahun 2020 dan 2021 bahwa keputusan penilaian sertifikasi selalu diselesaikan tepat waktu.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Kompetensi petugas terkait alur proses perizinan / registrasi serta komitmen petugas dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha selama proses perizinan sampai terbit izin edar
2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah dilaksanakan sesuai Service Level Agreement (SLA)
3. Tersedianya sarana dan prasarana serta alat pengolah data yang memadai seperti komputer, laptop, printer untuk dukungan percepatan penyelesaian pekerjaan
4. Dukungan bandwidth jaringan internet serta lancarnya aplikasi registrasi Obat dan Makanan serta SKI / SKE (e - BPOM)
5. Layanan konsultasi kepada pelaku usaha dan UMKM melalui telepon, wa, dan email terutama selama masa pandemi Covid-19.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan pelatihan / bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan pemberian rekomendasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik.
2. Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi.
3. Pelaksanaan desk Registrasi Pangan Olahan secara daring bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan untuk pendampingan pengurusan izin edar BPOM serta dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM.
4. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Registrasi Pangan Olahan bagi pelaku usaha secara daring dan luring bersama Direktorat Pangan Olahan

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

1. Peningkatan kompetensi petugas terkait alur atau prosedur dan persyaratan izin edar turut mendukung dalam percepatan evaluasi dokumen dan pencapaian target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
2. Pemenuhan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain alat laboratorium, laptop, printer, komputer dan penguatan jaringan / bandwidth.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, antara lain melalui WA group dan email

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW II 2022	Realisasi TW II 2022	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60,00	35,14	58,57	kurang

Tabel 21.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2022

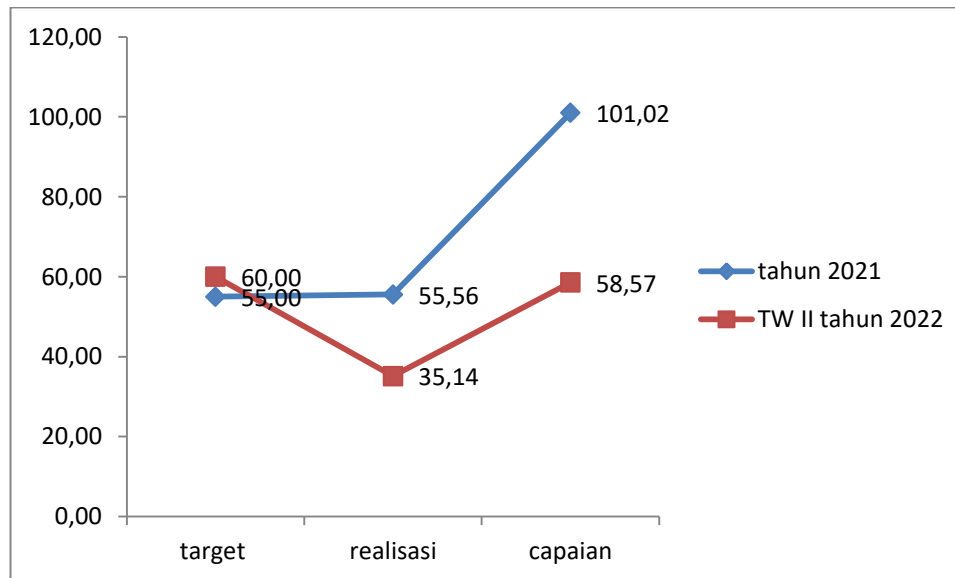
Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 35,14% bila dibandingkan dengan target triwulan II sebesar 60,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 58,57% dan masuk dalam kriteria kurang. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 35,14% bila dibandingkan dengan target Tahun

2022 sebesar 60,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 58,57% dan masuk dalam kriteria kurang. Capaian ini harus ditingkatkan, sehingga pada akhir Tahun 2022 tetap tercapai.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Tahun TA 2021



Grafik 3.1.4.3 . Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap 2022 TW II Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan TA 2022 TW II dibandingkan dengan realisasi dan capaian 2021 mengalami kenaikan, dimana realisasi 2021 sebesar 55,56% dari target sebesar 55,00% dengan capaian sebesar 101,01% (baik) sedangkan realisasi 2022 TW II sebesar 35,14% dari target sebesar 60,00% dengan pencapaian sebesar 58,57% (sangat kurang). Hasil ini menunjukkan berkurangnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dan hal ini harus ditingkatkan sehingga target hingga akhir tahun tetap tercapai.

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi TW II 2022	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	65,00	35,14	58,57%	kurang

Tabel 22.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2022 terhadap tahun terakhir Renstra

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang Tahun 2022 TW II dibandingkan dengan target renstra 2024 sebesar 65 %, dengan realisasi sebesar 35,14% dan pencapaian sebesar 58,57% dengan kriteria kurang. Dari hasil ini masih diperlukan usaha untuk mencapai target renstra hingga 2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

1. Kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan dan pemenuhan persyaratan CPPOB meningkat, baik MD maupun IRTP.
2. Telah dilakukan penyamaan persepsi antar inspektur pangan dalam menetapkan kategori temuan, sehingga keputusan terhadap hasil pemeriksaan dapat seragam.

f. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Pangan yang telah diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota telah cukup memberikan manfaat kepada pelaku usahan dalam melakukan perbaikan guna pemenuhan CPPOB-IRTP.
2. Bimtek yang dilaksanakan oleh BPOM cukup optimal dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terkait penerapan CPPOB.
3. Peningkatan kompetensi SDM Pemda Kabupaten/kota dalam menunjang efektifitas pengawasan, antara lain bimtek dan pelatihan Food Inspektur, Pelatihan DFI (*District Food Inspector*) serta pelatihan PKP (Penyuluh Keamanan Pangan).
4. Adanya WAG BBPOM di Palembang dan penanggung jawab sarana MD, sehingga menjadi wadah konsultasi bagi pelaku usaha terkait CPPOB.
5. Adanya kegiatan Bimtek dan penguatan pendampingan bagi UMKM dalam rangka mendapatkan NIE Badan POM

g. **Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

1. Telah dilakukan advokasi kepada kepala daerah dan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.
2. Monitoring dan Evaluasi indikator perbulan sudah dilakukan sehingga apabila terdapat indikator yang tidak tercapai dapat segera dilakukan tindak lanjut.

5. **Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW II 2022	Realisasi TW II 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan	66,00	69,16	104,79	Baik

Tabel 23.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2022

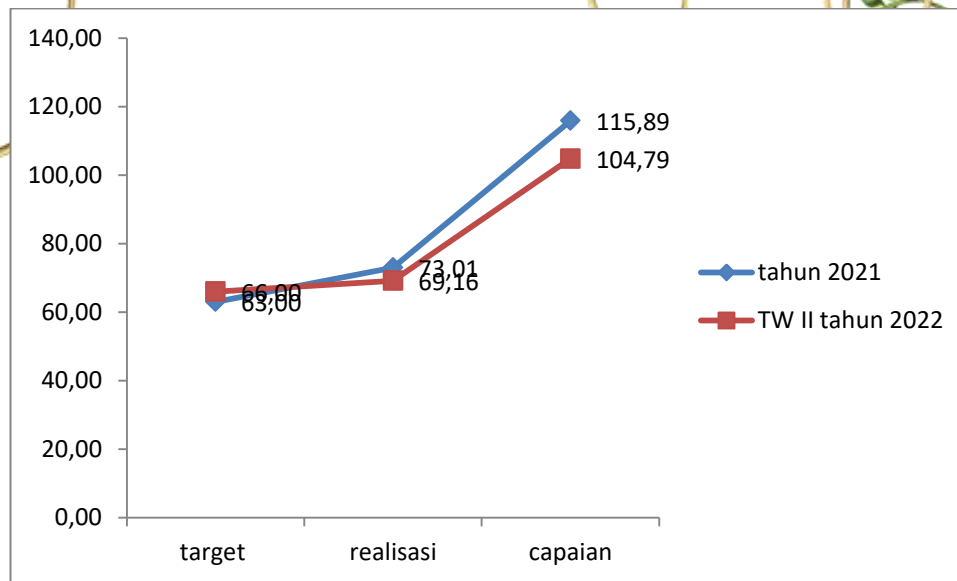
a. **Perbandingan Realisasi TW II 2022 Dengan Target TW II 2022**

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan untuk BBPOM di Palembang pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 69,16% bila dibandingkan dengan target triwulan II sebesar 66,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 104,79% dan masuk dalam kriteria Baik. Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan yang cukup baik terhadap peraturan yang berlaku. Pelaku usaha telah banyak melakukan perbaikan secara konsisten terkait temuan yang ada dalam upaya jaminan mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar

b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022**

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan untuk BBPOM di Palembang pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 69,16% bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebesar 66,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 104,79% dan masuk dalam kriteria Baik. Capaian ini akan terus dipertahankan sehingga pada TA 2022 tetap masuk dalam kategori sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Tahun TA 2021



Grafik 3.1.4.4 . Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap 2022 TW II Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan TA 2022 TW II dibandingkan dengan realisasi dan capaian 2021 mengalami kenaikan, dimana realisasi 2021 sebesar 73,01% dari target sebesar 63,00% dengan capaian sebesar 115,89% (Sangat Baik) sedangkan realisasi 2022 TW II sebesar 69,16% dari target sebesar 66,00% dengan pencapaian sebesar 104,79% (Baik). Hasil ini menunjukkan semakin baiknya tingkat kepatuhan pelaku usaha dan hal ini akan terus ditingkatkan sehingga target hingga akhir tahun tetap tercapai.

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi TW II 2022	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	71,00	69,16	97,41%	Baik

Tabel 24.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2022 terhadap tahun terakhir Renstra

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang Tahun 2022 TW II dibandingkan dengan target renstra 2024 sebesar 71 %, dengan realisasi sebesar 69,16% dan pencapaian sebesar 97,41% dengan kriteria Baik. Dari hasil ini, target renstra hingga 2024 telah tercapai, namun perlu untuk ditingkatkan sehingga mendapat kriteria Sangat Baik.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan sehingga temuan dapat menurun.
2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat sebagai dampak pengawasan dan KIE yang telah dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, termasuk aplikasi Cek BPOM dan tagline Cek KLIK sehingga temuan produk TMK di sarana distribusi semakin menurun.
3. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan di sarana distribusi Obat dan Makanan
4. Peran aktif lintas sektor terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan di sarana distribusi melalui DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan.

f. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan seperti Cara Ritel Pangan yang Baik dan Cara Distribusi Obat yang Baik, sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menjamin keamanan, mutu Obat dan Makanan di rantai distribusi.
2. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi OMKA di wilayah Sumatera Selatan, dimana setiap pemeriksaan sarana distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait
4. Adanya jaringan komunikasi, baik dengan lintas sektor ataupun penanggung jawab sarana sehingga dapat dijadikan media konsultasi dan KIE terkait Obat dan Makanan.

g. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya**

1. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui pengawasan, bimbingan teknis dan sosialisasi.
2. Peningkatan kompetensi inspektur pengawas Obat dan Makanan, melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop, seminar dan sosialisasi.
3. Intensifikasi advokasi kepada kepala daerah dan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.
4. Monitoring dan Evaluasi indikator perbulan sudah dilakukan dengan optimal.

6. **Indeks Pelayanan Publik**

Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tw II 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,20	0	0	-

Tabel 25.

Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang Triwulan II Tahun 2022

Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022 masih dalam Penilaian oleh Tim Penilai UPP Badan POM.

7. **UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT**

Indikator ini merupakan indikator yang sama sekali baru muncul di Tahun 2022.

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW 2 2022	Realisasi TW 2 2022	Capaian (%)	Kriteria
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	77	71,67	93,08	Baik

Tabel 26.

Capaian Indikator Kinerja UMKM yang di damping dalam pemenuhan standar oleh UPT Triwulan II Tahun 2022

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2022**

Realisasi UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 93,08%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2021

Indikator kinerja UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT ini sama sekali baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Adanya pembobotan penilaian setiap tahapan terhadap UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar.
2. Belum terlaksananya bimbingan teknis terhadap UMKM yang akan didampingi.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan pelatihan / bimbingan teknis dalam rangka pendampingan UMKM.
2. Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi.
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap UMKM yang akan di dampingi.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

1. Peningkatan kompetensi petugas terkait alur atau prosedur dan persyaratan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik dan Cara Produksi Kosmetik yang Baik .
2. Pemenuhan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai target.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian target.

3.1.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

**5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI
(KIE) OBAT DAN MAKANAN**

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. **Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang**

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Target Tw II 2022	Realisasi Tw II 2022	Capaian Tw II 2022	Capaian 2022 (%)	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	95,4	50	87,16	174,32%	91,36%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 27.

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang Triwulan II Tahun 2022

- a. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2022**

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 87,16 dari target sebesar 95,40 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 91,36% dengan kriteria Baik namun bila dihitung terhadap target triwulan II sebesar 50% capaian menjadi 174,32% kriteria Tidak Dapat disimpulkan.

- b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022**

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 87,16 dari target sebesar 95,40 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 91,36% dengan kriteria Baik.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun 2021

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang Triwulan II adalah 87,16, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 96,60, mengalami penurunan 9,44%. Sedangkan capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang Triwulan II adalah 91,36%, lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 102,77%.

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

Realisasi dan capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang Triwulan II adalah 87,16 bila dibandingkan dengan target tahun akhir renstra 2024 sebesar 98,3, maka capaian yang diperoleh adalah 88,66%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan :

1. Adanya komitmen penuh dari puncak pimpinan BBPOM di Palembang dalam menciptakan KIE Obat dan Makanan yang Efektif di wilayah kerja BBPOM di Palembang.
2. Tingginya Peran serta masyarakat dalam menunjang terlaksananya KIE Obat dan Makanan yang efektif.

f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2022, Balai POM di Palembang melaksanakan 6 (enam) kali kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat yang diselenggarakan dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu Layanan informasi dan pengaduan Triwulan II Tahun 2022 mencapai 16 layanan. KIE melalui media sosial, yang ditayangkan di Instagram, Facebook, dan Twitter sedangkan berita aktual yang ditayangkan di subsite Balai POM. Selain itu, KIE juga dilakukan melalui media elektronik yaitu dengan melaksanakan Talkshow di beberapa acara televisi daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif disebabkan oleh :

- Adanya program pengembangan kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
- Adanya layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga memperluas jaringan informasi ke masyarakat dan dilakukan pelayanan selama 24 jam.
 - a. Hambatan pelaksanaan program diantaranya :
 - ✓ Faktor cakupan pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk diberikan KIE.
 - b. Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:
 - ✓ KIE dilaksanakan secara online di media sosial baik berupa infografis, poster maupun dilakukan KIE live di media sosial;

g. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Peningkatan komunikasi dengan media/pers telah dilakukan dengan melaksanakan Talkshow di Televisi daerah di beberapa acara. Hal ini semakin memperluas eksistensi Balai Besar POM di Palembang di tengah masyarakat.

2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Target Tw II 2022	Realisasi TW II 2022	Capaian Tw II 2022	Capaian 2022 (%)	Kriteria
Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	59 (100%)	50 %	20%	40%	20%	Kurang

Tabel 28.

Capaian indikator Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2022

Target Sekolah Pangan Aman BBPOM di Palembang Triwulan II Tahun 2022 adalah sebanyak 50%. Realisasi Progres Tahapan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan II Tahun 2022 adalah 20% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 40%. Sampai Triwulan II Tahun 2022 sudah terlaksana beberapa tahapan kegiatan seperti advokasi lintas sektor dari seluruh kabupaten yang akan diintervensi sampai sehingga bisa memberikan kontribusi sekitar 20% dari persentase capaian kegiatan secara keseluruhan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap Target tahun 2022

Target Sekolah Pangan Aman BBPOM di Palembang Tahun 2022 adalah sebanyak 100%. Realisasi Progres Tahapan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan II Tahun 2022 adalah 20% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 40%.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun 2021

Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II adalah 20%, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 100%. Sedangkan capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II adalah 40%

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

Realisasi dan capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II adalah 20%, bila dibandingkan dengan target tahun akhir renstra 2024 sebesar 97 sekolah dan target 2022 sebesar 59 sekolah, maka capaian yang diperoleh triwulan II 2022 belum dapat dibandingkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Penyebab kegagalan :

Pelaksanaan program PJAS untuk beberapa daerah belum sesuai dengan Roadmap Program PJAS Tahun 2022

- f. **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan**
1. Belum terlaksananya rangkaian kegiatan PJAS sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan.

- g. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.**

Pengukuran Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman belum dilakukan dan program Pangan Jajanan Anak Sekolah belum dilakukan sesuai juknis, karena waktu yang bersamaan dengan kegiatan KIE tomas.

3. **Jumlah Desa Pangan Aman**

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW II 2022	Realisasi TW II 2022	Capaian Tw II 2022	Capaian 2022 (%)	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	19 (100%)	50	49,99	99,98%	49,99	Baik

Tabel 29
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2022

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2022**

Target progress tahapan program Desa Pangan Aman BBPOM di Palembang Triwulan II Tahun 2022 adalah 50% sedangkan realisasi progres tahapan Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 49,99%. Berdasarkan angka realisasi tersebut capaian yang diperoleh adalah sebesar 99,98%.

b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022**

Capaian Desa Pangan Aman BBPOM di Palembang TW II Tahun 2022 sebesar 49,99%. dengan progress tahapan kegiatan sebesar 49,99% dengan jumlah desa sebanyak 7 desa.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun lalu

Realisasi Desa Pangan Aman BBPOM di Palembang Triwulan II 2022 adalah 49,99%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi TW II tahun 2021 sebesar 49,38%. Capaian Desa Pangan Aman Triwulan II 2022 adalah 99,98%, sedangkan capaian Triwulan II tahun 2021 sebesar 197,52%.

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

Realisasi dan capaian Desa Pangan Aman BBPOM di Palembang Triwulan II 2022 adalah 49,99% bila dibandingkan dengan target tahun akhir renstra 2024 sebesar 32 desa, maka capaian yang diperoleh adalah belum dapat dibandingkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan :

- Pelaksanaan program Nasional telah mulai dilakukan pada tahapan advokasi, pelatihan kader dan bimtek komunitas desa. Kegiatan ini telah sesuai dengan roadmap Program GKPD.
- Pelaksanaan program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.

f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Terlaksananya rangkaian kegiatan GKPD sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan untuk empat kabupaten / kota.

g. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Sebanyak 7 desa telah dilakukan intervensi dengan berbagai progress tahapan untuk empat kabupaten / kota.

4. Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW II 2022	Realisasi TW II 2022	Capaian Tw II 2022	Capaian 2022 (%)	Kriteria
Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	9 (100%)	50	55	110%	55	Baik

Tabel 30.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Triwulan II Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2022

Target Capaian Progres Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya BBPOM di Palembang Triwulan II Tahun 2022 adalah 50% dan realisasi 55% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 110%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 terhadap Target tahun 2022

Capaian Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya BBPOM di Palembang Tahun 2022 sebesar 3 pasar (100%). Pada Triwulan II Tahun 2022 Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya BBPOM di Palembang sebanyak 3 pasar dengan progres tahapan kegiatan sebesar 55%.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun 2021

Realisasi Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Triwulan II 2022 adalah 55%, bila dibandingkan dengan realisasi TW II tahun 2022 sebesar 63,75%. Sedangkan capaian Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Triwulan II 2021 adalah 55% terhadap target 50%, sedangkan capaian TWII tahun 2021 sebesar 63,75% terhadap target 15%.

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

Realisasi dan capaian Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Triwulan II 2022 adalah 55% bila dibandingkan dengan target tahun akhir renstra 2024 sebesar 17 pasar, maka capaian yang diperoleh tidak dapat dibandingkan karena progress tahun 2022 sebanyak 3 pasar (akumulatif: 9 pasar) belum terealisasi 100%.

e. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan :

1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
2. Pelaksanaan program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.

f. **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

1. Terlaksananya rangkaian kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan.

g. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya**

Telah dilakukan intervensi kepada 3 pasar yang menjadi target Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dengan masing-masing progress tahapan.

3.1.6 **CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI**

6. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. **Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar**

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target Tw2 tahun 2022 (%)	Realisasi Tw 2 tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai	40	51,43	128,58%	Tidak dapat disimpulkan

standar				
---------	--	--	--	--

Tabel 31.
Capaian Indikator Kinerja Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan 2 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 Tahun 2022

Realisasi Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 51,43% dari target sebesar 40%, sehingga capaian yang diperoleh sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022 sebesar 128,58% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 51,43% dari target tahun 2022 sebesar 100%, sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan 2 Tahun 2022 terhadap target tahun 2022 sebesar 51,43%.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun lalu

Realisasi persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan 2 adalah 51,43%, lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi akhir tahun 2021 sebesar 98,38%. Sedangkan capaian persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan 2 adalah 128,58%, lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian akhir tahun 2021 sebesar 98,38%.

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

Realisasi persentase Sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan 2 adalah 51,43% bila dibandingkan dengan target tahun akhir renstra 2024 sebesar 100%, maka capaian yang diperoleh adalah 51,43%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022
2. Kesesuaian parameter uji yang dilakukan dalam proses pengujian sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022 dengan Pedoman Sampling Tahun 2022

3. Pemenuhan timeline pengujian pada triwulan 2 tahun 2022
4. Pemenuhan pemeriksaan ED dan penandaan sampel pada triwulan 2 tahun 2022

f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Koordinasi antara Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan Kelompok Substansi Pengujian terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
2. Pemilihan parameter uji dalam proses pengujian sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022 dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022
3. Peningkatan kemampuan uji Balai, termasuk di antaranya verifikasi Metode Analisa dan uji profisiensi yang dilakukan pada Triwulan 2 Tahun 2022.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengujian (alat laboratorium, reagensia dan media mikrobiologi, suku cadang, dll)
5. Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling dan pengujian Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi tenaga pengujian sangat berpengaruh pada pencapaian ini
6. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.

g. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

1. Peningkatan kemampuan uji laboratorium dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pemenuhan sarana pendukung pengujian, serta melakukan parameter uji baru untuk meningkatkan SRL.
2. Peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian.

1. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target Triwulan 2 tahun 2022 (%)	Realisasi Triwulan 2 tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	40	49,29	123,22%	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 32
Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan 2 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 Tahun 2022

Realisasi Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 49,29% dari target sebesar 40%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 123,22% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 49,29% dari target tahun 2022 sebesar 100%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 49,29%.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun lalu

Realisasi persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan 2 adalah 49,29%, lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi akhir tahun 2021 sebesar 99,38%. Sedangkan capaian persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan 2 adalah 123,22%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian akhir tahun 2021 sebesar 99,38%.

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

Realisasi persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan 2 adalah 49,29% bila dibandingkan dengan target tahun akhir renstra 2024 sebesar 100%, maka capaian yang diperoleh adalah 49,29%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. Kepatuhan terhadap Pedoman sampling Tahun 2022. Parameter uji yang dilakukan pada Triwulan 2 Tahun 2022 sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022
2. Pemenuhan timeline pengujian pada triwulan 2 tahun 2022
3. Pemenuhan pemeriksaan sampel sesuai standar, termasuk pemeriksaan terhadap ED dan penandaan sampel pada triwulan 2 tahun 2022

f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Koordinasi antara Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan Kelompok Substansi Pengujian terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengujian
3. Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling dan pengujian Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi tenaga pengujian sangat berpengaruh pada pencapaian ini
4. Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling dan pengujian tahun 2022
5. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.
6. Penindakan secara pro-justicia yang dilakukan kepada pelaku usaha melanggar peraturan, mampu memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan untuk menjual produk pangan yang berbahaya.

g. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

1. Peningkatan kemampuan uji laboratorium dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pemenuhan sarana pendukung pengujian.
2. Telah dilakukan tindak lanjut terhadap produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan, baik dengan cara dikembalikan ke produsen ataupun

dimusnahkan, sehingga produk yang beredar merupakan produk yang aman dan bermutu.

3.1.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan. Uraian Indikator Kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW-II 2022	Realisasi TW-II 2022	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	44,56%	48,00%	107,72%	Baik

Tabel 33.

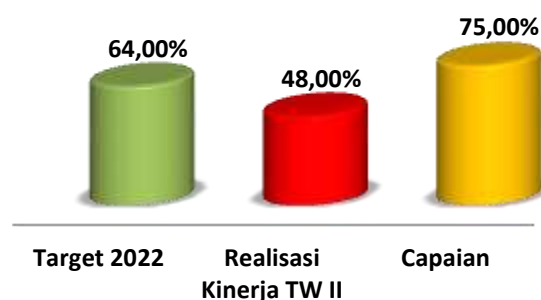
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Triwulan II Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2022

Realisasi Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan II Tahun 2022 adalah 48,00% dari target sebesar 44,56% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 107,72% dengan kriteria Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 terhadap Target tahun 2022

Realisasi Triwulan II terhadap Target 2022



Grafik 3.1.7.1

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 terhadap Tahun 2022

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah 48,00%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 64,00%, maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 75,00%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Tercapainya target kinerja pada Triwulan II Tahun 2022 disebabkan oleh keberhasilan Kelompok Substansi Penindakan dalam menemukan kasus tindak pidana kejahatan obat dan makanan di bulan Mei 2022 dan adanya laporan informasi tindak pidana kejahatan obat dan makanan dari Direktorat Intelijen Badan POM RI pada bulan Juni 2022.

Namun, dalam mencapai kinerja selama Triwulan II Tahun 2022, BBPOM di Palembang masih menemukan kendala sebagai berikut:

- a. Meskipun ada berkas perkara *carry over* yang dapat dilanjutkan ke tahap II (penyerahan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Tinggi), namun masih ada berkas perkara *carry over* lain yang tidak dapat dilanjutkan karena tersangka dan calon tersangka tidak diketahui keberadaannya dan ada berkas perkara *carry over* P19 yang tidak dapat dipenuhi petunjuk dari JPU karena saksi yang akan di BAP melarikan diri.
- b. Keterbatasan kemampuan investigasi untuk menemukan target penjahat dengan nilai ekonomi besar.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja Substansi Penindakan ditunjang program / kegiatan yang terlaksana dengan baik, yaitu:

- a. Dalam proses pemberkasan, dilakukan upaya persuasif agar tersangka dan calon tersangka dapat memenuhi panggilan selama proses penyidikan.

- b. Melakukan tindak lanjut dari laporan informasi yang disampaikan ke Substansi Penindakan
 - c. Melakukan operasi penindakan walaupun ada dugaan tidak termasuk kategori penjahat.
 - d. Melakukan koordinasi/konsultasi dalam melaksanakan Penyidikan Bersama mulai dari Operasi Penindakan.
 - e. Briefing kepada petugas pendamping terkait upaya yang perlu dilakukan pada saat di TKP.
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang rutin dilaksanakan.
- e. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.**
1. Kerjasama lintas sektor penegakan hukum tetap dilakukan secara intensif antara lain berupa konsultasi secara rutin dalam penanganan berkas perkara dengan Korwas PPNS Polda Sumsel, JPU Kejati Sumsel, PN Palembang, dan Rupbasan Palembang.
 2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut secara rutin terhadap rencana dan kegiatan yang telah dilakukan.

3.1.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

8. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG YANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja utama yaitu :

1. **Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang**

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW2 2022	Realisasi TW2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	83,90	0	0	0	-

Tabel 34.

Capaian indikator Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW2 TA 2022

Realisasi Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 0 dari target 2022 sebesar 83,90 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 0%.

Capaian Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2021 sebesar 100,05% (Target: 82,90 dan Realisasi: 82,94). Pada Triwulan II Tahun 2022 capaian Indeks RB belum dapat dihitung karena baru akan dihitung pada akhir tahun.

2. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Pada akhir Triwulan II Tahun 2022 sudah ada nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang, yaitu hasil evaluasi Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Lapkin BBPOM di Palembang TA 2020.

Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW2 2022	Realisasi TW2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	80,90	0	0	0	-

Tabel 35.

Capaian indikator Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW2 TA 2022

Realisasi Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 0 dari target 2021 sebesar 80,90 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 0%.

Capaian Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2021 sebesar 97,11% (Target: 79,9 dan Realisasi: 78,87). Pada Triwulan II Tahun 2022 capaian Indeks RB belum dapat dihitung karena baru akan dihitung pada akhir tahun.

3.1.9 CAPAIANSASARAN KEGIATAN IX

9. TERWUJUDNYA SDM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG YANG BERKINERJA OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Adapun Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW2 2022	Realisasi TW2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	84,75	0	0	0	

Tabel 36.
Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2022

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 0 dari target 2022 sebesar 84,75 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 0%.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2022 sebesar 99,69% (Target: 84,5 dan Realisasi: 84,24). Pada Triwulan II Tahun 2022 capaian Indeks Profesionalitas ASN belum dapat dihitung karena baru akan dihitung pada akhir tahun.

3.1.10 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN X

10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. **Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP**

Penilaian indikator ini akan dilakukan oleh P3OMN pada triwulan ke 4.

2. **Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal**

Target, Realisasi dan Capaian dari indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW2 2022	Realisasi TW2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,25	1,900	2,9	152,63	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 37.

Capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal TW 2 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 Tahun 2022

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Palembang yang optimal sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 2,9 dari target sebesar 2,25, sehingga capaian yang diperoleh adalah 152,63% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Palembang yang optimal sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022 adalah 2,9 dari target sebesar 2,25, sehingga capaian yang diperoleh adalah 128,89% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun lalu

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Palembang yang optimal Triwulan 2 2022 adalah 2,9 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 1,95. mengalami peningkatan indeks sebesar 0,95. Sedangkan capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Palembang yang optimal Triwulan 2 adalah 128,89%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 97,50%.

d. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra 2024

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Palembang yang optimal Triwulan 2 adalah 2,9 bila dibandingkan dengan target tahun akhir renstra 2024 sebesar 3,00 maka capaian yang diperoleh adalah 96,67%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Ada beberapa hal yang menyebabkan naiknya Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi :

- a. Pemanfaatan SIPT walaupun sudah seoptimal mungkin namun masih perlu dioptimalkan lagi karena nilai indeks= 1 dan masih ada keluhan di bidang pengujian:
 - Telah dilakukan proses pelaporan hasil pengujian bulan Januari s/d Maret 2022 melalui SIPT versi 3.0 tetapi masih terkendala karena system SIPT belum seluruhnya siap
 - Telah dilakukan inventarisir masalah-masalah yang dihadapi selama penggunaan SIPT versi 3.0 dan telah dilaporkan ke Pusdatin melalui admin SIPT BBPOM Palembang.
- b. Pengelolaan Data melalui SPIMKER sudah berjalan walaupun informasi yang didapat secara manual, petugas infokom yang akan menginput di aplikasi SPIMKER.
- c. Pemanfaatan Email corporate sudah cukup optimal dengan indeks: 3.
- d. Sudah optimalnya pemanfaatan sharing folder sebagai salah satu sumber informasi dengan realisasi 3 indeks pemanfaatannya.
- e. Penggunaan BOC sudah optimal dengan nilai indeks 3
- f. Pemanfaatan Berita Aktual juga sudah baik pada indeks 3 walau masih perlunya peningkatan jumlah upload berita aktual terkait kegiatan Balai dalam Waktu 1 (satu) bulan. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan stakeholder eksternal. Seperti KIE, talkshow, bimtek, workshop dan lain sebagainya.
- g. Nilai SPIMKER indeksnya masih stabil di posisi 3.

Sejauh ini solusi yang telah dilakukan antara lain:

- Untuk SIPT telah dilakukan inventarisir masalah-masalah yang dihadapi selama penggunaan SIPT versi 3.0 dan telah dilaporkan ke Pusdatin melalui admin SIPT BBPOM Palembang.
- Lebih mengintensifkan penggunaan data dan informasi dari sharing folder BPOM, Dashboard BOC dan email corporate.
- Lebih meningkatkan publikasi pemberitaan melalui website Badan POM dan subsite BBPOM di Palembang

f. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Kegiatan-kegiatan seperti pemeriksaan sarana produksi, distribusi, pengawasan iklan, sampling dan pengujian tetap dilakukan secara konsisten dan tepat waktu diinput ke aplikasi SIPT.
2. Tetap aktif memanfaatkan email corporate, spimker, sharing folder dan Dashboard BOC.
3. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi pengelolaan data & informasi
4. Telah dibentuk Wag Medsos untuk memantau ketepatan dan kesiapan kelompok/subkelompok dalam memberitakan kegiatan strategis yang telah dilakukan selama 1x24 jam.

g. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Rekomendasi perbaikan kinerja Indeks Pengelolaan Data & Informasi rekomendasi pada tahun 2021 adalah Meningkatkan sosialisasi website BPOM, HALO BPOM dan media sosial lainnya (IG, Twitter, Facebook) sudah dilakukan namun perlu dipikirkan lagi strategi yang bersifat sinergi untuk meningkatkan nilai indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Palembang.

3.1.11 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN XI

11. TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG SECARA AKUNTABEL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW2 2022	Realisasi TW2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	98,70	55,00	75,63	137,51	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 38.

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan II Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 Tahun 2022

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW2 tahun 2022 adalah 75,63% dari target sebesar 55% sehingga capaian yang diperoleh pada TW2 tahun 2022 sebesar 137,51% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN.

b. Perbandingan Realisasi TW2 Tahun 2022 terhadap target tahun 2022

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW2 tahun 2022 adalah 75,63% dari target tahun 2022 sebesar 98,70% sehingga capaian yang diperoleh pada TW2 tahun 2022 sebesar 76,62% dengan kriteria CUKUP.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian TW2 Tahun 2022 terhadap realisasi tahun 2021

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW2 tahun 2022 adalah 75,63% dengan capaian 137,51% dari target TW2 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 89,94% dengan target sebesar 94 sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2022 TW2 sebesar 84,09% dengan kriteria CUKUP.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Nilai Kinerja Anggaran merupakan gabungan dari nilai IKPA dan nilai EKA, di mana capaian untuk masing - masing nilai tersebut adalah sebagai berikut :

a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan data OMSPAN nilai IKPA BBPOM di Palembang TW2 tahun 2022 sebesar 97,84%, telah dilakukan monev secara berkala terhadap capaian dari 13 indikator penilaian IKPA (revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP dan TUP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output). Ada beberapa indikator yang tidak tercapai optimal, yaitu :deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP dan TUP dan pengembalian/kesalahan SPM.

b. Nilai Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai Besar POM di Palembang TW1 tahun 2022 sebesar 60,82. Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palembang untuk meningkatkan Nilai EKA, antara lain :

1. Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA serta meningkatkan capaian output kegiatan Balai Besar POM di Palembang.
2. Melakukan refocusing dan realokasi belanja untuk penghematan anggaran.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Melakukan secara lebih cermat kegiatan-kegiatan yang ada di Keuangan seperti: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output.
2. Melakukan perbaikan terhadap nilai EKA yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi.

f. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja BBPOM di Palembang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan hal ini sudah dilakukan namun lebih intensif terhadap indikator-indikator kinerja yang capaiannya masih kurang optimal (Capaian <70%).

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan TW 2 Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang memperoleh anggaran sebesar Rp.30.567.108.000,-. (Dalam nilai ini ada blokir anggaran sebesar Rp.2.275.369.000).

Jenis Belanja	PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
Belanja Pegawai	Rp 11.225.500.000	Rp 5.381.925.196	47,94%
Belanja Barang	Rp 15.740.163.000	Rp 6.863.169.378	43,60%
Belanja Modal	Rp 3.601.445.000	Rp 2.661.765.759	73,91%
Total Belanja	Rp 30.567.108.000	Rp 14.906.860.333	48,77%

Tabel 39.
Realisasi Anggaran TW 2 Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja 2022

Realisasi dan capaian anggaran tiap indikator kegiatan Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	487.649.000	314.829.916	64,56%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	255.042.500	95.584.765	37,48%
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	487.649.000	314.829.916	64,56%
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	282.609.500	102.265.890	36,19%
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	27.567.000	6.681.125	24,24%
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT	135.000.000	30.431.680	22,54%
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	167.878.600	66.405.163	39,56%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	198.105.000	41.988.162	21,19%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	55.511.800	45.186.704	81,40%

4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	57.300.200	22.364.275	39,03%
		Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	57.300.200	22.364.275	39,03%
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	267.200.000	48.463.196	18,14%
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	83.490.000	50.639.310	60,65%
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	458.401.600	178.914.202	39,03%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	66.800.000	12.115.799	18,14%
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	101.431.000	14.482.000	14,28%
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	1.832.040.000	994.389.285	54,28%
		Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	671.514.400	265.620.652	39,56%
		Jumlah Desa Pangan Aman	792.420.000	167.952.650	21,19%
		Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	222.047.200	180.746.814	81,40%
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	1.544.400.000	596.371.917	38,62%
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	1.029.600.000	397.581.278	38,62%
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	850.009.000	166.730.383	19,62%
8	Terwujudnya Tatakelola	Indeks RB UPT	3.531.037.400	1.812.368.598	51,33%

	Pemerintahan BBPOM di Palembang yang Optimal	Nilai AKIP UPT	3.531.037.400	1.812.368.598	51,33%
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	3.531.037.400	1.812.368.598	51,33%
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	2.780.955.000	1.691.384.060	60,82%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	3.531.037.400	1.812.368.598	51,33%
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	3.531.037.400	1.812.368.598	51,33%

Tabel 40.
Realisasi Anggaran Tiap Indikator Kegiatan Triwulan II Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan TW2 tahun 2022 belum semua capaiannya dapat dihitung pada TW2 tahun 2022, yang dapat dihitung ada 7(tujuh) Sasaran Kegiatan TW2 tahun 2022 . Adapun hasil penilaian capaiannya sebagai berikut :

1. Baik

1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.
2. Sasaran Kegiatan 5 “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang”.
3. Sasaran Kegiatan 7 yaitu ” Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang”.

2. Tidak Dapat Disimpulkan

1. Sasaran Kegiatan 6 “Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
2. Sasaran Kegiatan 10 yaitu “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan”.
3. Sasaran Kegiatan 11 yaitu Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel.

3. CUKUP

Sasaran Kegiatan 4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan sebesar sebesar 48,77% (Rp. 14.906.860.333) dari Rp.30.567.108.000 Anggaran Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang diwujudkan melalui 11 kegiatan dengan realisasi anggaran per kegiatan berkisar antara 14,28% sampai dengan 81,40%.

4.2 Saran

BBPOM di Palembang terus berkomitmen meningkatkan kinerja, tindak lanjut yang dilakukan, antara lain :

- a. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Balai Besar POM di Palembang serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
- d. Melakukan review target berdasarkan capaian kinerja pada TW2 tahun 2022.
- e. Melakukan update data sarana produksi dan distribusi sebagai data dukung pengawasan sarana berbasis risiko untuk memperluas cakupan pengawasan serta potensi kejahatan obat dan makanan.
- f. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja BBPOM di Palembang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan.
- g. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Palembang.
- h. Berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;
- i. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- j. Meningkatkan inovasi layanan publik dalam rangka percepatan perizinan Obat dan Makanan.

- k. Meningkatkan internalisasi dan komitmen seluruh pegawai dalam penerapan Zona Integritas Menuju WBK WBBM di lingkungan BBPOM di Palembang.
- l. Meningkatkan sosialisasi *website* BPOM, HALO BPOM dan media sosial lainnya (IG, Twitter, Facebook);
- m. Mengaktifkan kembali Tim Medsos dan IT BBPOM di Palembang dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal.
- n. Melakukan pengujian terhadap parameter uji yg belum pernah dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan Standar Ruang Lingkup Balai



BADAN POM

***LAMPIRAN
LAPORAN
KINERJA
TRIWULAN II
TAHUN 2022***

**BALAI BESAR POM
DI PALEMBANG**



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.6A.6A51.12.21.261 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
- b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TAHUN 2020-2024.

Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua...

- Kedua : Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 13 Desember 2021
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,



M. SUHENDRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG
NOMOR HK.02.02.6A.6A51.12.21.261 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor: HK.02.02.9.96.05.20.1490a tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang perlu melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024;

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target.

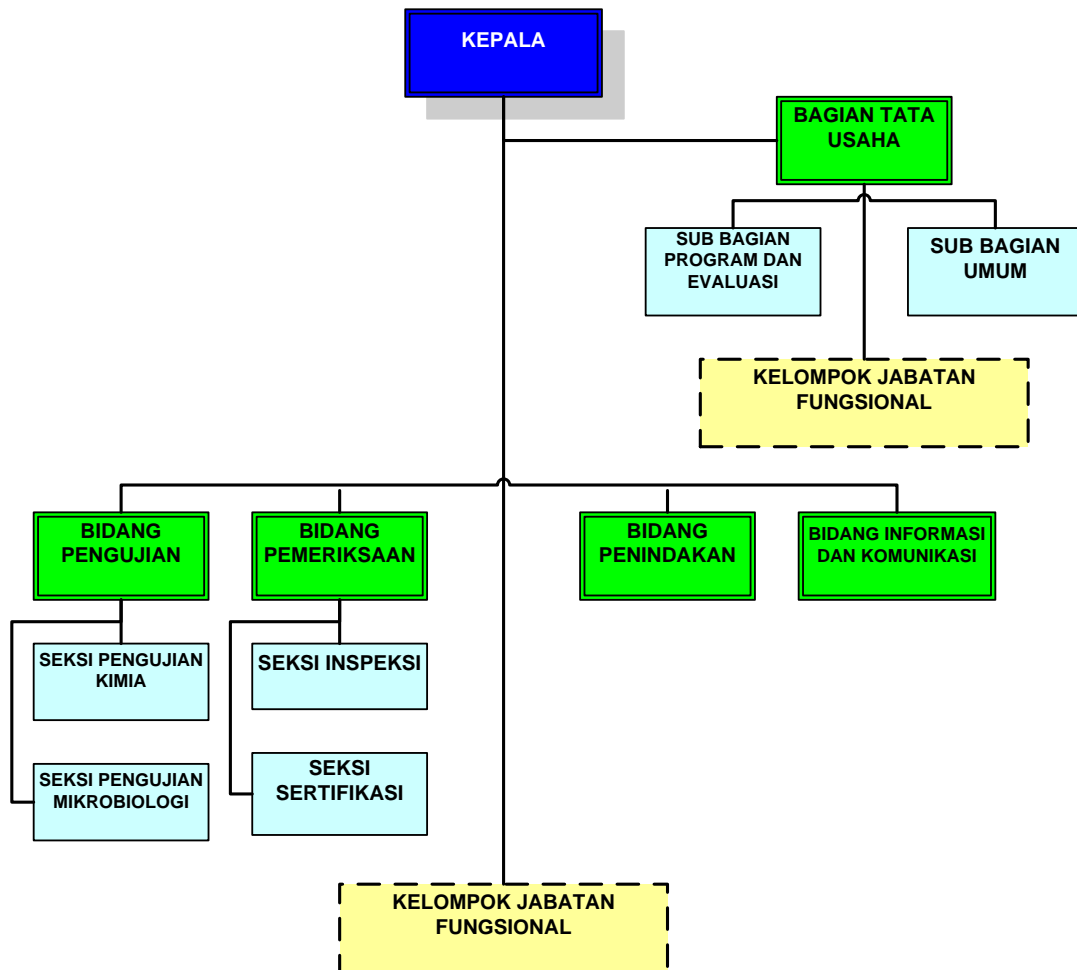
BAB II

HASIL REVIU RENCANA STRATEGI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan

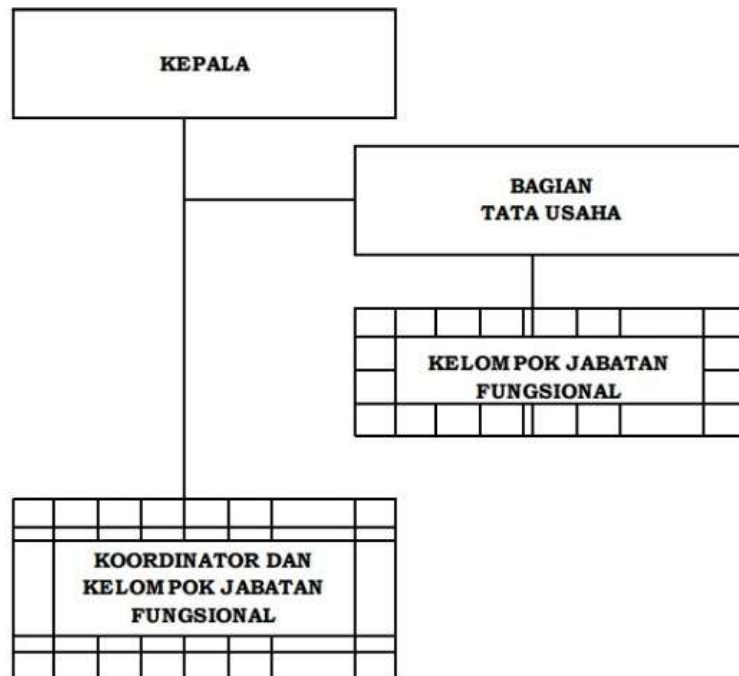
1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Palembang

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan BPOM. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud, sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM



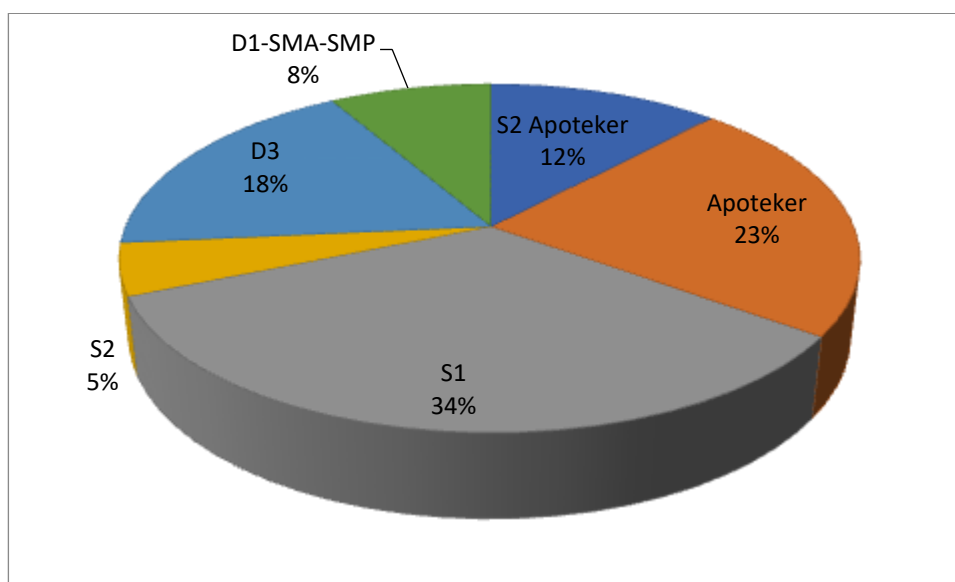
Gambar 2. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas terlihat perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang semula terdiri atas: a. Kepala; b. Bidang Pengujian; c. Bidang Pemeriksaan; d. Bidang Penindakan; e. Bidang Informasi dan Komunikasi; f. Bagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional berubah menjadi organisasi Balai Besar POM di Palembang yang terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja

Pada Renstra BPOM 2020-2024, Balai Besar POM di Palembang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja di mana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai pada saat itu dibutuhkan pegawai sebanyak 181 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis BPOM mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM BPOM. Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Oktober 2021 sejumlah 83 orang dengan proporsi 73,49% perempuan dan 26,51% laki-laki yang tersebar di masing-masing kelompok/subkelompok substansi dan bagian di Balai Besar POM di Palembang. Jumlah SDM BBPOM di Palembang tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, Balai Besar POM di Palembang memerlukan SDM sebesar 181 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 98 orang. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang.



Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa proporsi S1 dan Profesi apoteker masih mendominasi. Balai Besar POM di Palembang sebagai organisasi yang scientific based seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Palembang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

3. Capaian Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra BPOM 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80,80	91,19	112,86
		2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78,00	86,52	110,92
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00	95,09	100,09
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	79,66	106,21
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	72	78,14	108,53
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,67	101,94

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	7.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	74,24	104,56
		8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	91,74	102,50
4.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	9.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	87	98,87	113,64
		10.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	55	63,76	115,93
		11.	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	100	117,65
		12.	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	50	20,62	41,24%
		13.	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	61,80	103,00
		14.	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	3,51	3,80	108,26
5.	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi,	15.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,69	93,79	103,42

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	16.	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100
		17.	Jumlah Desa Pangan Aman	4	4	100
		18.	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2	2	100
6.	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	19.	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	82	95,88	116,93
		20.	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	75	98,81	131,75
7.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	21.	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	52	56,74	109,12
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	22.	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85	81,72	96,14
		23.	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81	78,87	97,37

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Berkinerja Optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	75	85,29	113,72
10.	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	70	70,50	100,71
		26. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	1,51	2,5	165,56
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93	97,86	105,23
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (90%)	Efisien (100%)	111,11

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Balai Besar POM di Palembang melebihi 100 persen, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Merujuk pada tabel 1, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh dengan kinerja BBPOM di Palembang selain adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Palembang dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna

mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat dan Makanan.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, Balai Besar POM di Palembang juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, antara lain:

- Mengawal vaksin COVID-19 terkait keamanan dan mutu vaksin COVID-19 selama peredaran, antara lain inspeksi sarana/ pengawasan sarana distribusi.
- Pembangunan Laboratorium *Biohazard Standard Laboratory (BSL) 2* yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melaksanakan pengujian COVID-19.
- Uji cepat menggunakan *rapid test* untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh P3OMN di pusat sebagai koordinator dan 33 laboratorium BB/BPOM yang telah terakreditasi.

4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam Renstra Balai Besar POM di Palembang 2020-2024, Balai Besar POM di Palembang telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Palembang dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra BBPOM di Palembang tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pandemi Covid-19

Potensi:

- 1) Peran BBPOM di Palembang sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.

- 2) Peran BBPOM di Palembang dibutuhkan dalam mengawal penggunaan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19.

Permasalahan:

- 1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi BBPOM di Palembang masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan *pengujian Covid dan Obat Covid*.
 - 2) Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BBPOM di Palembang dalam intensifikasi pengawasan baik *postmarket* obat-obatan tersebut.
- b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BBPOM di Palembang sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BBPOM di Palembang mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

- 1) **Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”**
Kontribusi BPOM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT)*.
- 2) **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”**
Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM ikut berperan aktif dalam Penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*).
- 3) **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”**
khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme

rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BBPOM di Palembang; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

- 4) **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM dapat berkontribusi melalui mendukung penuh penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

Permasalahan:

- 1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah.
- 2) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
- 3) Masih terbatasnya kapasitas BBPOM di Palembang dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem informasi yang andal.

B. Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar POM di Palembang** karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM sebagai berikut:

Tabel 2. Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Visi BPOM 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi BPOM 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
Tujuan BPOM 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja BPOM, sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Balai Besar POM di Palembang 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		
		3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		

	2. Meningkatkan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan	1. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	pada UMKM	2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	1. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
		2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		
		3. Meningkatnya	1. Persentase		

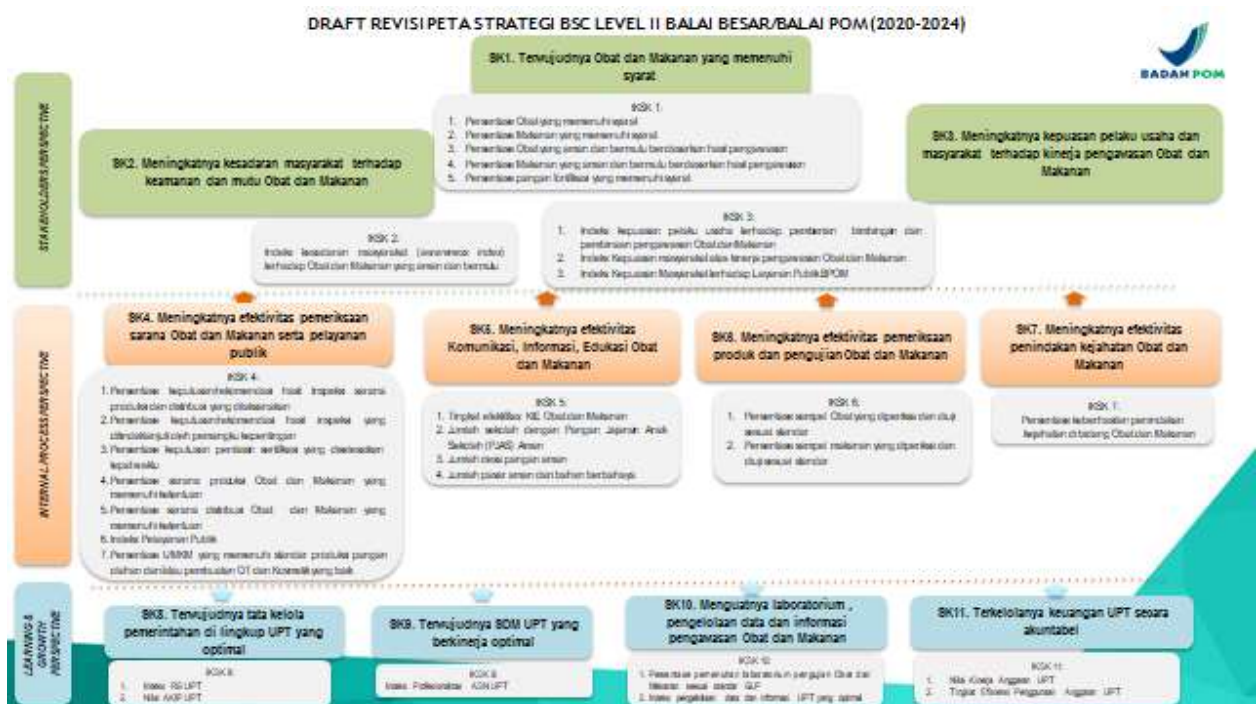
	efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
	4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

	masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.			kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	1. Indeks RB UPT 2. Nilai AKIP UPT		
		4. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT *)		

Keterangan: *) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021

3. Sasaran Strategis dan IKU Balai Besar POM di Palembang

Tidak ada perubahan peta strategi BPOM yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024 karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang, namun demikian dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja IKU BBPOM di Palembang yang akan dijelaskan lebih rinci dalam poin D mengenai Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Adapun sasaran strategis dan IKU BBPOM di Palembang tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi BBPOM di Palembang sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Strategi Balai Besar POM di Palembang 2020-2024

C. Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

1. Arah Kebijakan BBPOM di Palembang

Dalam hal arah kebijakan Balai Besar POM di Palembang, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan BBPOM di Palembang, sebagai berikut:

- a. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.

- b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BBPOM di Palembang harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**”.
- c. Perubahan tata urut Arah Kebijakan BBPOM di Palembang sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BBPOM di Palembang Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BBPOM di Palembang sesuai dengan Perubahan Arahan BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan	4. Peningkatan pemahaman,

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Strategi BBPOM di Palembang

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BBPOM di Palembang sesuai Strategi BPOM, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urutan strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urutan Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi BBPOM di Palembang mengacu pada perubahan strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. Perubahan Strategi BPOM 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber , intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BBPOM di Palembang, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra BBPOM di Palembang 2020-2024. Kedua kerangka tersebut

masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi BBPOM di Palembang dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Kinerja BBPOM di Palembang yang digambarkan dalam **Peta Strategi Level 2 BPOM, tidak terdapat perubahan** pada level sasaran strategis namun pada level indikator ada yang bertambah seperti Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan ada yang dihilangkan yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang serta **dilakukan penyesuaian target kinerja** dengan menggunakan baseline baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Dari 28 (dua puluh delapan) IKU BPOM sebelumnya, secara umum target tetap dan meningkat dan saat ini dengan bertambahnya 2(dua) indikator kinerja dan berkurangnya 1(satu) indikator kinerja total indikator menjadi 29(dua puluh sembilan) Indikator kinerja utama. Namun demikian **terdapat target indikator yang turun**, antara lain:

- a. **Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar POM di Palembang**, di mana penurunan target disebabkan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan mengubah jabatan administrasi (Eselon III dan Eselon IV) menjadi jabatan fungsional (JF). Implikasi yang terjadi karena adanya kebijakan kompetensi JF Madya yang disetarakan dengan standar kompetensi Eselon II, hal ini menyebabkan adanya gap yang lebih tinggi lagi dibanding standar yang telah disusun di awal (2020).
- b. **Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**, di mana penurunan target di sebabkan baseline data tahun 2020 kenaikan indeks tidak terlalu tinggi sehingga progress dari tahun ke tahun perlu diturunkan agar capaiannya maksimal di tahun 2024, namun hal ini dapat direviu kembali di tahun 2022.

- c. **Persentase Saran Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**, di mana penurunan target disebabkan capaian tahun 2020 jauh dibawah target diakibatkan banyaknya sarana industri rumah tangga pangan yang masih perlu dibina agar memenuhi ketentuan.
- d. **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dimasing-masing wilayah kerja BPOM di Palembang**, hal ini karena pada tahun 2020 terjadi penurunan target karena refocusing anggaran pada masa pandemi sehingga capaian target kumulatif diturunkan disesuaikan dengan penurunan umlah sekolah di tahun 2020.
- e. **Indeks RB dan Nilai AKIP**. Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) BPOM Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	80,8	83,6	86,6	90	92,3	91,19	91	91,5	92	92,5
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	78	80	82	84	86	86,52	86,5	88	89,5	91
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	95	95	96	96	97	95,09	95	96	96,5	97
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	75	76	77	78	80	79,66	80	82	83	85
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-	-	91	92	93	94
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang	72	75	78	81	83	78,14	81	84	86	89

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)				
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87	88	89	90	87,67	88,8	89,9	91	92,1	
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	74,24	75,68	77,12	78,57	80,01	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	90	90,5	91	92	91,74	91,75	92	92,5	93	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87	89	91	93	95	98,87	99	99,5	100	100	
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	55	60	65	70	75	63,76	60	65	70	75	
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	85	88	91	94	97	100	100	100	100	100	
	<i>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>60</i>	<i>65</i>	<i>70</i>	<i>20,62</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>60</i>	<i>65</i>	

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)				
	<i>Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	60	63	66	68	71	61,80	63	66	68	71	
	Indeks Pelayanan Publik						3,80	3,99	4,18	4,36	4,55	
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							-	77	79	81	
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	71	74	77	81	84	93,79	94	95,4	96,8	98,3	
	<i>Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang</i>	20	40	62	82	104	16	40	59	78	97	
	<i>Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang</i>	6	12	19	25	32	4	12	19	25	32	
	<i>Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang</i>	3	6	9	13	17	2	6	9	13	17	

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	<i>Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	82	85	88	91	94	95,88	100	100	100	100
	<i>Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	75	77	80	83	85	98,81	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	<i>Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan</i>	52	58	64	69	75	56,74	58	64	69	75
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	<i>Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang</i>	85	89	93	94	95	81,72	82,9	83,9	84,9	85,9
	<i>Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang</i>	81	85	90	91	92	78,87	79,9	80,9	81,9	82,9
Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	75	82	85	88	91	85,29	84,5	84,75	85	85,25
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90	70,50	77	82	87	92
	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	1,51	2	2,26	2,5	3	2,5	2	2,25	2,5	3

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
	yang optimal										
Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93	94	95	96	97	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	97,86	98,6	98,7	98,9
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	<i>Efisien (90%)</i>	<i>Efisien (92%)</i>	<i>Efisien (94%)</i>	<i>Efisien (96%)</i>	<i>Efisien (99%)</i>	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	<i>Efisien (100%)</i>	<i>Efisien (93%)</i>	-	-

2. Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, Balai Besar POM di Palembang melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan di masing-masing program tersebut. Adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1 dan 2, berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur kegiatan BBPOM di Palembang serta munculnya kegiatan baru yang berdampak terhadap proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Palembang. Adapun perubahan kegiatan dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7. Perubahan Nomenklatur Kegiatan BBPOM di Palembang Terhadap Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Palembang

No	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
1	Kepala Bidang Pengujian	Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
2	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi	
3	Kepala Bidang Pemeriksaan	
4	Kepala Bidang Penindakan	
5	Kepala Seksi Pengujian Kimia	
6	Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi	
7	Kepala Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaaa	
8	Kepala Seksi Sertifikasi Bidang Pemeriksaan	
9	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi	Kelompok Jabatan Fungsional
10	Kepala Sub Bagian UMUM	

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan BBPOM di Palembang secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja Balai Besar POM di Palembang 2020-2024.

E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU BBPOM di Palembang serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuain dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPOM Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM sebagai berikut:

TABEL 8. MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BBPOM DI PALEMBANG
 PADA LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBPOM DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									UPT BPOM			
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang							Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang											
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	80,8	83,6	86,6	90	92,3	1	<i>Persentase Obat yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	91,19	91	91,5	92	92,5	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.	UPT BPOM		
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	78	80	82	84	86	2	<i>Persentase Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	86,52	86,5	88	89,5	91	Pro PN		UPT BPOM		
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	95	95	96	96	97	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	95,09	95	96	96,5	97			UPT BPOM		
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	75	76	77	78	80	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	79,66	80	82	83	85			UPT BPOM		

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
								5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		91	92	93	94	Pro PN	Semula merupakan indikator pada Ditwas Pangan Risiko Rendah dan Sedang (Unit Kerja OTK Lama), dipindahkan ke UPT disesuaikan dengan Unit Organisasi yang melaksanakan sampling dan pengujian pangan fortifikasi	UPT BPOM
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang							Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	72	75	78	81	83	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	78,14	81	84	86	89			UPT BPOM
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang							Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	86	87	88	89	90	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87,67	88,8	89,9	91	92,1			UPT BPOM

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target							
	2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	71	74	77	80	83		2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	74,24	75,68	77,12	78,57	80,01			UPT BPOM
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	89,5	90	90,5	91	92		3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	91,74	91,75	92	92,5	93			UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT									
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87	89	91	93	95		1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	98,87	99	99,5	100	100			UPT BPOM
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	55	60	65	70	75		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	63,76	60	65	70	75			UPT BPOM
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	85	88	91	94	97		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	100	100	100	100	100			UPT BPOM

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	50	55	60	65	70	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	20,62	55	55	60	65	Pro PN	UPT BPOM	
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	60	63	66	68	71	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	61,80	63	66	68	71	Pro PN	UPT BPOM	
								6	Indeks Pelayanan Publik	3,80	3,99	4,18	4,36	4,55	Pro PN	UPT BPOM	
								7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		-	77	79	81		Merupakan indikator baru pada UPT untuk peningkatan peran pembinaan UMKM yang selama ini secara umum telah dilakukan oleh UPT namun belum dihitung sebagai kinerja dalam indikator tersendiri	UPT BPOM
		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT							Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT								
	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	71	74	77	81	84	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	93,79	94	95,4	96,8	98,3		UPT BPOM	
	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	20	40	62	82	104	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	16	40	59	78	97	Pro PN	UPT BPOM	

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target							
	3	Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	6	12	19	25	32		3	Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	4	12	19	25	32	Pro PN		UPT BPOM
	4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	3	6	9	13	17		4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	2	6	9	13	17	Pro PN		UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94		1	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,88	100	100	100	100	Pro PN		UPT BPOM
	2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77	80	83	85		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	98,81	100	100	100	100	Pro PN		UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	52	58	64	69	75		1	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	56,74	58	64	69	75	Pro PN		UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal								Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal									
	1	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85	89	93	94	95		1	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81,72	82,9	83,9	84,9	85,9			
	2	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81	85	90	91	92		2	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	78,87	79,9	80,9	81,9	82,9			

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal								
	1	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	75	82	85	88	91		1	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85,29	84,5	84,75	85	85,25		
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								
	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90		1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan laboratorium/GLP	70,50	77	82	87	92		UPT BPOM dan PPPOMN
	2	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3		2	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	2,5	2	2,25	2,5	3		UPT BPOM
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel								
	1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93	94	95	96	97		1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	97,86	98,6	98,7	98,9	99,0		
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (94%)	Efisien (96%)	Efisien (99%)		2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (100%)	Efisien (93%)	-	-	-		

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Reviu Renstra BBPOM di Palembang dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Palembang.
- b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra BBPOM di Palembang yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra BBPOM di Palembang masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi

- a. Hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja BBPOM di Palembang serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra BBPOM di Palembang.
- b. BBPOM di Palembang selaku unit pelaksana teknis BPOM melakukan reviu Renstra Unit Organisasi Satuan Kerja mengacu pada hasil reviu Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB III PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra BBPOM di Palembang tersebut. Reviu Renstra BBPOM di Palembang dilakukan untuk menyeleraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Palembang sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang dapat teroperasionalkan dan diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan BBPOM di Palembang agar memperhatikan hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang. BBPOM di Palembang sebagai salah satu Unit Organisasi dan Satuan Kerja di Lingkungan BPOM telah melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra BBPOM di Palembang dengan memperhatikan hasil reviu Renstra BPOM. Melalui reviu Renstra BBPOM di Palembang ini, diharapkan BBPOM di Palembang terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
DI PALEMBANG,



M. SUHENDRI

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR PR.04.01.6A.6A51.12.21.260 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2022;

Peraturan ...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara

Penyusunan ...

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/
Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas

Obat ...

Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2022.
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan ...

-5-

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 13 Desember 2021
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,



M. SUHENDRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
 BESAR PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI PALEMBANG NOMOR
 PR.04.01.6A.6A51.12.21.260 TAHUN
 2021 TENTANG RENCANA KINERJA
 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 PALEMBANG TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
3	Meningkatnya kepuasan	Indeks kepuasan pelaku usaha	89,9

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,12
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,5
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik	4,20

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,4
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	59
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	9
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	64
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	83,9
		Nilai AKIP UPT	80,9
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,75
10	Menguatnya laboratorium,	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat	82

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	dan Makanan sesuai standar GLP	
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	98,7

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG,



M. SUHENDRI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Palembang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Palembang
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BBPOM di Palembang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,9

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,12
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,5
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4,20

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,4
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	59
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	19
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	9
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	64

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	83,9
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80,9
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,75
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	98,7

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
30,567,108,000.00

Palembang, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm.



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Palembang
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	487.649.000,00
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN SAMPEL	423.392.000,00	42.339.200,00	42.339.200,00	63.508.800,00	63.508.800,00	211.696.000,00	50,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT	551.906.000,00	55.190.600,00	55.190.600,00	82.785.900,00	82.785.900,00	275.953.000,00	50,00 (%)				
Total				97.529.800,00	97.529.800,00	146.294.700,00	146.294.700,00	487.649.000,00						
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	255.042.500,00	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN SAMPEL	193.235.000,00	19.323.500,00	19.323.500,00	28.985.250,00	28.985.250,00	96.617.500,00	50,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN	316.850.000,00	31.685.000,00	31.685.000,00	47.527.500,00	47.527.500,00	158.425.000,00	50,00 (%)				
Total				51.008.500,00	51.008.500,00	76.512.750,00	76.512.750,00	255.042.500,00						
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	487.649.000,00	

No.	Indikator Kinerja			Target									Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget			
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN SAMPEL	423.392.000,00	42.339.200,00	42.339.200,00	63.508.800,00	63.508.800,00	211.696.000,00	50,00 (%)			
2.	BBPOM di Palembang	A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT	551.906.000,00	55.190.600,00	55.190.600,00	82.785.900,00	82.785.900,00	275.953.000,00	50,00 (%)			
Total				97.529.800,00	97.529.800,00	146.294.700,00	146.294.700,00	487.649.000,00					
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			82	82	82	82	82	82	82	82	255.042.500,00	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget			
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN SAMPEL	193.235.000,00	19.323.500,00	19.323.500,00	28.985.250,00	28.985.250,00	96.617.500,00	50,00 (%)			
2.	BBPOM di Palembang	A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN	316.850.000,00	31.685.000,00	31.685.000,00	47.527.500,00	47.527.500,00	158.425.000,00	50,00 (%)			
Total				51.008.500,00	51.008.500,00	76.512.750,00	76.512.750,00	255.042.500,00					
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat			92	92	92	92	92	92	92	92	55.134.000,00	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget			
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN SAMPEL	26.884.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00	26.884.000,00	100,00 (%)			
2.	BBPOM di Palembang	A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN FORTIFIKASI	28.250.000,00	7.062.500,00	7.062.500,00	7.062.500,00	7.062.500,00	28.250.000,00	100,00 (%)			
Total				13.783.500,00	13.783.500,00	13.783.500,00	13.783.500,00	55.134.000,00					
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu									84	135.000.000,00		

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI PRODUK OMKABA	127.160.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00	127.160.000,00	100,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	B	AUDIENSI PIMPINAN KE KABUPATEN KOTA	7.840.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	7.840.000,00	100,00 (%)				
Total				33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	135.000.000,00						
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan								89,9	167.878.600,00				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PEMETAAN KEGIATAN TERPADU (PJAS, GKPD, PASAR AMAN)	95.349.000,00	4.767.450,00	4.767.450,00	4.767.450,00	4.767.450,00	19.069.800,00	20,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	B	BIMTEK KEAMANAN PANGAN DI SEKOLAH	103.800.000,00	5.190.000,00	5.190.000,00	5.190.000,00	5.190.000,00	20.760.000,00	20,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	C	PELATIHAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH (PBKPKS)	87.440.000,00	4.372.000,00	4.372.000,00	4.372.000,00	4.372.000,00	17.488.000,00	20,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	D	AUDIT DAN PENDAMPINGAN PIAGAM BINTANG KANTIN SEKOLAH (TAHAP II)	83.840.000,00	4.192.000,00	4.192.000,00	4.192.000,00	4.192.000,00	16.768.000,00	20,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	F	OPERASIONAL MOBLING UMUM	123.350.000,00	6.167.500,00	6.167.500,00	6.167.500,00	6.167.500,00	24.670.000,00	20,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	G	FOOD SECURITY	71.000.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	14.200.000,00	20,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	H	PENGADAAN PAKET EDUKASI	112.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	22.400.000,00	20,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	E	WORKSHOP KEAMANAN PANGAN NASIONAL DALAM RANGKA PEMBAHASAN TEKNIS INTERVENSI KEAMANAN PANGAN DI DESA, SEKOLAH DAN PASAR	14.052.000,00	702.600,00	702.600,00	702.600,00	702.600,00	2.810.400,00	20,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	A	ADVOKASI LINTAS SEKTOR TERPADU PJAS, GKPD, DAN PASAR AMAN	93.122.000,00	4.656.100,00	4.656.100,00	4.656.100,00	4.656.100,00	18.624.400,00	20,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	B	AUDIENSI LINTAS SEKTOR KEGIATAN TERPADU	5.440.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	1.088.000,00	20,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	I	Automatic Adjustment (Blokir)	50.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	20,00 (%)				
Total				41.969.650,00	41.969.650,00	41.969.650,00	41.969.650,00	167.878.600,00						
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan								77,12	198.105.000,00				
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	BIMBINGAN TEKNIS KOMUNITAS DESA	232.225.000,00	11.611.250,00	11.611.250,00	11.611.250,00	11.611.250,00	46.445.000,00	20,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	B	FASILITAS PENERAPAN KEAMANAN PANGAN OLEH KADER KEAMANAN PANGAN	21.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.200.000,00	20,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	A	PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA (KKPD)	273.311.000,00	13.665.550,00	13.665.550,00	13.665.550,00	13.665.550,00	54.662.200,00	20,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	B	PENGAMBILAN DATA DALAM RANGKA GAP ASSEMENT	27.180.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	5.436.000,00	20,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	C	TIM KEAMANAN PANGAN DESA	45.150.000,00	2.257.500,00	2.257.500,00	2.257.500,00	2.257.500,00	9.030.000,00	20,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	A	OPERASIONAL MOBLING DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMAMAMANAN PANGAN POST INTERVENSI	71.120.000,00	3.556.000,00	3.556.000,00	3.556.000,00	3.556.000,00	14.224.000,00	20,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	A	PENGAWALAN DI DESA YANG SUDAH DIINTERVENSI KEAMANAN PANGAN TAHUN 2020	77.220.000,00	3.861.000,00	3.861.000,00	3.861.000,00	3.861.000,00	15.444.000,00	20,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	B	MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN TERPADU (PJAS, GKPD DAN PASAR AMAN)	104.750.000,00	5.237.500,00	5.237.500,00	5.237.500,00	5.237.500,00	20.950.000,00	20,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	C	LOMBA PANGAN DESA AMAN	22.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	4.500.000,00	20,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	D	PEMETAAN DISTRIBUSI KERACUNAN OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA	12.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00	20,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	E	PEMBERDAYAAN UMKM UMUM MENDORONG PIRT MENJADI MD	17.550.000,00	877.500,00	877.500,00	877.500,00	877.500,00	3.510.000,00	20,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	F	FGD KOORDINASI DAN PEMANTAPAN TAHUBJA DENGAN LINTAS SEKTOR	24.890.000,00	1.244.500,00	1.244.500,00	1.244.500,00	1.244.500,00	4.978.000,00	20,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	G	PELATIHAN AUDITOR PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH (PBKPKS) BAGI PETUGAS	11.112.000,00	555.600,00	555.600,00	555.600,00	555.600,00	2.222.400,00	20,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	D	Automatic Adjustment (Blokir)	43.177.000,00	2.158.850,00	2.158.850,00	2.158.850,00	2.158.850,00	8.635.400,00	20,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	H	Automatic Adjustment (Blokir)	7.340.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	1.468.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
Total				49.526.250,00	49.526.250,00	49.526.250,00	49.526.250,00	198.105.000,00						
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM								92	55.511.800,00				
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	BIMTEK PETUGAS PASAR	53.360.000,00	2.668.000,00	2.668.000,00	2.668.000,00	2.668.000,00	10.672.000,00	20,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	A	PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR	51.249.000,00	2.562.450,00	2.562.450,00	2.562.450,00	2.562.450,00	10.249.800,00	20,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	A	PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	70.600.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	14.120.000,00	20,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	A	LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA PENGAWASAN PANGAN BULAN PUASA	102.350.000,00	5.117.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	20.470.000,00	20,00 (%)				
Total				13.877.950,00	13.877.950,00	13.877.950,00	13.877.950,00	55.511.800,00						
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			25	75	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	57.300.200,00
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGENDALIAN ANTI-MICROBIAL RESISTANCE (AMR) MELALUI PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR SERTA PENERTIBAN PEREDARAN ANTIBIOTIKA	9.730.000,00	0,00	486.500,00	0,00	486.500,00	973.000,00	10,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	B	BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR DI BIDANG OT DAN SK (Lanjutan/ Topik Khusus)	4.036.000,00	0,00	201.800,00	0,00	201.800,00	403.600,00	10,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	C	PEER INSPECTION CPOB	29.384.000,00	0,00	1.469.200,00	0,00	1.469.200,00	2.938.400,00	10,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
4.	BBPOM di Palembang	D	BIMBINGAN TEKINS INSPEKTUR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN (Dasar)	4.296.000,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00	429.600,00	10,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	E	BIMTEK CPOTB TOPIK KHUSUS	4.296.000,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00	429.600,00	10,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	F	FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR CPOTB DALAM MEMPERKUAT PENGAWASAN	10.888.000,00	0,00	544.400,00	0,00	544.400,00	1.088.800,00	10,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	G	PUBLIKASI HASIL PENGAWASAN OMKABA	10.650.000,00	0,00	532.500,00	0,00	532.500,00	1.065.000,00	10,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	H	SOSIALISASI REGULASI DI BIDANG OBA	750.000,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	75.000,00	10,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	I	PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK (Jakarta)	8.072.000,00	0,00	403.600,00	0,00	403.600,00	807.200,00	10,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	J	PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK (Jakarta)	52.614.000,00	0,00	2.630.700,00	0,00	2.630.700,00	5.261.400,00	10,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI PROP SUMSEL	273.462.000,00	0,00	13.673.100,00	0,00	13.673.100,00	27.346.200,00	10,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	B	JOIN INSPECTION CPOTB	13.336.000,00	0,00	666.800,00	0,00	666.800,00	1.333.600,00	10,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	C	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING	11.388.000,00	0,00	569.400,00	0,00	569.400,00	1.138.800,00	10,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	D	PENGAWASAN TERPADU BAHAN BERBAHAYA DI PROVINSI DAN KAB/KOTA	32.620.000,00	0,00	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	3.262.000,00	10,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	E	PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR	52.240.000,00	0,00	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00	5.224.000,00	10,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	F	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA DALAM RANGKA DETEKSI DINI OBAT PALSU,TINDAK LANJUT PUBLIC WARNING (KASUS)	55.240.000,00	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	5.524.000,00	10,00 (%)				
Total				0,00	28.650.100,00	0,00	28.650.100,00	57.300.200,00						
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			25	50	65	65	65	65	65	65	65	57.300.200,00	

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGENDALIAN ANTI-MICROBIAL RESISTANCE (AMR) MELALUI PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR SERTA PENERTIBAN PEREDARAN ANTIBIOTIKA	9.730.000,00	0,00	486.500,00	0,00	486.500,00	973.000,00	10,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	B	BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR DI BIDANG OT DAN SK (Lanjutan/ Topik Khusus)	4.036.000,00	0,00	201.800,00	0,00	201.800,00	403.600,00	10,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	C	PEER INSPECTION CPOB	29.384.000,00	0,00	1.469.200,00	0,00	1.469.200,00	2.938.400,00	10,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	D	BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN (Dasar)	4.296.000,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00	429.600,00	10,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	E	BIMTEK CPOTB TOPIK KHUSUS	4.296.000,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00	429.600,00	10,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	F	FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR CPOTB DALAM MEMPERKUAT PENGAWASAN	10.888.000,00	0,00	544.400,00	0,00	544.400,00	1.088.800,00	10,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	G	PUBLIKASI HASIL PENGAWASAN OMKABA	10.650.000,00	0,00	532.500,00	0,00	532.500,00	1.065.000,00	10,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	H	SOSIALISASI REGULASI DI BIDANG OBA	750.000,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	75.000,00	10,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	I	PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK (Jakarta)	8.072.000,00	0,00	403.600,00	0,00	403.600,00	807.200,00	10,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	J	PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK (Jakarta)	52.614.000,00	0,00	2.630.700,00	0,00	2.630.700,00	5.261.400,00	10,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI PROP SUMSEL	273.462.000,00	0,00	13.673.100,00	0,00	13.673.100,00	273.462.000,00	10,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	B	JOIN INSPECTION CPOTB	13.336.000,00	0,00	666.800,00	0,00	666.800,00	1.333.600,00	10,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	C	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING	11.388.000,00	0,00	569.400,00	0,00	569.400,00	1.138.800,00	10,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	D	PENGAWASAN TERPADU BAHAN BERBAHAYA DI PROVINSI DAN KAB/KOTA	32.620.000,00	0,00	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	3.262.000,00	10,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	E	PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR	52.240.000,00	0,00	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00	5.224.000,00	10,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
16.	BBPOM di Palembang	F	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA DALAM RANGKA DETEKSI DINI OBAT PALSU,TINDAK LANJUT PUBLIC WARNING (KASUS)	55.240.000,00	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	5.524.000,00	10,00 (%)				
Total				0,00	28.650.100,00	0,00	28.650.100,00	57.300.200,00						
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	267.200.000,00	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PENERBITAN REKOMENDASI DALAM RANGKA PERIJINAN OBAT DAN MAKANAN	110.056.000,00	22.011.200,00	22.011.200,00	22.011.200,00	22.011.200,00	88.044.800,00	80,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	A	PENDAMPINGAN UMKM DALAM RANGKA PENGAWASAN KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BBPOM	84.200.000,00	16.840.000,00	16.840.000,00	16.840.000,00	16.840.000,00	67.360.000,00	80,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	B	WORKSHOP REGISTRASI PANGAN OLAHAN UNTUK FASILITATOR DI BBPOM	6.216.000,00	1.243.200,00	1.243.200,00	1.243.200,00	1.243.200,00	4.972.800,00	80,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	C	FGD LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PENGAWASAN KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN	25.600.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	20.480.000,00	80,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	D	BIMBINGAN TEKNIS dan PELAYANAN REGISTRASI PANGAN OLAHAN	59.900.000,00	11.980.000,00	11.980.000,00	11.980.000,00	11.980.000,00	47.920.000,00	80,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	E	WORKSHOP BIDANG PEMERIKSAAN	12.174.000,00	2.434.800,00	2.434.800,00	2.434.800,00	2.434.800,00	9.739.200,00	80,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	F	FORUM KOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIK EKSPOR IMPOR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	8.592.000,00	1.718.400,00	1.718.400,00	1.718.400,00	1.718.400,00	6.873.600,00	80,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	G	PENINGKATAN KEMANDIRIAN BALAI DAN PELAKU USAHA DALAM RANGKA MANDATORY SERTIFIKASI CDOB	9.190.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	7.352.000,00	80,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	H	Sosialisasi Regulasi Di Bidang Obat (Jawa Barat)	4.036.000,00	807.200,00	807.200,00	807.200,00	807.200,00	3.228.800,00	80,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
10.	BBPOM di Palembang	I	PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA PERIZINAN DAN SERTIFIKASI CPOTB PADA SARANA PRODUKSI OBAT	600.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00	80,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	J	BIMBINGAN TEKNIS SERTIFIKASI CPOTB BERTAHAP BAGI PETUGAS BALAI/LOKA POM	4.036.000,00	807.200,00	807.200,00	807.200,00	807.200,00	3.228.800,00	80,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	K	WORKSHOP PENGAWALAN INOVASI PANGAN LOKAL SPESIFIK DAERAH TAHUN 2022	4.296.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	80,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	L	Automatic Adjustment (Pemblokiran)	5.104.000,00	1.020.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00	4.083.200,00	80,00 (%)				
Total				66.800.000,00	66.800.000,00	66.800.000,00	66.800.000,00	267.200.000,00						
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			60	60	60	60	60	60	60	60	60	83.490.000,00	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI DI PROP SUMSEL	83.490.000,00	20.872.500,00	20.872.500,00	20.872.500,00	20.872.500,00	83.490.000,00	100,00 (%)				
Total				20.872.500,00	20.872.500,00	20.872.500,00	20.872.500,00	83.490.000,00						
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			66	66	66	66	66	66	66	66	66	458.401.600,00	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGENDALIAN ANTI-MICROBIAL RESISTANCE (AMR) MELALUI PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR SERTA PENERTIBAN PEREDARAN ANTIBIOTIKA	9.730.000,00	1.946.000,00	1.946.000,00	1.946.000,00	1.946.000,00	7.784.000,00	80,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	B	BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR DI BIDANG OT DAN SK (Lanjutan/ Topik Khusus)	4.036.000,00	807.200,00	807.200,00	807.200,00	807.200,00	3.228.800,00	80,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
3.	BBPOM di Palembang	C	PEER INSPECTION CPOB	29.384.000,00	5.876.800,00	5.876.800,00	5.876.800,00	5.876.800,00	23.507.200,00	80,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	D	BIMBINGAN TEKINS INSPEKTUR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN (Dasar)	4.296.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	80,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	E	BIMTEK CPOTB TOPIK KHUSUS	4.296.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	80,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	F	FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR CPOTB DALAM MEMPERKUAT PENGAWASAN	10.888.000,00	2.177.600,00	2.177.600,00	2.177.600,00	2.177.600,00	8.710.400,00	80,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	G	PUBLIKASI HASIL PENGAWASAN OMKABA	10.650.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	8.520.000,00	80,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	H	SOSIALISASI REGULASI DI BIDANG OBA	750.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	80,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	I	PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK (Jakarta)	8.072.000,00	1.614.400,00	1.614.400,00	1.614.400,00	1.614.400,00	6.457.600,00	80,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	J	PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK (Jakarta)	52.614.000,00	10.522.800,00	10.522.800,00	10.522.800,00	10.522.800,00	42.091.200,00	80,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI PROP SUMSEL	273.462.000,00	54.692.400,00	54.692.400,00	54.692.400,00	54.692.400,00	218.769.600,00	80,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	B	JOIN INSPECTION CPOTB	13.336.000,00	2.667.200,00	2.667.200,00	2.667.200,00	2.667.200,00	10.668.800,00	80,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	C	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING	11.388.000,00	2.277.600,00	2.277.600,00	2.277.600,00	2.277.600,00	9.110.400,00	80,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	D	PENGAWASAN TERPADU BAHAN BERBAHAYA DI PROVINSI DAN KAB/KOTA	32.620.000,00	6.524.000,00	6.524.000,00	6.524.000,00	6.524.000,00	26.096.000,00	80,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	E	PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR	52.240.000,00	10.448.000,00	10.448.000,00	10.448.000,00	10.448.000,00	41.792.000,00	80,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	F	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA DALAM RANGKA DETEKSI DINI OBAT PALSU, TINDAK LANJUT PUBLIC WARNING (KASUS)	55.240.000,00	11.048.000,00	11.048.000,00	11.048.000,00	11.048.000,00	44.192.000,00	80,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
Total				114.600.400,00	114.600.400,00	114.600.400,00	114.600.400,00	458.401.600,00						
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM								4,20	66.800.000,00				
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PENERBITAN REKOMENDASI DALAM RANGKA PERIJINAN OBAT DAN MAKANAN	110.056.000,00	5.502.800,00	5.502.800,00	5.502.800,00	5.502.800,00	22.011.200,00	20,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	A	PENDAMPINGAN UMKM DALAM RANGKA PENGAWASAN KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BBPOM	84.200.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00	16.840.000,00	20,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	B	WORKSHOP REGISTRASI PANGAN OLAHAN UNTUK FASILITATOR DI BBPOM	6.216.000,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00	1.243.200,00	20,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	C	FGD LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PENGAWASAN KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN	25.600.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	5.120.000,00	20,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	D	BIMBINGAN TEKNIS dan PELAYANAN REGISTRASI PANGAN OLAHAN	59.900.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	11.980.000,00	20,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	E	WORKSHOP BIDANG PEMERIKSAAN	12.174.000,00	608.700,00	608.700,00	608.700,00	608.700,00	2.434.800,00	20,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	F	FORUM KOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIK EKSPOR IMPOR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	8.592.000,00	429.600,00	429.600,00	429.600,00	429.600,00	1.718.400,00	20,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	G	PENINGKATAN KEMANDIRIAN BALAI DAN PELAKU USAHA DALAM RANGKA MANDATORY SERTIFIKASI CDOB	9.190.000,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00	1.838.000,00	20,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	H	Sosialisasi Regulasi Di Bidang Obat (Jawa Barat)	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	I	PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA PERIZINAN DAN SERTIFIKASI CPOTB PADA SARANA PRODUKSI OBAT	600.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target									Anggaran			
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09		B10	B11	B12
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
11.	BBPOM di Palembang	J	BIMBINGAN TEKNIS SERTIFIKASI CPOTB BERTAHAP BAGI PETUGAS BALAI/LOKA POM	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)						
12.	BBPOM di Palembang	K	WORKSHOP PENGAWALAN INOVASI PANGAN LOKAL SPESIFIK DAERAH TAHUN 2022	4.296.000,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	859.200,00	20,00 (%)						
13.	BBPOM di Palembang	L	Automatic Adjustment (Pemblokiran)	5.104.000,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	1.020.800,00	20,00 (%)						
Total				16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	66.800.000,00								
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan 10 dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik			15	25	35	45	50	55	65	75	85	90	77	101.431.000,00	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
1.	BBPOM di Palembang	A	BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN CPPOB BAGI UMKM	20.451.000,00	5.112.750,00	5.112.750,00	5.112.750,00	5.112.750,00	20.451.000,00	100,00 (%)						
2.	BBPOM di Palembang	B	PENGUATAN PENDAMPINGAN UMKM MENUJU NIE	42.100.000,00	10.525.000,00	10.525.000,00	10.525.000,00	10.525.000,00	42.100.000,00	100,00 (%)						
3.	BBPOM di Palembang	C	Pendampingan UMKM OT	8.740.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	8.740.000,00	100,00 (%)						
4.	BBPOM di Palembang	D	Pendampingan UMKM KOSMETIK	8.740.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	8.740.000,00	100,00 (%)						
5.	BBPOM di Palembang	A	Penilaian GAP dan kondisi sarana UMKM OT	12.660.000,00	3.165.000,00	3.165.000,00	3.165.000,00	3.165.000,00	12.660.000,00	100,00 (%)						
6.	BBPOM di Palembang	B	Penilaian GAP dan kondisi sarana UMKM KOSMETIK	8.740.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	8.740.000,00	100,00 (%)						
Total				25.357.750,00	25.357.750,00	25.357.750,00	25.357.750,00	101.431.000,00								
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			10	15	25	35	45	50	55	65	75	80	90	95,4	1.832.040.000,00

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran		
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10		B11	B12
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(% Plan Penyerapan Budget)						
1.	BBPOM di Palembang	A	KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI	203.440.000,00	50.860.000,00	50.860.000,00	50.860.000,00	50.860.000,00	203.440.000,00	100,00 (%)						
2.	BBPOM di Palembang	B	SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KIE OBAT DAN MAKANAN	1.628.600.000,00	407.150.000,00	407.150.000,00	407.150.000,00	407.150.000,00	1.628.600.000,00	100,00 (%)						
Total				458.010.000,00	458.010.000,00	458.010.000,00	458.010.000,00	1.832.040.000,00								
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			10	15	25	35	45	50	55	65	75	80	90	59	671.514.400,00

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran		
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10		B11	B12
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
1.	BBPOM di Palembang	A	PEMETAAN KEGIATAN TERPADU (PJAS, GKPD, PASAR AMAN)	95.349.000,00	19.069.800,00	19.069.800,00	19.069.800,00	19.069.800,00	76.279.200,00	80,00 (%)						
2.	BBPOM di Palembang	B	BIMTEK KEAMANAN PANGAN DI SEKOLAH	103.800.000,00	20.760.000,00	20.760.000,00	20.760.000,00	20.760.000,00	83.040.000,00	80,00 (%)						
3.	BBPOM di Palembang	C	PELATIHAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH (PBKPKS)	87.440.000,00	17.488.000,00	17.488.000,00	17.488.000,00	17.488.000,00	69.952.000,00	80,00 (%)						
4.	BBPOM di Palembang	D	AUDIT DAN PENDAMPINGAN PIAGAM BINTANG KANTIN SEKOLAH (TAHAP II)	83.840.000,00	16.768.000,00	16.768.000,00	16.768.000,00	16.768.000,00	67.072.000,00	80,00 (%)						
5.	BBPOM di Palembang	F	OPERASIONAL MOBLING UMUM	123.350.000,00	24.670.000,00	24.670.000,00	24.670.000,00	24.670.000,00	98.680.000,00	80,00 (%)						
6.	BBPOM di Palembang	G	FOOD SECURITY	71.000.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	56.800.000,00	80,00 (%)						
7.	BBPOM di Palembang	H	PENGADAAN PAKET EDUKASI	112.000.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	89.600.000,00	80,00 (%)						
8.	BBPOM di Palembang	E	WORKSHOP KEAMANAN PANGAN NASIONAL DALAM RANGKA PEMBAHASAN TEKNIS INTERVENSI KEAMANAN PANGAN DI DESA, SEKOLAH DAN PASAR	14.052.000,00	2.810.400,00	2.810.400,00	2.810.400,00	2.810.400,00	11.241.600,00	80,00 (%)						
9.	BBPOM di Palembang	A	ADVOKASI LINTAS SEKTOR TERPADU PJAS, GKPD, DAN PASAR AMAN	93.122.000,00	18.624.400,00	18.624.400,00	18.624.400,00	18.624.400,00	74.497.600,00	80,00 (%)						
10.	BBPOM di Palembang	B	AUDIENSI LINTAS SEKTOR KEGIATAN TERPADU	5.440.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	4.352.000,00	80,00 (%)						
11.	BBPOM di Palembang	I	Automatic Adjustment (Blokir)	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	80,00 (%)						
Total				167.878.600,00	167.878.600,00	167.878.600,00	167.878.600,00	671.514.400,00								
19.	Jumlah desa pangan aman			10	15	25	35	45	50	55	65	75	80	90	19	792.420.000,00
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	BIMBINGAN TEKNIS KOMUNITAS DESA	232.225.000,00	46.445.000,00	46.445.000,00	46.445.000,00	46.445.000,00	185.780.000,00	80,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	B	FASILITAS PENERAPAN KEAMANAN PANGAN OLEH KADER KEAMANAN PANGAN	21.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	16.800.000,00	80,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	A	PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA (KKPD)	273.311.000,00	54.662.200,00	54.662.200,00	54.662.200,00	54.662.200,00	218.648.800,00	80,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	B	PENGAMBILAN DATA DALAM RANGKA GAP ASSEMENT	27.180.000,00	5.436.000,00	5.436.000,00	5.436.000,00	5.436.000,00	21.744.000,00	80,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	C	TIM KEAMANAN PANGAN DESA	45.150.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00	36.120.000,00	80,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	A	OPERASIONAL MOBILING DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMAMAMAN PANGAN POST INTERVENSI	71.120.000,00	14.224.000,00	14.224.000,00	14.224.000,00	14.224.000,00	56.896.000,00	80,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	A	PENGAWALAN DI DESA YANG SUDAH DIINTERVENSI KEAMANAN PANGAN TAHUN 2020	77.220.000,00	15.444.000,00	15.444.000,00	15.444.000,00	15.444.000,00	61.776.000,00	80,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	B	MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN TERPADU (PJAS, GKPD DAN PASAR AMAN)	104.750.000,00	20.950.000,00	20.950.000,00	20.950.000,00	20.950.000,00	83.800.000,00	80,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	C	LOMBA PANGAN DESA AMAN	22.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00	80,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	D	PEMETAAN DISTRIBUSI KERACUNAN OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA	12.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	9.600.000,00	80,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	E	PEMBERDAYAAN UMKM UMUM MENDORONG PIRT MENJADI MD	17.550.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	14.040.000,00	80,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	F	FGD KOORDINASI DAN PEMANTAPAN TAHUBJA DENGAN LINTAS SEKTOR	24.890.000,00	4.978.000,00	4.978.000,00	4.978.000,00	4.978.000,00	19.912.000,00	80,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	G	PELATIHAN AUDITOR PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH (PBKPKS) BAGI PETUGAS	11.112.000,00	2.222.400,00	2.222.400,00	2.222.400,00	2.222.400,00	8.889.600,00	80,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	D	Automatic Adjustment (Blokir)	43.177.000,00	8.635.400,00	8.635.400,00	8.635.400,00	8.635.400,00	34.541.600,00	80,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(% Plan Penyerapan Budget)				
15.	BBPOM di Palembang	H	Automatic Adjustment (Blokir)	7.340.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	5.872.000,00	80,00 (%)				
Total				198.105.000,00	198.105.000,00	198.105.000,00	198.105.000,00	792.420.000,00						

20. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1.544.400.000,00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(% Plan Penyerapan Budget)	
1.	BBPOM di Palembang	A	PELATIHAN EKSTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU	10.816.000,00	1.622.400,00	1.622.400,00	1.622.400,00	1.622.400,00	6.489.600,00	60,00 (%)	
2.	BBPOM di Palembang	B	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI POM (OBAT/NAPZA, OT/SK, KOSMETIK, PANGAN, MIKROBIOLOGI)	35.272.000,00	5.290.800,00	5.290.800,00	5.290.800,00	5.290.800,00	21.163.200,00	60,00 (%)	
3.	BBPOM di Palembang	C	BIMBINGAN TEKNIS DETEKSI DNA SPESIFIK SPESIES	8.818.000,00	1.322.700,00	1.322.700,00	1.322.700,00	1.322.700,00	5.290.800,00	60,00 (%)	
4.	BBPOM di Palembang	D	BIMBINGAN TEKNIS SEKSI KIMIA (LAB PANGAN/OBAT/OT-SK/KOSMETIK)	39.704.000,00	5.955.600,00	5.955.600,00	5.955.600,00	5.955.600,00	23.822.400,00	60,00 (%)	
5.	BBPOM di Palembang	E	BIMBINGAN TEKNIS MIKROBIOLOGI	19.612.000,00	2.941.800,00	2.941.800,00	2.941.800,00	2.941.800,00	11.767.200,00	60,00 (%)	
6.	BBPOM di Palembang	F	MAGANG DI PPOMN ATAU LAB UNGGULAN (PANGAN, TERANOKOKO, MIKROBIOLOGI)	9.716.000,00	1.457.400,00	1.457.400,00	1.457.400,00	1.457.400,00	5.829.600,00	60,00 (%)	
7.	BBPOM di Palembang	A	VALIDASI/REVALIDASI/VERIFIKASI METODE ANALISIS DAN SIDANG PLENO	20.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	60,00 (%)	
8.	BBPOM di Palembang	B	UJI PROFISIENSI / UJI KOLABORASI / UJI PETIK	36.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00	60,00 (%)	
9.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN BAHAN KIMIA KHUSUS	60.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	36.000.000,00	60,00 (%)	
10.	BBPOM di Palembang	B	PENGADAAN PENUNJANG LAB DAN K3	229.000.000,00	34.350.000,00	34.350.000,00	34.350.000,00	34.350.000,00	137.400.000,00	60,00 (%)	

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
11.	BBPOM di Palembang	C	PENGADAAN REAGEN DAN MEDIA MIKRO PENGUJIAN PIHAK KE 3	200.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	120.000.000,00	60,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	D	PENGADAAN SUKU CADANG	974.001.000,00	146.100.150,00	146.100.150,00	146.100.150,00	146.100.150,00	584.400.600,00	60,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	E	PENGADAAN BAKU PEMBANDING	60.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	36.000.000,00	60,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	F	PENGADAAN GLASSWARE	106.668.000,00	16.000.200,00	16.000.200,00	16.000.200,00	16.000.200,00	64.000.800,00	60,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	G	PENGADAAN REAGENSIA, PENUNJANG LAB DAN K3 LAB PCR	315.000.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	189.000.000,00	60,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	H	PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI LAB RUJUKAN UJI STERILITAS	30.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00	60,00 (%)				
17.	BBPOM di Palembang	I	Automatic Adjustment (Blokir)	135.000.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	81.000.000,00	60,00 (%)				
18.	BBPOM di Palembang	A	PERTEMUAN TEKNIS LABORATORIUM KAN	4.878.000,00	731.700,00	731.700,00	731.700,00	731.700,00	2.926.800,00	60,00 (%)				
19.	BBPOM di Palembang	B	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING (KEDEPUTIAN I)	5.608.000,00	841.200,00	841.200,00	841.200,00	841.200,00	3.364.800,00	60,00 (%)				
20.	BBPOM di Palembang	C	PENGELOLAAN LIMBAH DAN RETAIN SAMPEL	31.000.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	18.600.000,00	60,00 (%)				
21.	BBPOM di Palembang	D	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING (KEDEPUTIAN II dan III)	5.608.000,00	841.200,00	841.200,00	841.200,00	841.200,00	3.364.800,00	60,00 (%)				
22.	BBPOM di Palembang	E	KALIBRASI ALAT LABORATORIUM	234.419.000,00	35.162.850,00	35.162.850,00	35.162.850,00	35.162.850,00	140.651.400,00	60,00 (%)				
23.	BBPOM di Palembang	F	REASESMEN BB/BPOM DAN SOSIALISASI PEDOMAN GLP	2.880.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	1.728.000,00	60,00 (%)				
Total				386.100.000,00	386.100.000,00	386.100.000,00	386.100.000,00	1.544.400.000,00						

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	1.029.600.000,00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Palembang	A	PELATIHAN EKSTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU	10.816.000,00	1.081.600,00	1.081.600,00	1.081.600,00	1.081.600,00	4.326.400,00	40,00 (%)
2.	BBPOM di Palembang	B	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI POM (OBAT/NAPZA, OT/SK, KOSMETIK, PANGAN, MIKROBIOLOGI)	35.272.000,00	3.527.200,00	3.527.200,00	3.527.200,00	3.527.200,00	14.108.800,00	40,00 (%)
3.	BBPOM di Palembang	C	BIMBINGAN TEKNIS DETEKSI DNA SPESIFIK SPESIES	8.818.000,00	881.800,00	881.800,00	881.800,00	881.800,00	3.527.200,00	40,00 (%)
4.	BBPOM di Palembang	D	BIMBINGAN TEKNIS SEKSI KIMIA (LAB PANGAN/OBAT/OT-SK/KOSMETIK)	39.704.000,00	3.970.400,00	3.970.400,00	3.970.400,00	3.970.400,00	15.881.600,00	40,00 (%)
5.	BBPOM di Palembang	E	BIMBINGAN TEKNIS MIKROBIOLOGI	19.612.000,00	1.961.200,00	1.961.200,00	1.961.200,00	1.961.200,00	7.844.800,00	40,00 (%)
6.	BBPOM di Palembang	F	MAGANG DI PPOMN ATAU LAB UNGGULAN (PANGAN, TERANOKOKO, MIKROBIOLOGI)	9.716.000,00	971.600,00	971.600,00	971.600,00	971.600,00	3.886.400,00	40,00 (%)
7.	BBPOM di Palembang	A	VALIDASI/REVALIDASI/VERIFIKASI METODE ANALISIS DAN SIDANG PLENO	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	40,00 (%)
8.	BBPOM di Palembang	B	UJI PROFISIENSI / UJI KOLABORASI / UJI PETIK	36.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00	40,00 (%)
9.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN BAHAN KIMIA KHUSUS	60.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00	40,00 (%)
10.	BBPOM di Palembang	B	PENGADAAN PENUNJANG LAB DAN K3	229.000.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	91.600.000,00	40,00 (%)
11.	BBPOM di Palembang	C	PENGADAAN REAGEN DAN MEDIA MIKRO PENGUJIAN PIHAK KE 3	200.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	80.000.000,00	40,00 (%)
12.	BBPOM di Palembang	D	PENGADAAN SUKU CADANG	974.001.000,00	97.400.100,00	97.400.100,00	97.400.100,00	97.400.100,00	389.600.400,00	40,00 (%)
13.	BBPOM di Palembang	E	PENGADAAN BAKU PEMBANDING	60.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00	40,00 (%)
14.	BBPOM di Palembang	F	PENGADAAN GLASSWARE	106.668.000,00	10.666.800,00	10.666.800,00	10.666.800,00	10.666.800,00	42.667.200,00	40,00 (%)

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran		
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10		B11	B12
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
15.	BBPOM di Palembang	G	PENGADAAN REAGENSIA, PENUNJANG LAB DAN K3 LAB PCR	315.000.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	126.000.000,00	40,00 (%)						
16.	BBPOM di Palembang	H	PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI LAB RUJUKAN UJI STERILITAS	30.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	40,00 (%)						
17.	BBPOM di Palembang	I	Automatic Adjustment (Blokir)	135.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	54.000.000,00	40,00 (%)						
18.	BBPOM di Palembang	A	PERTEMUAN TEKNIS LABORATORIUM KAN	4.878.000,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00	1.951.200,00	40,00 (%)						
19.	BBPOM di Palembang	B	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING (KEDEPUTIAN I)	5.608.000,00	560.800,00	560.800,00	560.800,00	560.800,00	2.243.200,00	40,00 (%)						
20.	BBPOM di Palembang	C	PENGLOLAAN LIMBAH DAN RETAIN SAMPEL	31.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	12.400.000,00	40,00 (%)						
21.	BBPOM di Palembang	D	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING (KEDEPUTIAN II dan III)	5.608.000,00	560.800,00	560.800,00	560.800,00	560.800,00	2.243.200,00	40,00 (%)						
22.	BBPOM di Palembang	E	KALIBRASI ALAT LABORATORIUM	234.419.000,00	23.441.900,00	23.441.900,00	23.441.900,00	23.441.900,00	93.767.600,00	40,00 (%)						
23.	BBPOM di Palembang	F	REASESMEN BB/BPOM DAN SOSIALISASI PEDOMAN GLP	2.880.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	1.152.000,00	40,00 (%)						
Total				257.400.000,00	25.740.000,00	25.740.000,00	25.740.000,00	25.740.000,00	1.029.600.000,00							
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			12,5	21,39	24	32,35	33,94	44,56	49,82	53,77	60,61	60,99	62,71	64	850.009.000,00
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
1.	BBPOM di Palembang	A	Gelar Kasus dan Pelaporan	3.024.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	3.024.000,00	100,00 (%)						
2.	BBPOM di Palembang	A	Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	3.780.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	3.780.000,00	100,00 (%)						

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
3.	BBPOM di Palembang	B	Pelaksanaan Operasi Intelijen Obat dan Makanan	140.100.000,00	35.025.000,00	35.025.000,00	35.025.000,00	35.025.000,00	140.100.000,00	100,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	C	Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	3.024.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	3.024.000,00	100,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	A	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	3.024.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	3.024.000,00	100,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	A	Operasi Penindakan	135.342.000,00	33.835.500,00	33.835.500,00	33.835.500,00	33.835.500,00	135.342.000,00	100,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	B	Perlengkapan dan Penahanan	40.860.000,00	10.215.000,00	10.215.000,00	10.215.000,00	10.215.000,00	40.860.000,00	100,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	A	Pemberkasan	163.512.000,00	40.878.000,00	40.878.000,00	40.878.000,00	40.878.000,00	163.512.000,00	100,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	B	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	15.024.000,00	3.756.000,00	3.756.000,00	3.756.000,00	3.756.000,00	15.024.000,00	100,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	C	Gelar Perkara	5.112.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00	5.112.000,00	100,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	D	Bantuan Hukum	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	100,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	E	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	47.160.000,00	11.790.000,00	11.790.000,00	11.790.000,00	11.790.000,00	47.160.000,00	100,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	A	Perencanaan Penyusunan Analisis	1.360.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.360.000,00	100,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	B	Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	33.184.000,00	8.296.000,00	8.296.000,00	8.296.000,00	8.296.000,00	33.184.000,00	100,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	C	FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	3.720.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	3.720.000,00	100,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	A	Rapat Perencanaan Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan	1.360.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.360.000,00	100,00 (%)				
17.	BBPOM di Palembang	B	Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	5.050.000,00	1.262.500,00	1.262.500,00	1.262.500,00	1.262.500,00	5.050.000,00	100,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
18.	BBPOM di Palembang	C	Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	31.394.000,00	7.848.500,00	7.848.500,00	7.848.500,00	7.848.500,00	31.394.000,00	100,00 (%)				
19.	BBPOM di Palembang	D	Evaluasi Kegiatan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	5.440.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	5.440.000,00	100,00 (%)				
20.	BBPOM di Palembang	E	Penyusunan Laporan Penjejukan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	1.680.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.680.000,00	100,00 (%)				
21.	BBPOM di Palembang	A	Pertemuan Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	30.240.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	30.240.000,00	100,00 (%)				
22.	BBPOM di Palembang	B	Bimtek Aplikasi Dashboard Penindakan (Peta Rawan Kasus)	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
23.	BBPOM di Palembang	C	Konsultasi Nasional Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
24.	BBPOM di Palembang	D	Pembentukan Petugas Analisis Pencegahan Kejahatan	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
25.	BBPOM di Palembang	E	Pembentukan Petugas Penggalangan	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
26.	BBPOM di Palembang	F	Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Siber Obat dan Makanan	20.640.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	20.640.000,00	100,00 (%)				
27.	BBPOM di Palembang	G	Pembentukan Petugas Analisis Siber Obat dan Makanan	28.080.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	28.080.000,00	100,00 (%)				
28.	BBPOM di Palembang	H	Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
29.	BBPOM di Palembang	I	Forum Koordinasi Intelijen	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
30.	BBPOM di Palembang	J	Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
31.	BBPOM di Palembang	K	Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan PPNS Badan POM RI	5.860.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	5.860.000,00	100,00 (%)				
32.	BBPOM di Palembang	L	Pembentukan Petugas Intelijen BPOM	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No. Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget					
33.	BBPOM di Palembang	M	Workshop Intelijen Strategis	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
34.	BBPOM di Palembang	O	Perkuatan Petugas Intelijen BPOM	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
35.	BBPOM di Palembang	P	Pengadaan Alat Taktis Intelijen	8.935.000,00	2.233.750,00	2.233.750,00	2.233.750,00	2.233.750,00	8.935.000,00	100,00 (%)				
36.	BBPOM di Palembang	Q	Pemusnahan Barang bukti, Saksi Pemusnahan, Saksi Sidang dan Keterangan Ahli	18.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00	100,00 (%)				
37.	BBPOM di Palembang	R	Konsultasi Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM BBPOM di Bidang Hukum	24.344.000,00	6.086.000,00	6.086.000,00	6.086.000,00	6.086.000,00	24.344.000,00	100,00 (%)				
38.	BBPOM di Palembang	N	Bimtek Sistem Monitoring Obat dan Makanan kepada UPT Badan POM	5.160.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	5.160.000,00	100,00 (%)				
Total				212.502.250,00	212.502.250,00	212.502.250,00	212.502.250,00	850.009.000,00						

23. Indeks RB UPT

83,9

3.531.037.400,00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Palembang	A	KONSULTASI KE PUSAT DAN ANTAR BALAI	74.760.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	14.952.000,00	20,00 (%)
2.	BBPOM di Palembang	B	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN REFORMASI BIROKRASI	5.086.000,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	1.017.200,00	20,00 (%)
3.	BBPOM di Palembang	C	AWARNESS QMS ISO 9001:2015 BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
4.	BBPOM di Palembang	D	INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
5.	BBPOM di Palembang	E	PENGGANDAAN POK REVISI DIPA	7.540.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	1.508.000,00	20,00 (%)

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
6.	BBPOM di Palembang	F	PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH	16.012.000,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	3.202.400,00	20,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	G	PERJALANAN MONITORING KEPALA BALAI KE WILAYAH KERJA	13.700.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	2.740.000,00	20,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	H	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM	28.776.000,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	5.755.200,00	20,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	I	PENYUSUNAN TEMPLATE SKP JABATAN PFM	4.136.000,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	827.200,00	20,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	J	SOSIALISASI PENATAUSAHAAN BMN DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMN (RKBMN)	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	K	PEMUTAKHIRAN DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER II 2021	9.792.000,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	1.958.400,00	20,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	L	PEMUTAKHIRAN DATA BMN SEMESTER I	12.312.000,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	2.462.400,00	20,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	M	FORUM KOMUNIKASI PERENCANA BPOM	17.184.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	20,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BALI	20.420.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	4.084.000,00	20,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	B	RAPAT EVALUASI NASIONAL DI MANADO	20.510.000,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	4.102.000,00	20,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	C	SINERGISME EFEKTIFITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
17.	BBPOM di Palembang	D	BIMTEK SERTA UJIAN DINAS PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	7.236.000,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	1.447.200,00	20,00 (%)				
18.	BBPOM di Palembang	E	PELATIHAN AGENT OF CHANGE REFORMASI BIROKRASI	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
19.	BBPOM di Palembang	F	PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL	5.396.000,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	1.079.200,00	20,00 (%)				
20.	BBPOM di Palembang	G	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	4.173.000,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	834.600,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
21.	BBPOM di Palembang	H	PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI/CAPACITY BUILDING	285.193.000,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	57.038.600,00	20,00 (%)				
22.	BBPOM di Palembang	I	DIKLAT TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
23.	BBPOM di Palembang	J	DIKLAT FUNGSIONAL NON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
24.	BBPOM di Palembang	K	UJI KOMPETENSI TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
25.	BBPOM di Palembang	L	DIKLAT PELATIHAN DASAR	24.824.000,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	4.964.800,00	20,00 (%)				
26.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN ORIENTASI CPNS	5.766.000,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	1.153.200,00	20,00 (%)				
27.	BBPOM di Palembang	N	BIMTEK PELAYANAN PUBLIK	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
28.	BBPOM di Palembang	O	DIKLAT UNTUK PEGAWAI TELADAN	7.976.000,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	1.595.200,00	20,00 (%)				
29.	BBPOM di Palembang	P	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	900.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00	20,00 (%)				
30.	BBPOM di Palembang	Q	JUMLAH ATK/CETAKAN/ TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	66.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00	20,00 (%)				
31.	BBPOM di Palembang	R	PELATIHAN TEKNIS PFM CALON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
32.	BBPOM di Palembang	S	WORKSHOP PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN POM	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
33.	BBPOM di Palembang	T	Automatic Adjustment (Blokir)	24.280.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	4.856.000,00	20,00 (%)				
34.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	450.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	90.000.000,00	20,00 (%)				
35.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	138.219.000,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	27.643.800,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
36.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Alat Pengolah data dan Komunikasi	123.336.000,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	24.667.200,00	20,00 (%)				
37.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR	25.800.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	5.160.000,00	20,00 (%)				
38.	BBPOM di Palembang	B	REVIU INSPEKTORAT	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
39.	BBPOM di Palembang	C	ASSISTENSI DAN PENDAMPINGAN BPK	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
40.	BBPOM di Palembang	D	SURVEILAN QMS	3.440.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	688.000,00	20,00 (%)				
41.	BBPOM di Palembang	E	PEMANTAUAN EVALUASI PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN TINDAKLANJUTNYA	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
42.	BBPOM di Palembang	F	PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL ASN SERTA UJI KOMPETENSI TEKNIS PFM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
43.	BBPOM di Palembang	G	BIMTEK DALAM RANGKA PENERAPAN SMART BPOM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
44.	BBPOM di Palembang	H	INTERVENSI PEMENUHAN INDIKATOR WBK/WBBM	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
45.	BBPOM di Palembang	I	TERLAKSANANYA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	12.600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	2.520.000,00	20,00 (%)				
46.	BBPOM di Palembang	J	KELANCARAN ADMINISTRASI PEMERINTAH	211.656.000,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	42.331.200,00	20,00 (%)				
47.	BBPOM di Palembang	K	PEMBINAAN BBPOM/BPOM OLEH ESELON I	8.600.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.720.000,00	20,00 (%)				
48.	BBPOM di Palembang	L	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
49.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN EKSTERNAL	60.404.000,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	12.080.800,00	20,00 (%)				
50.	BBPOM di Palembang	N	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	7.200.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
51.	BBPOM di Palembang	O	JUMLAH ATK/CETAKAN/TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	24.636.000,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	4.927.200,00	20,00 (%)				
52.	BBPOM di Palembang	P	ADMINISTRASI PERKANTORAN	151.400.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	30.280.000,00	20,00 (%)				
53.	BBPOM di Palembang	Q	PERSIAPAN PENGHAPUSAN BMN	2.629.000,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	525.800,00	20,00 (%)				
54.	BBPOM di Palembang	R	ADMINISTRASI	132.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	26.400.000,00	20,00 (%)				
55.	BBPOM di Palembang	S	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM	67.915.000,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	13.583.000,00	20,00 (%)				
56.	BBPOM di Palembang	T	ADMINISTRASI PENGADAAN	25.620.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	5.124.000,00	20,00 (%)				
57.	BBPOM di Palembang	A	Pembayaran gaji dan tunjangan	10.326.590.000,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	2.065.318.000,00	20,00 (%)				
58.	BBPOM di Palembang	B	Automatic Adjustment (Blokir)	898.910.000,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	179.782.000,00	20,00 (%)				
59.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN MAKANAN/ MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	190.080.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	38.016.000,00	20,00 (%)				
60.	BBPOM di Palembang	B	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	150.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00	20,00 (%)				
61.	BBPOM di Palembang	C	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	471.917.000,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	94.383.400,00	20,00 (%)				
62.	BBPOM di Palembang	D	PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	715.623.000,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	143.124.600,00	20,00 (%)				
63.	BBPOM di Palembang	E	PERLENGKAPAN KANTOR	269.400.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	53.880.000,00	20,00 (%)				
64.	BBPOM di Palembang	F	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6	108.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00	20,00 (%)				
65.	BBPOM di Palembang	G	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	6.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No. Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(% Plan Penyerapan Budget)					
66.	BBPOM di Palembang	H	TAGIHAN LANGGANAN DAYA DAN JASA	996.000.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	199.200.000,00	20,00 (%)				
67.	BBPOM di Palembang	I	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	1.173.072.000,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	234.614.400,00	20,00 (%)				
68.	BBPOM di Palembang	J	ADMINISTRASI	184.080.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	36.816.000,00	20,00 (%)				
Total				882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	3.531.037.400,00						

24. Nilai AKIP UPT

80,9

3.531.037.400,00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(% Plan Penyerapan Budget)
1.	BBPOM di Palembang	A	KONSULTASI KE PUSAT DAN ANTAR BALAI	74.760.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	14.952.000,00	20,00 (%)
2.	BBPOM di Palembang	B	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN REFORMASI BIROKRASI	5.086.000,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	1.017.200,00	20,00 (%)
3.	BBPOM di Palembang	C	AWARNESS QMS ISO 9001:2015 BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
4.	BBPOM di Palembang	D	INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
5.	BBPOM di Palembang	E	PENGGANDAAN POK REVISI DIPA	7.540.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	1.508.000,00	20,00 (%)
6.	BBPOM di Palembang	F	PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH	16.012.000,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	3.202.400,00	20,00 (%)
7.	BBPOM di Palembang	G	PERJALANAN MONITORING KEPALA BALAI KE WILAYAH KERJA	13.700.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	2.740.000,00	20,00 (%)
8.	BBPOM di Palembang	H	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM	28.776.000,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	5.755.200,00	20,00 (%)

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
9.	BBPOM di Palembang	I	PENYUSUNAN TEMPLATE SKP JABATAN PFM	4.136.000,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	827.200,00	20,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	J	SOSIALISASI PENATAUSAHAAN BMN DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMN (RKBMN)	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	K	PEMUTAKHIRAN DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER II 2021	9.792.000,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	1.958.400,00	20,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	L	PEMUTAKHIRAN DATA BMN SEMESTER I	12.312.000,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	2.462.400,00	20,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	M	FORUM KOMUNIKASI PERENCANA BPOM	17.184.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	20,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BALI	20.420.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	4.084.000,00	20,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	B	RAPAT EVALUASI NASIONAL DI MANADO	20.510.000,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	4.102.000,00	20,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	C	SINERGISME EFEKTIFITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
17.	BBPOM di Palembang	D	BIMTEK SERTA UJIAN DINAS PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	7.236.000,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	1.447.200,00	20,00 (%)				
18.	BBPOM di Palembang	E	PELATIHAN AGENT OF CHANGE REFORMASI BIROKRASI	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
19.	BBPOM di Palembang	F	PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL	5.396.000,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	1.079.200,00	20,00 (%)				
20.	BBPOM di Palembang	G	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	4.173.000,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	834.600,00	20,00 (%)				
21.	BBPOM di Palembang	H	PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI/CAPACITY BUILDING	285.193.000,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	57.038.600,00	20,00 (%)				
22.	BBPOM di Palembang	I	DIKLAT TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
23.	BBPOM di Palembang	J	DIKLAT FUNGSIONAL NON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
24.	BBPOM di Palembang	K	UJI KOMPETENSI TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
25.	BBPOM di Palembang	L	DIKLAT PELATIHAN DASAR	24.824.000,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	4.964.800,00	20,00 (%)				
26.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN ORIENTASI CPNS	5.766.000,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	1.153.200,00	20,00 (%)				
27.	BBPOM di Palembang	N	BIMTEK PELAYANAN PUBLIK	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
28.	BBPOM di Palembang	O	DIKLAT UNTUK PEGAWAI TELADAN	7.976.000,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	1.595.200,00	20,00 (%)				
29.	BBPOM di Palembang	P	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	900.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00	20,00 (%)				
30.	BBPOM di Palembang	Q	JUMLAH ATK/CETAKAN/TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	66.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00	20,00 (%)				
31.	BBPOM di Palembang	R	PELATIHAN TEKNIS PFM CALON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
32.	BBPOM di Palembang	S	WORKSHOP PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN POM	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
33.	BBPOM di Palembang	T	Automatic Adjustment (Blokir)	24.280.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	4.856.000,00	20,00 (%)				
34.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	450.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	90.000.000,00	20,00 (%)				
35.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	138.219.000,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	27.643.800,00	20,00 (%)				
36.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Alat Pengolah data dan Komunikasi	123.336.000,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	24.667.200,00	20,00 (%)				
37.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR	25.800.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	5.160.000,00	20,00 (%)				
38.	BBPOM di Palembang	B	REVIU INSPEKTORAT	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
39.	BBPOM di Palembang	C	ASSISTENSI DAN PENDAMPINGAN BPK	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
40.	BBPOM di Palembang	D	SURVEILAN QMS	3.440.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	688.000,00	20,00 (%)				
41.	BBPOM di Palembang	E	PEMANTAUAN EVALUASI PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN TINDAKLANJUTNYA	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
42.	BBPOM di Palembang	F	PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL ASN SERTA UJI KOMPETENSI TEKNIS PFM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
43.	BBPOM di Palembang	G	BIMTEK DALAM RANGKA PENERAPAN SMART BPOM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
44.	BBPOM di Palembang	H	INTERVENSI PEMENUHAN INDIKATOR WBK/WBBM	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
45.	BBPOM di Palembang	I	TERLAKSANANYA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	12.600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	2.520.000,00	20,00 (%)				
46.	BBPOM di Palembang	J	KELANCARAN ADMINISTRASI PEMERINTAH	211.656.000,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	42.331.200,00	20,00 (%)				
47.	BBPOM di Palembang	K	PEMBINAAN BBPOM/BPOM OLEH ESELON I	8.600.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.720.000,00	20,00 (%)				
48.	BBPOM di Palembang	L	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
49.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN EKSTERNAL	60.404.000,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	12.080.800,00	20,00 (%)				
50.	BBPOM di Palembang	N	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	7.200.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00	20,00 (%)				
51.	BBPOM di Palembang	O	JUMLAH ATK/CETAKAN/ TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	24.636.000,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	4.927.200,00	20,00 (%)				
52.	BBPOM di Palembang	P	ADMINISTRASI PERKANTORAN	151.400.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	30.280.000,00	20,00 (%)				
53.	BBPOM di Palembang	Q	PERSIAPAN PENGHAPUSAN BMN	2.629.000,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	525.800,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
54.	BBPOM di Palembang	R	ADMINISTRASI	132.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	26.400.000,00	20,00 (%)				
55.	BBPOM di Palembang	S	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM	67.915.000,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	13.583.000,00	20,00 (%)				
56.	BBPOM di Palembang	T	ADMINISTRASI PENGADAAN	25.620.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	5.124.000,00	20,00 (%)				
57.	BBPOM di Palembang	A	Pembayaran gaji dan tunjangan	10.326.590.000,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	2.065.318.000,00	20,00 (%)				
58.	BBPOM di Palembang	B	Automatic Adjustment (Blokir)	898.910.000,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	179.782.000,00	20,00 (%)				
59.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN MAKANAN/ MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	190.080.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	38.016.000,00	20,00 (%)				
60.	BBPOM di Palembang	B	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	150.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00	20,00 (%)				
61.	BBPOM di Palembang	C	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	471.917.000,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	94.383.400,00	20,00 (%)				
62.	BBPOM di Palembang	D	PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	715.623.000,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	143.124.600,00	20,00 (%)				
63.	BBPOM di Palembang	E	PERLENGKAPAN KANTOR	269.400.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	53.880.000,00	20,00 (%)				
64.	BBPOM di Palembang	F	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6	108.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00	20,00 (%)				
65.	BBPOM di Palembang	G	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	6.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	20,00 (%)				
66.	BBPOM di Palembang	H	TAGIHAN LANGGANAN DAYA DAN JASA	996.000.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	199.200.000,00	20,00 (%)				
67.	BBPOM di Palembang	I	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	1.173.072.000,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	234.614.400,00	20,00 (%)				
68.	BBPOM di Palembang	J	ADMINISTRASI	184.080.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	36.816.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
Total				882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	3.531.037.400,00						

25. Indeks Profesionalitas ASN UPT

84,75

3.531.037.400,00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Palembang	A	KONSULTASI KE PUSAT DAN ANTAR BALAI	74.760.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	14.952.000,00	20,00 (%)
2.	BBPOM di Palembang	B	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN REFORMASI BIROKRASI	5.086.000,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	1.017.200,00	20,00 (%)
3.	BBPOM di Palembang	C	AWARNESS QMS ISO 9001:2015 BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
4.	BBPOM di Palembang	D	INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
5.	BBPOM di Palembang	E	PENGGANDAAN POK REVISI DIPA	7.540.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	1.508.000,00	20,00 (%)
6.	BBPOM di Palembang	F	PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH	16.012.000,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	3.202.400,00	20,00 (%)
7.	BBPOM di Palembang	G	PERJALANAN MONITORING KEPALA BALAI KE WILAYAH KERJA	13.700.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	2.740.000,00	20,00 (%)
8.	BBPOM di Palembang	H	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM	28.776.000,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	5.755.200,00	20,00 (%)
9.	BBPOM di Palembang	I	PENYUSUNAN TEMPLATE SKP JABATAN PFM	4.136.000,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	827.200,00	20,00 (%)
10.	BBPOM di Palembang	J	SOSIALISASI PENATAUSAHAAN BMN DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMN (RKBMN)	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)
11.	BBPOM di Palembang	K	PEMUTAKHIRAN DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER II 2021	9.792.000,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	1.958.400,00	20,00 (%)

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
12.	BBPOM di Palembang	L	PEMUTAKHIRAN DATA BMN SEMESTER I	12.312.000,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	2.462.400,00	20,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	M	FORUM KOMUNIKASI PERENCANA BPOM	17.184.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	20,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BALI	20.420.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	4.084.000,00	20,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	B	RAPAT EVALUASI NASIONAL DI MANADO	20.510.000,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	4.102.000,00	20,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	C	SINERGISME EFEKTIFITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
17.	BBPOM di Palembang	D	BIMTEK SERTA UJIAN DINAS PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	7.236.000,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	1.447.200,00	20,00 (%)				
18.	BBPOM di Palembang	E	PELATIHAN AGENT OF CHANGE REFORMASI BIROKRASI	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
19.	BBPOM di Palembang	F	PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL	5.396.000,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	1.079.200,00	20,00 (%)				
20.	BBPOM di Palembang	G	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	4.173.000,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	834.600,00	20,00 (%)				
21.	BBPOM di Palembang	H	PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI/CAPACITY BUILDING	285.193.000,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	57.038.600,00	20,00 (%)				
22.	BBPOM di Palembang	I	DIKLAT TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
23.	BBPOM di Palembang	J	DIKLAT FUNGSIONAL NON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
24.	BBPOM di Palembang	K	UJI KOMPETENSI TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
25.	BBPOM di Palembang	L	DIKLAT PELATIHAN DASAR	24.824.000,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	4.964.800,00	20,00 (%)				
26.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN ORIENTASI CPNS	5.766.000,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	1.153.200,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
27.	BBPOM di Palembang	N	BIMTEK PELAYANAN PUBLIK	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
28.	BBPOM di Palembang	O	DIKLAT UNTUK PEGAWAI TELADAN	7.976.000,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	1.595.200,00	20,00 (%)				
29.	BBPOM di Palembang	P	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	900.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00	20,00 (%)				
30.	BBPOM di Palembang	Q	JUMLAH ATK/CETAKAN/TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	66.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00	20,00 (%)				
31.	BBPOM di Palembang	R	PELATIHAN TEKNIS PFM CALON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
32.	BBPOM di Palembang	S	WORKSHOP PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN POM	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
33.	BBPOM di Palembang	T	Automatic Adjustment (Blokir)	24.280.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	4.856.000,00	20,00 (%)				
34.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	450.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	90.000.000,00	20,00 (%)				
35.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	138.219.000,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	27.643.800,00	20,00 (%)				
36.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Alat Pengolah data dan Komunikasi	123.336.000,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	24.667.200,00	20,00 (%)				
37.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR	25.800.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	5.160.000,00	20,00 (%)				
38.	BBPOM di Palembang	B	REVIU INSPEKTORAT	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
39.	BBPOM di Palembang	C	ASSISTENSI DAN PENDAMPINGAN BPK	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
40.	BBPOM di Palembang	D	SURVEILAN QMS	3.440.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	688.000,00	20,00 (%)				
41.	BBPOM di Palembang	E	PEMANTAUAN EVALUASI PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN TINDAKLANJUTNYA	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
42.	BBPOM di Palembang	F	PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL ASN SERTA UJI KOMPETENSI TEKNIS PFM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
43.	BBPOM di Palembang	G	BIMTEK DALAM RANGKA PENERAPAN SMART BPOM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
44.	BBPOM di Palembang	H	INTERVENSI PEMENUHAN INDIKATOR WBK/WBBM	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
45.	BBPOM di Palembang	I	TERLAKSANANYA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	12.600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	2.520.000,00	20,00 (%)				
46.	BBPOM di Palembang	J	KELANCARAN ADMINISTRASI PEMERINTAH	211.656.000,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	42.331.200,00	20,00 (%)				
47.	BBPOM di Palembang	K	PEMBINAAN BBPOM/BPOM OLEH ESELON I	8.600.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.720.000,00	20,00 (%)				
48.	BBPOM di Palembang	L	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
49.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN EKSTERNAL	60.404.000,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	12.080.800,00	20,00 (%)				
50.	BBPOM di Palembang	N	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	7.200.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00	20,00 (%)				
51.	BBPOM di Palembang	O	JUMLAH ATK/CETAKAN/TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	24.636.000,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	4.927.200,00	20,00 (%)				
52.	BBPOM di Palembang	P	ADMINISTRASI PERKANTORAN	151.400.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	30.280.000,00	20,00 (%)				
53.	BBPOM di Palembang	Q	PERSIAPAN PENGHAPUSAN BMN	2.629.000,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	525.800,00	20,00 (%)				
54.	BBPOM di Palembang	R	ADMINISTRASI	132.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	26.400.000,00	20,00 (%)				
55.	BBPOM di Palembang	S	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM	67.915.000,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	13.583.000,00	20,00 (%)				
56.	BBPOM di Palembang	T	ADMINISTRASI PENGADAAN	25.620.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	5.124.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No. Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(% Plan Penyerapan Budget)					
57.	BBPOM di Palembang	A	Pembayaran gaji dan tunjangan	10.326.590.000,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	2.065.318.000,00	20,00 (%)				
58.	BBPOM di Palembang	B	Automatic Adjustment (Blokir)	898.910.000,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	179.782.000,00	20,00 (%)					
59.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN MAKANAN/ MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	190.080.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	38.016.000,00	20,00 (%)					
60.	BBPOM di Palembang	B	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	150.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00	20,00 (%)					
61.	BBPOM di Palembang	C	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	471.917.000,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	94.383.400,00	20,00 (%)					
62.	BBPOM di Palembang	D	PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	715.623.000,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	143.124.600,00	20,00 (%)					
63.	BBPOM di Palembang	E	PERLENGKAPAN KANTOR	269.400.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	53.880.000,00	20,00 (%)					
64.	BBPOM di Palembang	F	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6	108.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00	20,00 (%)					
65.	BBPOM di Palembang	G	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	6.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	20,00 (%)					
66.	BBPOM di Palembang	H	TAGIHAN LANGGANAN DAYA DAN JASA	996.000.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	199.200.000,00	20,00 (%)					
67.	BBPOM di Palembang	I	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	1.173.072.000,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	234.614.400,00	20,00 (%)					
68.	BBPOM di Palembang	J	ADMINISTRASI	184.080.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	36.816.000,00	20,00 (%)					
Total				882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	3.531.037.400,00						
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP								82	2.780.955.000,00				

No.	Indikator Kinerja			Target									Anggaran			
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09		B10	B11	B12
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
1.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Alat Laboratorium BBPOM di Palembang	2.483.388.000,00	620.847.000,00	620.847.000,00	620.847.000,00	620.847.000,00	2.483.388.000,00	100,00 (%)						
2.	BBPOM di Palembang	B	Pengadaan Penambah Nilai Alat Laboratorium BBPOM di Palembang	297.567.000,00	74.391.750,00	74.391.750,00	74.391.750,00	74.391.750,00	297.567.000,00	100,00 (%)						
Total				695.238.750,00	695.238.750,00	695.238.750,00	695.238.750,00	2.780.955.000,00								
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	2	2	2,1	2,1	2,2	2,25	3.531.037.400,00
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
1.	BBPOM di Palembang	A	KONSULTASI KE PUSAT DAN ANTAR BALAI	74.760.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	14.952.000,00	20,00 (%)						
2.	BBPOM di Palembang	B	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN REFORMASI BIROKRASI	5.086.000,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	1.017.200,00	20,00 (%)						
3.	BBPOM di Palembang	C	AWARNES QMS ISO 9001:2015 BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)						
4.	BBPOM di Palembang	D	INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)						
5.	BBPOM di Palembang	E	PENGGANDAAN POK REVISI DIPA	7.540.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	1.508.000,00	20,00 (%)						
6.	BBPOM di Palembang	F	PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH	16.012.000,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	3.202.400,00	20,00 (%)						
7.	BBPOM di Palembang	G	PERJALANAN MONITORING KEPALA BALAI KE WILAYAH KERJA	13.700.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	2.740.000,00	20,00 (%)						
8.	BBPOM di Palembang	H	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM	28.776.000,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	5.755.200,00	20,00 (%)						
9.	BBPOM di Palembang	I	PENYUSUNAN TEMPLATE SKP JABATAN PFM	4.136.000,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	827.200,00	20,00 (%)						

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
10.	BBPOM di Palembang	J	SOSIALISASI PENATAUSAHAAN BMN DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMN (RKBMN)	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	K	PEMUTAKHIRAN DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER II 2021	9.792.000,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	1.958.400,00	20,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	L	PEMUTAKHIRAN DATA BMN SEMESTER I	12.312.000,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	2.462.400,00	20,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	M	FORUM KOMUNIKASI PERENCANA B POM	17.184.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	20,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BALI	20.420.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	4.084.000,00	20,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	B	RAPAT EVALUASI NASIONAL DI MANADO	20.510.000,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	4.102.000,00	20,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	C	SINERGISME EFEKTIFITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
17.	BBPOM di Palembang	D	BIMTEK SERTA UJIAN DINAS PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	7.236.000,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	1.447.200,00	20,00 (%)				
18.	BBPOM di Palembang	E	PELATIHAN AGENT OF CHANGE REFORMASI BIROKRASI	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
19.	BBPOM di Palembang	F	PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL	5.396.000,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	1.079.200,00	20,00 (%)				
20.	BBPOM di Palembang	G	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	4.173.000,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	834.600,00	20,00 (%)				
21.	BBPOM di Palembang	H	PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI/CAPACITY BUILDING	285.193.000,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	57.038.600,00	20,00 (%)				
22.	BBPOM di Palembang	I	DIKLAT TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
23.	BBPOM di Palembang	J	DIKLAT FUNGSIONAL NON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
24.	BBPOM di Palembang	K	UJI KOMPETENSI TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
25.	BBPOM di Palembang	L	DIKLAT PELATIHAN DASAR	24.824.000,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	4.964.800,00	20,00 (%)				
26.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN ORIENTASI CPNS	5.766.000,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	1.153.200,00	20,00 (%)				
27.	BBPOM di Palembang	N	BIMTEK PELAYANAN PUBLIK	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
28.	BBPOM di Palembang	O	DIKLAT UNTUK PEGAWAI TELADAN	7.976.000,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	1.595.200,00	20,00 (%)				
29.	BBPOM di Palembang	P	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	900.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00	20,00 (%)				
30.	BBPOM di Palembang	Q	JUMLAH ATK/CETAKAN/TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	66.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00	20,00 (%)				
31.	BBPOM di Palembang	R	PELATIHAN TEKNIS PFM CALON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
32.	BBPOM di Palembang	S	WORKSHOP PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN POM	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
33.	BBPOM di Palembang	T	Automatic Adjustment (Blokir)	24.280.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	4.856.000,00	20,00 (%)				
34.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	450.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	90.000.000,00	20,00 (%)				
35.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	138.219.000,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	27.643.800,00	20,00 (%)				
36.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Alat Pengolah data dan Komunikasi	123.336.000,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	24.667.200,00	20,00 (%)				
37.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR	25.800.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	5.160.000,00	20,00 (%)				
38.	BBPOM di Palembang	B	REVIU INSPEKTORAT	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
39.	BBPOM di Palembang	C	ASSISTENSI DAN PENDAMPINGAN BPK	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
40.	BBPOM di Palembang	D	SURVEILAN QMS	3.440.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	688.000,00	20,00 (%)				
41.	BBPOM di Palembang	E	PEMANTAUAN EVALUASI PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN TINDAKLANJUTNYA	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
42.	BBPOM di Palembang	F	PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL ASN SERTA UJI KOMPETENSI TEKNIS PFM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
43.	BBPOM di Palembang	G	BIMTEK DALAM RANGKA PENERAPAN SMART BPOM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
44.	BBPOM di Palembang	H	INTERVENSI PEMENUHAN INDIKATOR WBK/WBBM	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
45.	BBPOM di Palembang	I	TERLAKSANANYA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	12.600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	2.520.000,00	20,00 (%)				
46.	BBPOM di Palembang	J	KELANCARAN ADMINISTRASI PEMERINTAH	211.656.000,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	42.331.200,00	20,00 (%)				
47.	BBPOM di Palembang	K	PEMBINAAN BBPOM/BPOM OLEH ESELON I	8.600.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.720.000,00	20,00 (%)				
48.	BBPOM di Palembang	L	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
49.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN EKSTERNAL	60.404.000,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	12.080.800,00	20,00 (%)				
50.	BBPOM di Palembang	N	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	7.200.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00	20,00 (%)				
51.	BBPOM di Palembang	O	JUMLAH ATK/CETAKAN/ TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	24.636.000,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	4.927.200,00	20,00 (%)				
52.	BBPOM di Palembang	P	ADMINISTRASI PERKANTORAN	151.400.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	30.280.000,00	20,00 (%)				
53.	BBPOM di Palembang	Q	PERSIAPAN PENGHAPUSAN BMN	2.629.000,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	525.800,00	20,00 (%)				
54.	BBPOM di Palembang	R	ADMINISTRASI	132.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	26.400.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
55.	BBPOM di Palembang	S	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM	67.915.000,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	13.583.000,00	20,00 (%)				
56.	BBPOM di Palembang	T	ADMINISTRASI PENGADAAN	25.620.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	5.124.000,00	20,00 (%)				
57.	BBPOM di Palembang	A	Pembayaran gaji dan tunjangan	10.326.590.000,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	2.065.318.000,00	20,00 (%)				
58.	BBPOM di Palembang	B	Automatic Adjustment (Blokir)	898.910.000,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	179.782.000,00	20,00 (%)				
59.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN MAKANAN/ MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	190.080.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	38.016.000,00	20,00 (%)				
60.	BBPOM di Palembang	B	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	150.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00	20,00 (%)				
61.	BBPOM di Palembang	C	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	471.917.000,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	94.383.400,00	20,00 (%)				
62.	BBPOM di Palembang	D	PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	715.623.000,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	143.124.600,00	20,00 (%)				
63.	BBPOM di Palembang	E	PERLENGKAPAN KANTOR	269.400.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	53.880.000,00	20,00 (%)				
64.	BBPOM di Palembang	F	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6	108.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00	20,00 (%)				
65.	BBPOM di Palembang	G	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	6.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	20,00 (%)				
66.	BBPOM di Palembang	H	TAGIHAN LANGGANAN DAYA DAN JASA	996.000.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	199.200.000,00	20,00 (%)				
67.	BBPOM di Palembang	I	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	1.173.072.000,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	234.614.400,00	20,00 (%)				
68.	BBPOM di Palembang	J	ADMINISTRASI	184.080.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	36.816.000,00	20,00 (%)				
Total				882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	3.531.037.400,00						

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	90	98,7	3.531.037.400,00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Palembang	A	KONSULTASI KE PUSAT DAN ANTAR BALAI	74.760.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	14.952.000,00	20,00 (%)
2.	BBPOM di Palembang	B	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN REFORMASI BIROKRASI	5.086.000,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	1.017.200,00	20,00 (%)
3.	BBPOM di Palembang	C	AWARNESS QMS ISO 9001:2015 BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
4.	BBPOM di Palembang	D	INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
5.	BBPOM di Palembang	E	PENGGANDAAN POK REVISI DIPA	7.540.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	1.508.000,00	20,00 (%)
6.	BBPOM di Palembang	F	PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH	16.012.000,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	3.202.400,00	20,00 (%)
7.	BBPOM di Palembang	G	PERJALANAN MONITORING KEPALA BALAI KE WILAYAH KERJA	13.700.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	2.740.000,00	20,00 (%)
8.	BBPOM di Palembang	H	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM	28.776.000,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	5.755.200,00	20,00 (%)
9.	BBPOM di Palembang	I	PENYUSUNAN TEMPLATE SKP JABATAN PFM	4.136.000,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	827.200,00	20,00 (%)
10.	BBPOM di Palembang	J	SOSIALISASI PENATAUSAHAAN BMN DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMN (RKBMN)	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)
11.	BBPOM di Palembang	K	PEMUTAKHIRAN DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER II 2021	9.792.000,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	1.958.400,00	20,00 (%)
12.	BBPOM di Palembang	L	PEMUTAKHIRAN DATA BMN SEMESTER I	12.312.000,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	2.462.400,00	20,00 (%)
13.	BBPOM di Palembang	M	FORUM KOMUNIKASI PERENCANA BPOM	17.184.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	20,00 (%)

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
14.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BALI	20.420.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	4.084.000,00	20,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	B	RAPAT EVALUASI NASIONAL DI MANADO	20.510.000,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	4.102.000,00	20,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	C	SINERGISME EFEKTIFITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
17.	BBPOM di Palembang	D	BIMTEK SERTA UJIAN DINAS PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	7.236.000,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	1.447.200,00	20,00 (%)				
18.	BBPOM di Palembang	E	PELATIHAN AGENT OF CHANGE REFORMASI BIROKRASI	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
19.	BBPOM di Palembang	F	PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL	5.396.000,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	1.079.200,00	20,00 (%)				
20.	BBPOM di Palembang	G	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	4.173.000,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	834.600,00	20,00 (%)				
21.	BBPOM di Palembang	H	PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI/CAPACITY BUILDING	285.193.000,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	57.038.600,00	20,00 (%)				
22.	BBPOM di Palembang	I	DIKLAT TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
23.	BBPOM di Palembang	J	DIKLAT FUNGSIONAL NON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
24.	BBPOM di Palembang	K	UJI KOMPETENSI TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
25.	BBPOM di Palembang	L	DIKLAT PELATIHAN DASAR	24.824.000,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	4.964.800,00	20,00 (%)				
26.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN ORIENTASI CPNS	5.766.000,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	1.153.200,00	20,00 (%)				
27.	BBPOM di Palembang	N	BIMTEK PELAYANAN PUBLIK	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
28.	BBPOM di Palembang	O	DIKLAT UNTUK PEGAWAI TELADAN	7.976.000,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	1.595.200,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
29.	BBPOM di Palembang	P	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	900.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00	20,00 (%)				
30.	BBPOM di Palembang	Q	JUMLAH ATK/CETAKAN/TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	66.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00	20,00 (%)				
31.	BBPOM di Palembang	R	PELATIHAN TEKNIS PFM CALON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
32.	BBPOM di Palembang	S	WORKSHOP PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN POM	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
33.	BBPOM di Palembang	T	Automatic Adjustment (Blokir)	24.280.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	4.856.000,00	20,00 (%)				
34.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	450.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	90.000.000,00	20,00 (%)				
35.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	138.219.000,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	27.643.800,00	20,00 (%)				
36.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Alat Pengolah data dan Komunikasi	123.336.000,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	24.667.200,00	20,00 (%)				
37.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR	25.800.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	5.160.000,00	20,00 (%)				
38.	BBPOM di Palembang	B	REVIU INSPEKTORAT	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
39.	BBPOM di Palembang	C	ASSISTENSI DAN PENDAMPINGAN BPK	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
40.	BBPOM di Palembang	D	SURVEILAN QMS	3.440.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	688.000,00	20,00 (%)				
41.	BBPOM di Palembang	E	PEMANTAUAN EVALUASI PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN TINDAKLANJUTNYA	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
42.	BBPOM di Palembang	F	PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL ASN SERTA UJI KOMPETENSI TEKNIS PFM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
43.	BBPOM di Palembang	G	BIMTEK DALAM RANGKA PENERAPAN SMART BPOM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				

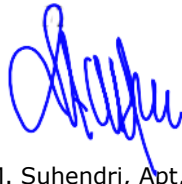
No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
44.	BBPOM di Palembang	H	INTERVENSI PEMENUHAN INDIKATOR WBK/WBBM	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
45.	BBPOM di Palembang	I	TERLAKSANANYA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	12.600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	2.520.000,00	20,00 (%)				
46.	BBPOM di Palembang	J	KELANCARAN ADMINISTRASI PEMERINTAH	211.656.000,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	42.331.200,00	20,00 (%)				
47.	BBPOM di Palembang	K	PEMBINAAN BBPOM/BPOM OLEH ESELON I	8.600.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.720.000,00	20,00 (%)				
48.	BBPOM di Palembang	L	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
49.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN EKSTERNAL	60.404.000,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	12.080.800,00	20,00 (%)				
50.	BBPOM di Palembang	N	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	7.200.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00	20,00 (%)				
51.	BBPOM di Palembang	O	JUMLAH ATK/CETAKAN/ TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	24.636.000,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	4.927.200,00	20,00 (%)				
52.	BBPOM di Palembang	P	ADMINISTRASI PERKANTORAN	151.400.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	30.280.000,00	20,00 (%)				
53.	BBPOM di Palembang	Q	PERSIAPAN PENGHAPUSAN BMN	2.629.000,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	525.800,00	20,00 (%)				
54.	BBPOM di Palembang	R	ADMINISTRASI	132.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	26.400.000,00	20,00 (%)				
55.	BBPOM di Palembang	S	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM	67.915.000,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	13.583.000,00	20,00 (%)				
56.	BBPOM di Palembang	T	ADMINISTRASI PENGADAAN	25.620.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	5.124.000,00	20,00 (%)				
57.	BBPOM di Palembang	A	Pembayaran gaji dan tunjangan	10.326.590.000,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	2.065.318.000,00	20,00 (%)				
58.	BBPOM di Palembang	B	Automatic Adjustment (Blokir)	898.910.000,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	179.782.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran		
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10		B11	B12
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(% Plan Penyerapan Budget)						
59.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN MAKANAN/ MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	190.080.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	38.016.000,00	20,00 (%)						
60.	BBPOM di Palembang	B	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	150.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00	20,00 (%)						
61.	BBPOM di Palembang	C	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	471.917.000,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	94.383.400,00	20,00 (%)						
62.	BBPOM di Palembang	D	PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	715.623.000,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	143.124.600,00	20,00 (%)						
63.	BBPOM di Palembang	E	PERLENGKAPAN KANTOR	269.400.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	53.880.000,00	20,00 (%)						
64.	BBPOM di Palembang	F	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6	108.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00	20,00 (%)						
65.	BBPOM di Palembang	G	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	6.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	20,00 (%)						
66.	BBPOM di Palembang	H	TAGIHAN LANGGANAN DAYA DAN JASA	996.000.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	199.200.000,00	20,00 (%)						
67.	BBPOM di Palembang	I	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	1.173.072.000,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	234.614.400,00	20,00 (%)						
68.	BBPOM di Palembang	J	ADMINISTRASI	184.080.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	36.816.000,00	20,00 (%)						
Total				882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	3.531.037.400,00								
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			10	15	25	35	45	50	55	65	75	80	90	9	222.047.200,00

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	BIMTEK PETUGAS PASAR	53.360.000,00	10.672.000,00	10.672.000,00	10.672.000,00	10.672.000,00	42.688.000,00	80,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	A	PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR	51.249.000,00	10.249.800,00	10.249.800,00	10.249.800,00	10.249.800,00	40.999.200,00	80,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	A	PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	70.600.000,00	14.120.000,00	14.120.000,00	14.120.000,00	14.120.000,00	56.480.000,00	80,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	A	LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA PENGAWASAN PANGAN BULAN PUASA	102.350.000,00	20.470.000,00	20.470.000,00	20.470.000,00	20.470.000,00	81.880.000,00	80,00 (%)				
Total				55.511.800,00	55.511.800,00	55.511.800,00	55.511.800,00	222.047.200,00						
Total									30.567.108.000,00					

Jakarta, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Palembang



Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm.

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI PALEMBANG
JUNI / TRIWULAN 2 TAHUN 2022**

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (Kumulatif)	Realisasi s.d bulan				
					JUNI	JUNI				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	91,50	382	409	93,40	102,07	102,07
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM DI PALEMBANG	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,00	88,00	166	175	94,86	107,79	107,79
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM DI PALEMBANG	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	96,00	240	241	99,59	103,73	103,73
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00	82,00	16	18	88,89	108,40	108,40

1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92,00	92,00	66	85	77,65	84,40	84,40
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM DI PALEMBANG	84,00		-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di wilayah kerja BBPOM di Palembang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,90		-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77,12		-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00		-	-	-	-	-

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,50	60,00	-	-	31,51	52,52	31,67
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	65,00	-	-	31,72	48,80	48,80
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	163	170	95,88	95,88	95,88
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	39	111	35,14	58,56	58,56
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	240	347	69,16	104,79	104,79

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	15	Indeks Pelayanan Publik	4,20		-	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	40,00	-	-	71,67	179,17	71,67
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40	50,00	-	-	87,16	174,32	91,36
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	59,00	50,00	-	-	20,00	40,00	20,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	19	Jumlah desa pangan aman	19,00	50,00	-	-	49,99	99,98	49,99

5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	9,00	50,00	-	-	55,00	110,00	55,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	40,00	-	-	51,43	128,58	51,43
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	40,00	-	-	49,29	123,22	49,29
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	64,00	44,56	-	-	48,00	107,72	75,00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal	24	Indeks RB BBPOM DI PALEMBANG	83,90		-	-	-	-	-
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal	25	Nilai AKIP BBPOM DI PALEMBANG	80,90		-	-	-	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM DI PALEMBANG	84,75		-	-	-	-	-

10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00		-	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM DI PALEMBANG yang optimal	2,25	1,90	-	-	2,9000	152,63	128,89
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM DI PALEMBANG	98,70	55,00	-	-	75,63	137,51	76,62

Palembang, 09 JULI 2022

Kepala Balai Besar POM
di Palembang



Drs.Zulkifli,Apt

LAMPIRAN VI. CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI S.D TRIWULAN II TAHUN 2022

S.D TRIWULAN II

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	93,40	102,08%	487.649.000	314.829.916	31,28%	3,26	2,26	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,00	94,86	107,80%	255.042.500	95.584.765	2,84%	37,96	36,96	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	99,59	103,74%	487.649.000	314.829.916	31,28%	3,32	2,32	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00	88,89	108,40%	282.609.500	102.265.890	4,77%	22,74	21,74	75 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92,00	77,65	84,40%	27.567.000	6.681.125	22,60%	3,73	2,73	75 %
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,00	-	0,00%	135.000.000	30.431.680	13,13%	0,00	-1,00	75 %
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,90	-	0,00%	167.878.600	66.405.163	34,24%	0,00	-1,00	75 %
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77,12	-	0,00%	198.105.000	41.988.162	0,00%	0,00	-1,00	75 %
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	92,00	-	0,00%	55.511.800	45.186.704	58,73%	0,00	-1,00	75 %
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,50	31,51	31,67%	57.300.200	22.364.275	16,05%	1,97	0,97	88 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	31,72	48,80%	57.300.200	22.364.275	16,05%	3,04	2,04	75 %
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	95,88	95,88%	267.200.000	48.463.196	11,47%	8,36	7,36	75 %
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	35,14	58,57%	83.490.000	50.639.310	33,77%	1,73	0,73	90 %
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	69,16	104,79%	458.401.600	178.914.202	16,05%	6,53	5,53	75 %
14	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	4,20	-	0,00%	66.800.000	12.115.799	11,47%	0,00	-1,00	75 %
15	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	71,67	93,08%	101.431.000	14.482.000	0,00%	0,00	-1,00	75 %
16	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40	87,16	91,36%	1.832.040.000	994.389.285	38,50%	0,00	-1,00	75 %
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100,00	20,00	20,00%	671.514.400	265.620.652	34,24%	0,58	-0,42	75 %
18	Jumlah desa pangan aman	100,00	49,99	49,99%	792.420.000	167.952.650	0,00%	0,00	-1,00	75 %
19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	55,00	55,00%	222.047.200	180.746.814	58,73%	0,94	-0,06	75 %
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	51,43	51,43%	1.544.400.000	596.371.917	9,07%	5,67	4,67	75 %
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	49,29	49,29%	1.029.600.000	397.581.278	9,07%	5,44	4,44	75 %
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	64,00	48,00	75,00%	850.009.000	166.730.383	6,48%	11,57	10,57	75 %
23	Indeks RB Balai Besar POM di Palembang	83,90	-	0,00%	3.531.037.400	1.812.368.598	24,46%	0,00	-1,00	75 %
24	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	80,90	-	0,00%	3.531.037.400	1.812.368.598	24,46%	0,00	-1,00	75 %
25	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang	84,75	-	0,00%	3.531.037.400	1.812.368.598	24,46%	0,00	-1,00	75 %
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00	-	0,00%	2.780.955.000	1.691.384.060	8,68%	0,00	-1,00	75 %
27	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	2,25	2,90	128,89%	3.531.037.400	1.812.368.598	24,46%	5,27	4,27	75 %
28	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	98,70	75,63	76,63%	3.531.037.400	1.812.368.598	24,46%	3,13	2,13	75 %
	TOTAL			52,99%	30.567.108.000	14.890.166.403	48,71	0,01	-0,99	75 %

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG**

**NOTA DINAS
NOMOR: PR.08.01.6A.6A51.07.22.021**

Yth : Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi
Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
Lampiran : -
Hal : Apresiasi
Tanggal : 13 Juli 2022

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tri Wulan II (Periode April s/d Juni 2022), di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Keterangan
1.	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	50%	55%	Target Tercapai 110,00%

Saya memberikan **Apresiasi** kepada Saudara, dan selanjutnya agar tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja sehingga realisasi tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Zulkifli

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG**

**NOTA DINAS
NOMOR: PR.08.01.6A.6A51.07.22.022**

Yth : Koordinator Kelompok Substansi Infokom
Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
Lampiran : -
Hal : Peringatan
Tanggal : 13 Juli 2022

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tri Wulan II (Periode April s/d Juli 2022), di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Keterangan
1.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50 %	20,00 %	Target Tidak Tercapai (Capaian: 40,00% (<50 kriteria Sangat Kurang).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saya memberikan **Peringatan** kepada Saudara, dan selanjutnya agar melakukan pemetaan akar masalah dan upaya perbaikan dalam bentuk CAPA untuk mengejar ketertinggalan target sehingga realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih



Zulkifli

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG**

**NOTA DINAS
NOMOR: PR.08.01.6A.6A51.07.22.023**

Yth : Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan dan Subkoordinator
Subkelompok Substansi Inspeksi
Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
Lampiran : -
Hal : Peringatan
Tanggal : 13 Juli 2022

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tri Wulan II (Periode April s/d Juni 2022), di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Keterangan
1.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	60 %	31,51 %	Target Tidak Tercapai (Capaian: 52,52% (<70 kriteria kurang).
2.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	65 %	31,72 %	Target Tidak Tercapai (Capaian: 48,80% (<50 kriteria Sangat kurang).
3.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60 %	35,14 %	Target Tidak Tercapai (Capaian: 58,56% (<70 kriteria kurang).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saya memberikan **Peringatan** kepada Saudara, dan selanjutnya agar melakukan pemetaan akar masalah dan upaya perbaikan dalam bentuk CAPA untuk mengejar ketertinggalan target sehingga realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih



Zulkifli

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG**

**NOTA DINAS
NOMOR: PR.08.01.6A.6A51.07.22.024**

Yth : Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dan Subkoordinator
Subkelompok Substansi Pengujian Kimia
Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
Lampiran : -
Hal : Peringatan
Tanggal : 13 Juli 2022

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tri Wulan II (Periode April s/d Juni 2022), di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Keterangan
1.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92.00	77,65	Target Tidak Tercapai (Capaian: 84,40% (<90 kriteria CUKUP)).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saya memberikan **Peringatan** kepada Saudara, dan selanjutnya agar melakukan pemetaan akar masalah dan upaya perbaikan dalam bentuk CAPA untuk mengejar ketertinggalan target sehingga realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih



Zulkifli

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG

NOMOR OT.01.03.6A.6A52.01.22.66 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN REWARD DAN PUNISHMENT PENCAPAIAN KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk proses pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja organisasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penyesuaian penetapan Reward and Punishment Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Penetapan Reward dan Punishment Pencapaian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KIL) 2020-2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan POM 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REWARD DAN PUNISHMENT PENCAPAIAN KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2022

Kesatu : Kepala Balai Besar POM di Palembang selaku Pimpinan Unit dapat memberikan reward dan punishment terhadap pejabat eselon di bawahnya sebagai evaluasi internal untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja unit.

Kedua : Parameter pemberian reward dan punishment didasarkan kepada capaian kinerja unit berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan capaian kinerja masing- masing pejabat yang telah ditetapkan, yang dievaluasi tiap triwulan tahun anggaran dengan kriteria:

Pemberian...

Pemberian Reward:

Jika Persentase capaian kinerja unit dan capaian kinerja masing-masing pejabat : > 110% dan < 120% (Sangat Baik) Pemberian Reward berupa pemberian piagam/ sertifikat.

Pemberian Punishment:

Jika Persentase capaian kinerja unit dan capaian kinerja masing-masing pejabat : < 90 % (cukup) Pemberian Punishment berupa menyiapkan 3 paket hadiah untuk kegiatan quis RB.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat.
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat.
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
5. Persentase pangan portifikasi yang memenuhi syarat.
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.
8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Palembang.
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang.
16. Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik.
17. Tingkat...

17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan.
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.
19. Jumlah desa pangan aman.
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.
21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
23. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
24. Indeks RB Balai Besar POM di Palembang.
25. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang.
26. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang.
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.
28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palembang yang optimal.
29. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan serta perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Januari 2022
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,



ZULKIFLI